

KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PRIORITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Ujian Sarjana (S1)

Di Jurusan Teknik Planologi

Oleh :

Dicky Ferdiansyah : 993060038



**JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013**

**KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PRIORITAS PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

TUGAS AKHIR



NAMA : DICKY FERDIANSYAH

NRP : 993060038

Mengetahui/Menyetujui

Dr. Budi Heri Pirngadie, Ir., MT
Pembimbing Utama

Ari Djatmiko, Ir., MT
Co – Pembimbing

**KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PRIORITAS PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

TUGAS AKHIR

Oleh :

Dicky Ferdiansyah

993060038

Menyetujui :

- | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Budi Heri Pirngadie, Ir., MT | (PembimbingUtama/ Penguji) | |
| | | |
| 2. Ari Djatmiko, Ir., MT | (Co – Pembimbing/ Penguji) | |
| | | |
| 3. Reza M Surdia, Ir., MT | (Penguji) | |
| | | |
| 4. Jajan Rohjan, Ir., MT | (Penguji) | |
| | | |
| 5. Supratignyo Aji., Ir., MT | (Ketua Sidang) | |
| | | |

Mengetahui :

(Dr. Firmansyah, Ir., MT)
Koordinator TA/ Ujian Sarjana

(Reza M. Surdia Ir., MT)
Ketua Jurusan

KATA PENGANTAR



Assalamualailum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul **KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PRIORITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan tahap akhir dari proses belajar setiap mahasiswa serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Strata-1 (S1) di Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan Bandung. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan wilayah studi

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang telah membantu, maka dari itu penulis mengucapkan teimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Heri Pirngadie Ir, MT., selaku Pembimbing utama atas masukan, saran, serta petunjuk yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Ari Djatmiko Ir, MT., selaku co- pembimbing atas masukan, saran, serta petunjuk yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Reza M. Surdia Ir, MT., selaku penguji merangkap sebagai Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan banyak masukan, bantuan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Jajan Rohjan Ir, MT., selaku penguji merangkap Sekretaris Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan Bandung, yang telah banyak membantu, dan memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak, Supratignyo Aji Ir, MT., selaku ketua sidang, yang telah memberikan banyak perhatian, dukungan dan motivasi serta menguji penulis pada sidang ujian.
6. Bapak Dr. Firmansyah Ir., MT selaku koordinator Tugas Akhir dan juga dosen wali yang telah memberikan banyak bantuan dan pengarahan.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu.

8. Ibu Sri, Pak Yogi, serta Pak Dedi, selaku staff TU Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan terima kasih atas semua bantuan dan kerjasamanya.
9. Mama tercinta, atas dukungan dan kesabarannya selama ini
10. Feby dan anakku Adhief yang selalu memberikan dorongan dan pengertian yang sedalam-dalamnya kepada penulis.
11. Ckienan Afganshah dan Cecep A. Ansarulloh yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam segala bidang.
12. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Planologi Universitas Pasundan angkatan 96,97,98,99,00 yang secara tidak langsung memberikan semangat untuk lulus.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis akan sangat terbuka dan senang hati menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr

Bandung, 2013

Penulis

SARI

Sampah merupakan benda-benda hasil dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Kehadiran sampah merupakan salah satu persoalan yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan instansi pengelola kebersihan, karena itu diperlukan sistem pengelolaan persampahan yang baik. Permasalahan sampah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah tidak semua wilayah kecamatan dilayani oleh pemerintah Kabupaten dari 15 kecamatan. Dari 15 kecamatan yang ada baru 5 kecamatan yang dilayani oleh UPTD Kebersihan.

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan wilayah perkotaan kecamatan yang perlu dilayani oleh sistem pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat. Ruang lingkup penelitian meliputi tinjauan sistem pengelolaan persampahan eksisting, tinjauan internal Kabupaten Bandung Barat meliputi kebijakan dan Rencana Tata Ruang terkait Fisik dan Guna Lahan, Ekonomi, Sosial dan Kependudukan, kemudian sarana dan prasarana. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah Distribusi Frekuensi, dan MCDM.

Variabel-variabel yang mempengaruhi pelayanan prioritas dalam pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat diidentifikasi dari penjabaran skala tingkat pelayanan prioritas pelayanan persampahan yang mencakup Dominasi Fungsi utama kawasan perkotaan, topografi, kepadatan penduduk, tingkat pendapatan penduduk, daerah pelayanan. Tahap berikutnya menguraikan penilaian terhadap variabel-variabel tersebut. Tahap selanjutnya adalah menentukan bobot dari masing-masing variabel tersebut dengan ketentuan dari bobot yang telah ditentukan, nilai dan bobot yang didapat dari teknik analisis sebelumnya dijumlahkan dengan metode MCDM skor yang didapat dari teknik analisis ini menunjukkan wilayah perkotaan kecamatan yang masuk pada wilayah prioritas pelayanan persampahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa wilayah perkotaan kecamatan yang masuk pada pelayanan prioritas dan masuk pada kondisi 1 yaitu Wilayah Perkotaan Kecamatan, Padalarang, Ngamprah,. Pada wilayah perkotaan kecamatan yang mendapat pelayanan menengah dan masuk pada kondisi 2 adalah Wilayah Perkotaan Kecamatan Lembang, Cihampelas, Cisarua, dan Wilayah Perkotaan Cipeundeuy. Sedangkan wilayah perkotaan kecamatan yang termasuk pada pelayanan persampahan rendah dan masuk pada kondisi 3 adalah Wilayah Perkotaan Kecamatan, Cililin dan Wilayah Perkotaan Kecamatan Cikalongwetan. Pada wilayah perkotaan kecamatan yang memiliki skor terendah dan terpilih sebagai wilayah tanpa pelayanan dan masuk pada kondisi 4 adalah Wilayah Perkotaan Kecamatan, Batujaja dan Wilayah Perkotaan Cipatat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SARI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan persoalan.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	3
1.5 Metodologi Penelitian.....	4
1.5.1 Tahapan Studi	4
1.5.2 Metode Pengambilan Data.....	6
1.5.3 Teknis Analisis	6
1.6 Sistematika Pembahasan	7
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Ruang dan Perwilayahan	11
2.1.1 Pengertian Wilayah Untuk Kebutuhan Perencanaan/Pembangunan	12
2.1.2 Pengertian Perencanaan Wilayah.....	13
2.1.3 Urutan Langkah-langkah Dalam Perencanaan Wilayah	14
2.1.4 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Wilayah	15
2.1.5 Jenis-Jenis Perencanaan	16
2.2 Sampah	21
2.2.1 Sumber Sampah	22
2.2.2 Komposisi sampah	24
2.2.3 Timbulan Sampah.....	26
2.3 Pengelolaan sampah	28
2.3.1 Tingkat Pengelolaan	31
2.3.2 Tingkat dan Kualitas Pelayanan	33
2.3.3 Daerah Dan Jenis Pelayanan.....	34
2.3.4 Teknik Operasional Pengelolaan Sampah	36
2.3.5 Pengumpulan Sampah.....	39
2.3.6 Pengolahan Sampah.....	40
2.3.7 Pembuangan.....	41
2.3.8 Daur ulang sampah	42
2.4 Aspek Non-Teknis Dalam Pengelolaan.....	43
2.4.1 Aspek Hukum	44
2.4.2 aspek Kelembagaan	45
2.4.3 Retribusi persampahan.....	46
2.4.4 Aspek Peran Serta Masyarakat	46

2.5. Metode Analisis	47
2.5.1 Teori Distribusi Frekuensi	47
2.5.2 Teori MCDM	48
2.6. Tinjauan Studi Terdahulu	49

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah dan kondisi Geografis Perkembangan KBB	57
3.1.1 Administrasi Pemerintahan dan Batas Wilayah	58
3.1.2 Fisik Dasar	61
3.1.3 Kondisi Kependudukan	64
3.1.4 Kondisi Sarana Wilayah	68
3.1.5 Kondisi Prasarana Wilayah	76
3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat	87
3.2.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengembangan	87
3.2.2 Rencana Struktur Ruang	92
3.2.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	93
3.2.4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	95

BAB IV

KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PRIORITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.1 Tahap Analisis	100
4.1.1 Penentuan Variabel	100
4.2 Analisis Penentuan Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan	101
4.2.1 Dominasi Fungsi utawa Kawasan Perkotaan	101
4.2.2 Kategori Kondisi Kemiringan	104
4.2.3 Kategori Kepadatan Penduduk	106
4.2.4 Kategori Tingkat Pendapatan di Kabupaten Bandung Barat	109
4.2.5 Kategori Daerah Pelayanan	111
4.2.6 Kategori Kondisi Lingkungan	114
4.3 Kriteria Analisis	116
4.4 Pemilihan Wilayah Perkotaan	117

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	122
5.3 Kelemahan Studi	123

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Komposisi Sampah.....	24
Tabel II.2	Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya.....	27
Tabel II.3	Skala Kepentingan Daerah Pelayanan	35
Tabel II.4	Matrik Studi Terdahulu	55
Tabel III.1	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	57
Tabel III.2	Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	59
Tabel III.3	Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha)	61
Tabel III.4	Ketinggian per Kecamatan (Ha).....	62
Tabel III.5	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga.....	66
Tabel III.6	Jumlah dan Sebaran Penduduk.....	66
Tabel III.8	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	69
Tabel III.9	Jumlah Perumahan Di Kabupaten Bandung Barat	71
Tabel III.10	Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat	73
Tabel III.11	Jumlah Pengguna Air Bersih Di Kabupaten Bandung Barat.....	78
Tabel III.12	Timbulan Air Limbah Kabupaten Bandung Barat	80
Tabel III.13	Wilayah pelayanan Kebersihan	83
Tabel III.14	Jumlah TPS dan Sarana Sampah	85
Tabel IV.1	Nilai Dominasi Fungsi Utama Kabupaten Bandung Barat	102
Tabel IV.2	Kondisi Kemiringan di Kabupaten Bandung Barat.....	104
Tabel IV.3	Tingkat Kepadatan Kecamatan Kabupaten Bandung Barat	107
Tabel IV.4	Tingkat Pendapatan di Kabupaten Bandung Barat	109
Tabel IV.5	Daerah Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat	112
Tabel IV.6	Kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi.....	9
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran Studi.....	5
Gambar 2.1	Teknik Oprasional Pengelolaan Sampah.....	38
Gambar 2.2	Bagan Proses Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dengan Sistem Individual Langsung	40
Gambar 2.3	Bagan Proses Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dengan Sistem Individual Tidak Langsung	41
Gambar 3.2	Peta Gambaran Persampahan KBB	86
Gambar 4.1	Peta Dominasi Fungsi	103
Gambar 4.2	Peta Kemiringan Penduduk	105
Gambar 4.3	Peta Kepadatan Penduduk	108
Gambar 4.4	Peta Pendapatan Penduduk.....	110
Gambar 4.5	Peta Daerah Pelayanan	113
Gambar 4.6	Peta Kondisi Lingkungan	115
Gambar 5.1	Peta Hasil Analisis.....	124

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan akan mempengaruhi perubahan di segala bidang kehidupan di dalam masyarakat yang tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi manusia, namun dapat juga menimbulkan akibat sampingan yang tidak dikehendaki dan mengandung resiko pencemaran serta pengrusakan lingkungan. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang diakibatkan limbah hasil dari aktivitas industri maupun limbah domestik (sampah padat) yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari (Damanhuri, 2005:1-1). Produksi sampah padat kota yang tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan daya dukung lingkungan kota semakin lama semakin menurun untuk menetralsir zat-zat pencemar dari produksi sampah padat tersebut (Litbang PD Kebersihan Kota Bandung, 1998/1999:I-1).

Sampah pada dasarnya merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah.

Persoalan pencemaran lingkungan tidak saja menyangkut sampah yang tidak terangkut, tetapi juga sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di daerah perkotaan sangat sulit untuk mencari lahan yang dapat digunakan untuk TPA. Hal ini selain harganya yang cenderung sangat mahal juga selalu berhadapan dengan reaksi masyarakat yang cenderung negatif terhadap keberadaan TPA di lingkungannya. Resistensi masyarakat yang paling utama disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah secara open dumping di TPA, baik menyangkut pencemaran udara, air, maupun tanah.

Pada perkembangannya, disamping memberikan manfaat, pembangunan memberikan konsekuensi negatif bagi manusia yang secepatnya perlu diantisipasi dan ditanggulangi, yaitu sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau

pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.

Di berbagai wilayah, masalah penanggulangan sampah mampu menarik perhatian semua pihak, karena semakin terasa dapat mengakibatkan berbagai dampak terhadap manusia dan lingkungan seperti pencemaran perairan, tanah, dan udara yang selanjutnya mempengaruhi kualitas kehidupan. Apalagi dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan penambahan penduduk menyebabkan permasalahan ini menjadi semakin kompleks.

Selama masih ada manusia, sampah akan tetap ada. Ironisnya, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sampah justru belum dikelola dengan tepat. Padahal, sampah merupakan masalah yang serius yang jika tidak dikelola dengan baik akan membebani pemerintah.

1.2. Rumusan persoalan

Sistem pengelolaan sampah yang dijalankan di sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan sampah yang ada. Hal ini disebabkan

- a. Pengelolaan sampah di Kabupaten Barat belum mencakup seluruh wilayah yang ada.
- b. Seiring dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bandung Barat, sampah yang dihasilkan menjadi besar.
- c. Fungsi daerah yang menjadikan daerah tersebut menjadi penghasil sampah yang besar.

Masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten yang baru berdiri. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat hanya 5 Kecamatan yang telah dilayani oleh UPTD Kebersihan Kabupaten Bandung Barat itupun telah dilaksanakan oleh Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bandung.

Hal ini menjadi persoalan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena dengan belum terlayannya seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat akan berpengaruh pada lingkungan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *bagaimana menentukan daerah pusat perkotaan yang membutuhkan pelayanan prioritas berdasarkan perkembangan Kabupaten Bandung Barat?*

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi

Berdasarkan dari latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji wilayah prioritas pelayanan persampahan perkotaan Kabupaten Bandung Barat

Agar sampai pada tujuan diatas, maka terdapat beberapa sasaran yang perlu dicapai yaitu :

1. Mengkaji kebijakan yang terkait dengan wilayah studi dan juga mengkaji mengenai tinjauan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan persampahan.
2. Mengidentifikasi karakteristik wilayah studi berdasarkan daerah pelayanan persampahan.
3. Mengkaji daerah-daerah pelayanan persampahan disertai dengan kajian mengenai jenis-jenis pelayanan persampahan di wilayah studi.
4. Menentukan daerah pelayanan prioritas berdasarkan skala kepentingan daerah pelayanan berdasarkan pengembangan tata ruang wilayah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam studi ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup wilayah

Berdasarkan tujuan dan sasaran studi maka ruang lingkup studi ini akan mencakup faktor – faktor kebijakan, fisik, kependudukan, sosial ekonomi, dan sarana prasarana. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 15 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 130.577,40 Ha.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi yang dibahas dalam penelitian Kajian Prioritas Wilayah Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat ini Dengan batasan-batasan materi :

1. Kondisi eksisting wilayah studi, dalam hal ini kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat.

2. Tinjauan Internal Kabupaten Bandung Barat dilihat dari kebijakan dan RTR terkait, Fisik dan Guna Lahan, Ekonomi Perkotaan, Sosial dan Kependudukan, kemudian sarana dan parasarana.
3. Variabel yang menentukan pelayanan prioritas dengan variabel fungsi dan nilai daerah, topografi, tingkat pendapatan penduduk, kepadatan penduduk, daerah pelayanan, dan kondisi lingkungan.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian laporan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tahapan studi yang dilakukan, metode pengambilan data, dan teknik analisis yang digunakan.

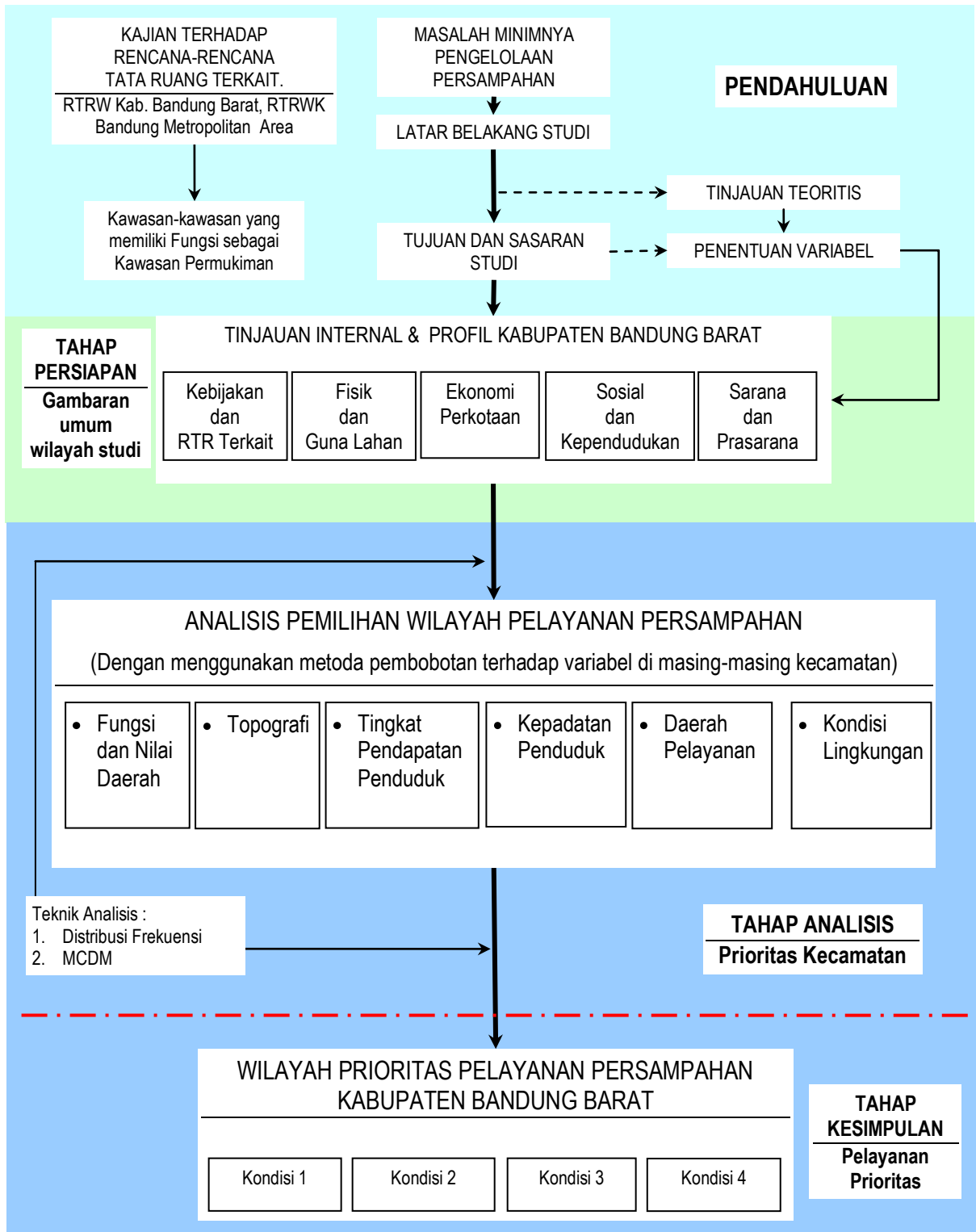
1.5.1 Tahapan studi

Pencapaian tujuan studi biasanya akan melalui beberapa tahapan yang mendahuluinya. Studi ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan berupa pengumpulan data dan informasi terbaru.
 - Studi mengenai karakteristik Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan sistem persampahan.
 - Penelaahan faktor fisik *geografis* terutama berhubungan dengan letak/posisi wilayah pengamatan dalam konteks wilayah kota, posisi kota terhadap wilayah yang lebih luas, sehingga dengan penelaahan secara kualitatif dapat diketahui potensi persampahan di wilayah pengamatan.
- b. Tahap perencanaan terdiri dari pemilihan daerah prioritas pelayanan persampahan dengan melihat fungsi dan nilai daerah, topografi, tingkat pendapatan penduduk, kepadatan penduduk, daerah pelayanan, dan kondisi lingkungan.

adapun kerangka pendekatan dan tahapan studi secara terperinci dapat dilihat pada **gambar 1.1** pada halaman berikut ini.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Kerangka Pendekatan Studi



1.5.2 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dilakukan melalui penelitian dan studi literatur, sedangkan metode analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, lebih lengkap mengenai metode pengambilan data dan informasi terhadap wilayah studi meliputi :

1. Metode pengambilan data primer yaitu metode pengambilan data yang di dapat langsung dari lapangan dengan mengamati objek-objek yang menjadi sasaran penelitian. Bentuk pengamatan / pengumpulan data secara primer dapat berupa:
 - a. Observasi lapangan, dilakukan dengan mengamati kondisi wilayah studi, letak fasilitas, kegiatan sosial budaya, kependudukan, potensi dan permasalahan persampahan.
 - b. Wawancara / tanya jawab, dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan para ahli (expert) yang dianggap dapat mewakili kelompoknya baik formal maupun informal.
 - c. Quesioner, yaitu rangkaian pertanyaan yang tertuang secara tertulis dalam bentuk lampiran pertanyaan, yang disebarakan kepada para responden yang terkait dengan studi.
 - d. Dokumentasi
2. Metode pengumpulan data sekunder adalah metode pengumpulan data dengan mendatangi instansi terkait untuk mendapatkan data tertulis dari topik yang akan dikaji.
3. Teknik sampling.
 Sampling adalah cara pengumpulan data dengan tidak melibatkan seluruh objek penelitian. Teknik sampling bertujuan untuk memudahkan analisis, terutama jika populasi sangat besar, maka kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengumpulkan data-data, masalah biaya, waktu, kualitas dan faktor ekonomis sehingga sulit untuk dianalisis. Berdasarkan kebutuhan penelitian, maka responden dalam studi ini adalah para ahli yang terkait dengan kegiatan persampahan di Kabupaten Bandung Barat.

1.5.3 Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam “Kajian Wilayah Prioritas pelayanan Persampahan Di Kabupaten Bandung Barat” adalah sebagai berikut

1. Teori Distribusi Frekuensi

Penggunaan teori distribusi dilakukan sebagai dasar pertimbangan kategorisasi variabel penelitian di wilayah studi. Fungsinya untuk memudahkan penulis dalam hal pengelompokkan kembali masing-masing wilayah berdasarkan karakteristiknya untuk semua variabel yang dikaji.

2. Analysis Multi Criteria Decision Making (MCDM)

Untuk mengetahui kesesuaian kecamatan bagi kegiatan pengembangan persampahan digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan secara kualitatif dilakukan dengan membandingkan kondisi antar kecamatan, untuk memilih kecamatan yang prioritas bagi Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan pendekatan secara kuantitatif dilakukan dengan memanfaatkan hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yaitu metode scoring dengan menggunakan distribusi frekuensi.

Adapun metode MCDM adalah metode untuk memberikan pemilihan terhadap beberapa variabel yang telah ditetapkan, yaitu dengan menggabungkan kedua metode sebelumnya sehingga diketahui besaran nilai untuk wilayah studi dan membantu peneliti untuk menetapkan Prioritas kecamatan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan untuk bab-bab selanjutnya disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

bab ini merupakan bagian awal penulisan yang berisikan latar belakang, perumusan persoalan, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II TINJAUAN TEORITIS

memuat keterangan mengenai dasar-dasar teori atau tinjauan teoritis serta kajian sudi terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu Pelayanan persampahan yang akan diterapkan dalam wilayah studi.

Bab III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

menjabarkan mengenai gambaran umum aspek-aspek terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dalam wilayah studi Kabupaten Bandung Barat dirinci hingga Kecamatan-kecamatan.

Bab IV ANALISIS WILAYAH PRIORITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN

menganalisis hal-hal yang terkait dengan sistem pelayanan persampahan dilihat dari fungsi dan nilai daerah, topografi, tingkat pendapatan, kepadatan penduduk, daerah pelayanan dan kondisi lingkungan.

Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

memberikan penjelasan dan kesimpulan dalam Kajian Wilayah Prioritas Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat.

Kajian Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Bandung Barat

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

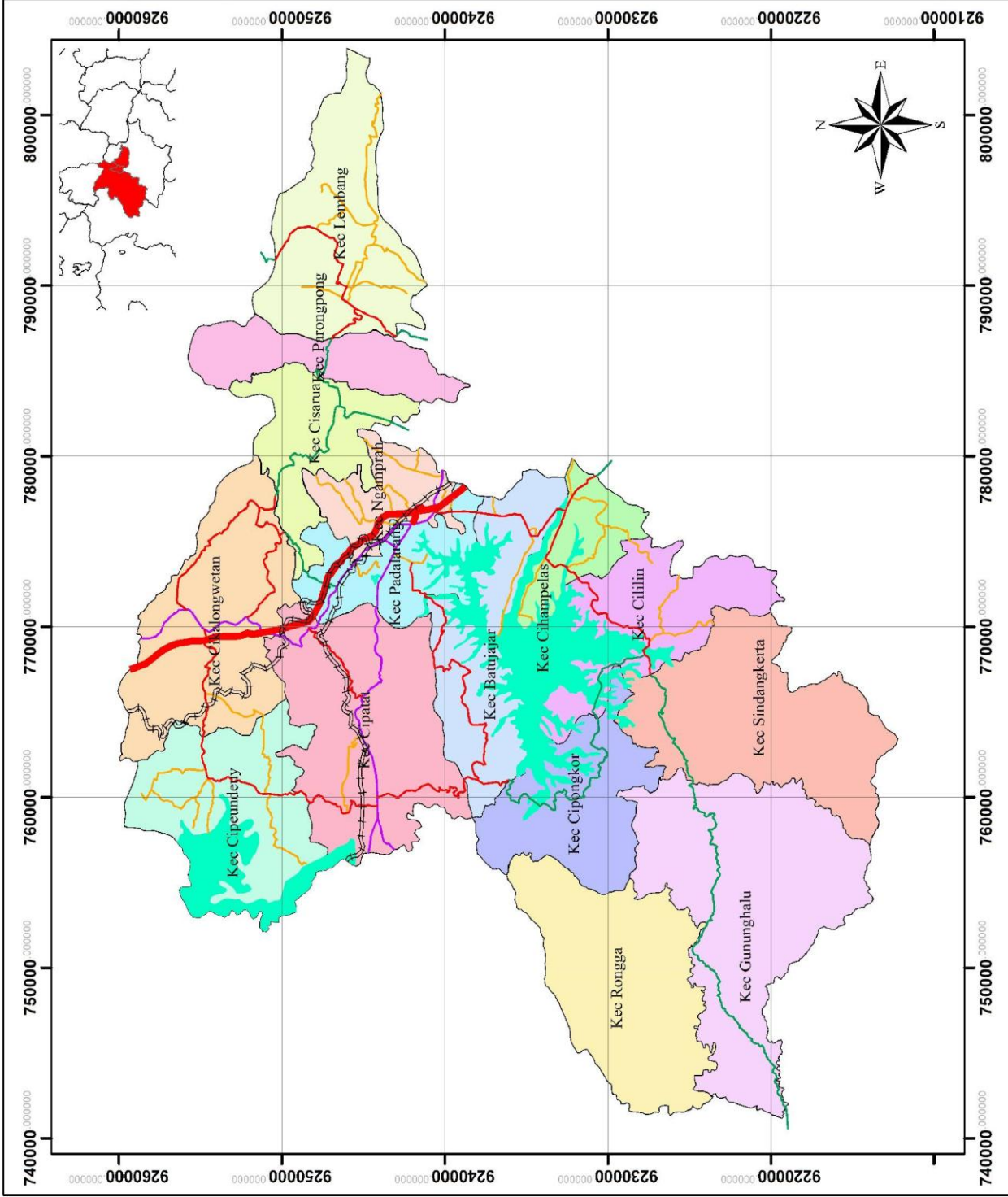
- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ

- Kecamatan**
- Kec Batujajar
 - Kec Cihampelas
 - Kec Cikalongwetan
 - Kec Cililin
 - Kec Cipatat
 - Kec Cipeundeuy
 - Kec Cipongkor
 - Kec Cisarua
 - Kec Gunungghalu
 - Kec Lembang
 - Kec Ngamprah
 - Kec Padalarang
 - Kec Parongpong
 - Kec Rongga
 - Kec Sindangkerta

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bab II

Tinjauan Teoritis

Kesehatan lingkungan menyangkut manusia dan masyarakat serta keseimbangannya dengan lingkungan, agar terjamin kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Keadaan kesehatan lingkungan ditentukan oleh keadaan lingkungan fisik, biologis dan sosial. Keadaan tersebut senantiasa berubah sepanjang perkembangan dunia dengan peradaban manusianya, serta perkembangan alam sekitarnya. (Budiharjo, 2006:71).

Manusia dalam daya dan upaya untuk mempertahankan eksistensinya, melakukan kegiatan produksi dan reproduksi, yang di satu pihak dapat menguntungkan atau membantu daya upaya peningkatan kualitas hidup, di lain pihak dapat pula menyebabkan terjadinya masalah-masalah baru yang merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Masalah kesehatan lingkungan kait mengait dengan masalah yang menyangkut manusia (kependudukan, sikap dan perilaku, pendidikan dan kesempatan kerja), aspek kegiatan manusia (industrialisasi, alam, aspek keadaan alam (iklim, geografi, geologi, topografi, flora dan fauna), serta aspek kegiatan alam (gempa, banjir, angin topan, erosi, gunung meletus). (Budiharjo, 2006:72).

Kota menjadi mekar diluar kemampuan pengelola kota untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas yang layak bagi penduduk kota, sedangkan kemampuan dan keterlibatan masyarakatnya pada pemeliharaan lingkungan pemukiman pada umumnya serta kesehatan lingkungan pada khususnya juga sangat terbatas.

Melihat pertumbuhan kota masa kini, di samping masalah sosial ekonomi, (antara lain lapangan kerja), terdapat masalah kesehatan lingkungan yang menyangkut pemukiman dan perumahan yaitu (Budiharjo, 2006:72):

- a. Penyediaan sarana dan pengawasan kualitas air bersih.
- b. Pembuangan sampah dan limbah.
- c. Penyediaan sarana pembuangan kotoran.
- d. Penyediaan fasilitas dan pelayanan umum, serta pencemaran air dan udara.

Pembuangan sampah di kota pada umumnya belum memadai karena kurangnya fasilitas angkutan, makin terbatasnya tempat pembuangan,

kurangnya biaya, sistem pengangkutan dan pembuangan yang belum saniter dan kurangnya kesadaran masyarakat.

2.1 Ruang dan Perwilayahan

Apabila kita menyebut kata ruang, apa sebetulnya yang terbayang dalam benak kita. Apakah ruang itu abstrak atau riil. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkret dari itu, sedangkan riil maka ruang itu memiliki batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi juga bisa sangat luas. Kita bisa membayangkan bahwa ruang hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda tersebut.

Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda/kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda/kegiatan (Tarigan, 2005:110-111). Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri/karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas, ruang tamu berisi benda maupun kegiatan sebagai menerima tamu, dan lain-lain. Didalam UU.No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang yang pada permukaan bumi. Pengertian permukiman bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, didalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi. Menurut Glasson seperti dikutip dari Tarigan (2005:111) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah

suatu model agar kita membedakan lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia secara sistematis. Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam setiap wilayah. Wilayah dapat dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri diatas.

2.1.1 Pengertian Wilayah Untuk Kebutuhan Perencanaan/Pembangunan

Pengertian wilayah yang digunakan dalam perencanaan dapat berarti suatu wilayah yang sangat sempit atau sangat luas, sepanjang didalamnya terdapat unsur atau *space* (Tarigan, 2005:113). Untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi atau dikelompokkan ke dalam suatu kesatuan agar bisa dibedakan dengan kesatuan yang lain. Apakah kita membagi atau mengelompokkan tergantung pada titik awal ruang wilayah yang kita maksudkan. Apabila titik awal adalah ruang yang luas dan ingin di analisis dalam bentuk subbagiannya maka yang kita lakukan adalah membagi wilayah yang luas kedalam beberapa subwilayah di mana pembagiannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Demikian pula apabila titik awalnya adalah wilayah yang kecil-kecil dan ingin dikelompokkan dalam beberapa kesatuan yang lebih besar, hal ini dilakukan mengikuti kriteria yang digunakan. Satuan yang baru itu tetap dinamakan wilayah tetapi dengan tambahan ciri/karakter tertentu sehingga dapat peta bayangkan luasnya lebih kecil atau lebih besar dari luas titik awalnya. Misalnya, negara Republik Indonesia dapat dibagi atas provinsi, provinsi dapat dibagi menjadi Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dapat dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas kelurahan/desa, dan kelurahan/desa dapat dibagi atas dusun lingkungan.

Kata wilayah saat ini bahkan digunakan untuk mencakup wilayah beberapa negara sekaligus. Menjadikan wilayah beberapa negara sebagai satu kesatuan haruslah ada dasarnya, misalnya karena ada ikatan seperti kerjasama ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Dengan demikian, patut dipertanyakan apa kondisi umum yang harus dipenuhi agar sekelompok wilayah negara itu dapat dijadikan satu kesatuan ruang. Di dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai istilah yang artinya bersangkutan paut dengan ruang, antara lain wilayah, daerah, dan kawasan yang sering dipertukarkan secara jelas.

2.1.2 *Pengertian Perencanaan Wilayah*

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak menguras tenaga dan fikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya.

Definisi yang sangat sederhana menurut (Tarigan, 2005:1): perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi seperti itu sebetulnya tidak salah, tetapi tidak mampu memberi gambaran atas suatu perencanaan yang rumit dan luas. definisi ini cocok untuk perencanaan sederhana yang tujuannya dapat ditetapkan dengan mudah dan tidak terdapat faktor pembatas yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam definisi lain perencanaan wilayah (Tarigan, 2005:2-3): perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman dalam (Tarigan 2005:4): perencanaan adalah cara berfikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang ingin dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perlu dicatat bahwa definisi Friedman ini terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah negara maju, di mana perencanaan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, hal pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang

bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2.1.3 Urutan Langkah-langkah Dalam Perencanaan Wilayah

Ada penulis yang melihat perencanaan wilayah dari sudut langkah-langkah yang harus terdapat dalam kegiatan perencanaan tersebut. Glasson (dalam Tarigan 2005:7): perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya sebagai berikut. (Tarigan, 2005:7):

1. Gambarkan kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data primer maupun data sekunder.
2. Tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Visi, misi, dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal.
3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
4. Proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat *controllable* (dapat dikendalikan) maupun *non controllable* (di luar jangkauan pengendalian pihak perencana).
5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.
6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia.
7. Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.
8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Menyusun kebijakakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Perlu dicatat bahwa pada langkah mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif di dalamnya dapat berupa kegiatan saja tanpa menyebutkan lokasi, tetapi

bisa juga berupa kegiatan dan lokasinya sekaligus. Apabila pada langkah tersebut telah berisikan alternatif kegiatan dan lokasinya sekaligus, langkah menetapkan lokasi tidak diperlukan lagi. Perlu pula dicatat bahwa langkah-langkah yang disebutkan diatas bisa lebih sederhana apabila permasalahannya sederhana. Akan tetapi, bagi perencanaan yang cukup luas, langkah-langkah diatas barulah merupakan langkah-langkah utama. Artinya, setiap langkah bisa terdiri atas berbagai tindakan kegiatan sehingga merupakan suatu perencanaan tersendiri. Demikian pula urutannya dapat dibolak-balik. Misalnya setelah alternatif di tetapkan, kemudian disusun langkah dan strategi untuk menjalankan alternatif tersebut, diketahui bahwa ada langkah yang tidak dapat dijalankan, terpaksa dicari alternatif lain.

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Wilayah

Tujuan perencanaan wilayah adalah (Tarigan, 2005:10-11): menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut (Tarigan, 2005:10-11):

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan pengguna lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal

bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi harus menjamin keserasian spasial, keselarasan antar sektor, mengoptimasi investasi, terciptanya efisiensi dalam kehidupan, dan menjamin kelestarian lingkungan.

Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran tersebut secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada. Masalah yang rumit adalah bahwa pada lokasi yang direncanakan seringkali telah terisi dengan kegiatan lain. Akibatnya harus dibuatkan pilihan antara memindahkan kegiatan yang terlebih dahulu ada dan menggantinya dengan kegiatan baru, atau apa yang direncanakan harus disesuaikan dengan apa yang telah ada di lapangan. Menetapkan pilihan ini seringkali tidak mudah karena selain masalah perhitungan biaya versus manfaat, juga sering terdapat kepentingan lain yang sulit dikonversi dalam nilai uang, misalnya adat, sejarah, warisan, dan lingkungan.

2.1.5 Jenis-Jenis Perencanaan

Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat dari perbedaan isinya. Ada yang melihat dari sudut visi perencanaan. Ada yang melihat dari perbedaan luas pandang (skop) atas bidang yang direncanakan. Ada yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing institusi yang terlibat. Ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau koordinasi antar berbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antar berbagai unsur yang telah disebutkan. Ada yang mengategorikannya sebagai jenis perencanaan, tetapi ada pula yang mengategorikannya sebagai tipe-tipe perencanaan. Jenis atau tipe perencanaan dapat berbeda di antara satu negara dengan negara lain, juga bahkan di antara satu sektor dengan sektor lain dalam satu negara. Hal ini berarti dalam suatu negara akan ada kombinasi dari berbagai jenis perencanaan tergantung kondisi lingkungan di mana perencanaan itu diterapkan.

Glasson (dalam Tarigan, 2005:14) menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah:

1. *Physical planning and economic planning,*
2. *Allocative and innovative planning,*
3. *Multi or single objective planning,*
4. *Inicative or imperative planning.*

Di Indonesia juga dikenal jenis *top-down and bottom-up planning vertical dan horizontal planning*, dan perencanaan yang *melibatkan masyarakat* secara langsung dan yang *tidak melibatkan masyarakat* sama sekali.

2.1.6 Wilayah Pedesaan dan Perkotaan

A. Wilayah Pedesaan

Menurut Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Jayadinata, 1999:59)

1. perbandingan tanah dengan manusia (*man land ratio*) yang besar;
2. lapangan kerja agraris;
3. hubungan penduduk yang akrab;
4. sifat yang menurut tradisi (*tradional*)

pemerintahan di wilayah pedesaan menurut Undang-undang no. 5, 1979 (berlaku mulai 1 Desember 1979) dilakukan oleh kepala desa yang dipilih rakyat, dan pemerintahan desa itu mempunyai lembaga musyawarah desa (LMD atau rembug desa), jadi mempunyai pemerintahan sendiri atau otonomi.

Desa dan pemerintahan desa seperti itu hanya terdapat di wilayah pedesaan saja, tidak terdapat di wilayah perkotaan karena kelurahan di kota tidak mempunyai lembaga musyawarah desa (LMD).

Wilayah pedesaan, menurut Wibberley, (dalam jayadinata 1999:59) menunjukkan bagian suatu negeri yang memperlihatkan penggunaan tanah yang luas sebagai ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu lampau.

B. Wilayah Perkotaan

Dalam pengertian geografis, kota itu adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah rumahnya berkelompok, kompak, dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. (Jayadinata, 1999:124).

Dalam pengertian hukum di Indonesia terdapat 4 macam kota (1) Kota sebagai ibukota nasional; Jakarta (2) Ibukota Propinsi, ada 27 kota (3) Ibukota kabupaten dan kotamadya (4) Kota administratif (kotatif).

Dalam pengertian teknis, kota itu mempunyai jumlah penduduk tertentu, misalnya, di Indonesia (untuk keperluan statistik) yang disebut kota adalah tempat dengan 20.000 penduduk atau lebih; di Jepang dengan 30.000 penduduk; di Malaysia dengan 5.000 penduduk; di Amerika Serikat dengan 2.500 penduduk.

Dalam pengertian yang lebih umum, kota adalah tempat yang mempunyai prasarana kota, yaitu: bangunan besar-besar, banyak bangunan perkantoran, jalan yang lebar-lebar, pasar yang luas-luas, beserta pertokoannya, jaringan kawat listrik dan jaringan pipa air minum, dan sebagainya.

Menurut Smailes (dalam Jayadinata, 1999:125) keadaan alam tertentu memberi pengaruh baik untuk kedudukan atau suasana (*position* atau *site*) suatu kota pada permulaan perkembangan, dan pada proses perkembangan selanjutnya posisi itu makin menjadi luas. Maka terdapatlah klasifikasi tentang posisi kota, seperti: posisi kota yang disebabkan oleh alur lalu lintas yang bersimpangan, oleh lembah, oleh kondisi sungai yang bersimpangan, oleh pertemuan laut dan sungai (muara), oleh morfologi yang dapat berguna sebagai pelindung (misalnya air sungai/danau, atau pantai yang terjal), perubahan/modifikasi bagi posisi itu. Posisi kota menunjukkan macam dan kualitas tempat, di mana suatu kota berdiri misalnya pada lembah, kaki gunung, pantai, dan pulau. Selain dari itu keadaan morfologi, misalnya pola alur-alur lalu lintas, dapat dengan jelas mempengaruhi situasi (hubungan dengan wilayah yang lebih luas) sehingga suatu tempat dapat menjadi potensi bagi pemusatan penduduk.

2.1.7 Teori Skala Prioritas

Kebanyakan orang gagal dalam mengidentifikasi skala prioritas kebutuhan bagi dirinya sehingga dorongan terhadap kepemilikan akan sesuatu menjadi beban berat hidupnya, dan berdampak secara psikologis dan ekonomis, dan bahkan bisa berkepanjangan tiada habisnya, sehingga manusia menjadi budak dari kebutuhannya.(Anggoro,2005:3)

Satu teori penting dalam psikologi dan ekonomi, terutama dalam manajemen, khususnya, manajemen personalia sumberdaya manusia dan dalam manajemen pemasaran. Teori ini merupakan alat jitu untuk memotivasi orang atau kelompok, karena kebutuhan orang akan sesuatu adalah motivasi orang bekerja untuk mencapainya, dan juga rumus jitu dalam pemasaran, karena momen terbaik memasarkan produk adalah menawarkan produk ketika orang sedang sangat membutuhkannya.

Mengapa kebanyakan orang baru melakukan pendekatan diri kepada Tuhan setelah usianya beranjak menjadi tua dan atau setelah kehidupan ekonominya menjadi mapan? Mengapa justru pendekatan diri kepada Tuhan ini menjadi

kebutuhan terakhir? Faktor apa yang membuat kebutuhan spritual ini ditinggalkan di usia dini.

A. Lima Hirarki Skala Prioritas Kebutuhan

Berikut adalah hirarki peringkat kebutuhan kebanyakan manusia pada umumnya, yang berkembang selaras dengan perkembangan usia dan dengan pencapaian status ekonomi, yang jika disusun bertumpuk, maka akan membentuk piramid, dimana kebutuhan penemuan jati-diri dan pendekatan diri kepada tuhan menjadi puncaknya. Mulai dari bawah ke atas, secara berurutan, skala prioritas kebutuhan manusia adalah sebagai berikut: (Anggoro, 2005 : 8)

1. Kebutuhan Biologis - Fisiologis – Fiskal dan Material, mencakup:
 - a. kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan pokok, kebutuhan mutlak
 - b. kebutuhan usia kanak-kanak
 - c. kebutuhan kelompok ekonomi kelas bawah
 - d. kebutuhan sesaat dan sementara (instant and temporary)

contoh: makan, minum, istirahat, tidur, mandi, pakaian, hiburan, uang, dlsb.
2. Kebutuhan Ekonomis -Finansial dan Intelektual, mencakup:
 - a. kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua, kebutuhan penunjang
 - b. kebutuhan usia remaja
 - c. kebutuhan kelompok ekonomi kelas-bawah-atas dan kelas menengah-bawah
 - d. kebutuhan jangka-pendek (short-term)

contoh: pendidikan, peralatan elektronik, perabotan rumahtangga, kendaraan, rumah, kepemilikan tanah dan rumah atau properti, dlsb.
3. Kebutuhan Logis – Rasional dan Legal, mencakup:
 - a. kebutuhan tertier, kebutuhan ketiga, kebutuhan pendukung
 - b. kebutuhan usia muda
 - c. kebutuhan kelompok ekonomi kelas menengah
 - d. kebutuhan jangka-panjang (long-term)

contoh: pekerjaan, pernikahan, perlindungan, keamanan, keselamatan, kesehatan, olahraga, obat-obatan, tabungan, asuransi, jamsostek, saham perusahaan, legalitas, gelar akademis, lingkup pergaulan, gaya-hidup, dlsb.

4. Kebutuhan Psikologis – Emosional dan Sosial, mencakup:

- a. kebutuhan kuarternner, kebutuhan peringkat keempat, kebutuhan tambahan
- b. kebutuhan usia dewasa
- c. kebutuhan kelompok ekonomi kelas menengah-atas dan kelas-atas
- d. kebutuhan lain-lain.

contoh: prestasi, pretise, status sosial, kedudukan, jabatan, pangkat, martabat, gelar kehormatan, keanggotaan organisasi, peranserta, perhatian, kepedulian, pengakuan, penerimaan, penghargaan, penghormatan, keharmonisan hubungan antar-personal, relasi, rekanan, dukungan sosial, dukungan politik, dlsb.

5. Kebutuhan Egois – Moral Mental dan Emosional, mencakup:

- a. kebutuhan kuinter, kebutuhan peringkat kelima, kebutuhan pilihan
- b. kebutuhan usia tua
- c. kebutuhan kelompok ekonomi kelas-atas
- d. kebutuhan tak-terbatas.

contoh: pencapaian, keberhasilan sukses, kesempurnaan, kebebasan, kegembiraan, kesantiaian, kenyamanan, kenikmatan, ketenangan, kedamaian, privasi, harga-diri, penemuan jati-diri, pengenalan tuhan, dan pendekatan diri kepada tuhan. Formula umum yang berlaku adalah bahwa mayoritas orang pada umumnya tak akan beranjak atau beralih dari suatu tuntutan kebutuhan kepada tuntutan kebutuhan lain sebelum tuntutan yang tengah ada pada dirinya telah berhasil diraih atau dicapainya atau ia menjadi jenuh karena kegagalannya dalam upaya pencapaian tersebut, dimana selama upaya pencapaian ini, semua penawaran akan hal lain tak akan menarik baginya. Sebagai contoh, bagi seorang pemulung yang tinggal di kolong jembatan atau bagi seorang tukang ojeg miskin, kebutuhannya utama baginya adalah makan, minum, istirahat, tidur, mandi, pakaian, hiburan, uang, dan kebutuhan lain yang setara dengan kebutuhan ini. Bagi mereka, penawaran saham di sebuah perusahaan samasekali tidak menarik, dan gaya-hidup atau life-style

seperti yang dianut para eksekutif muda dan para selebritis bukanlah sesuatu yang penting. Kebutuhan akan "harta, tahta, dan wanita" atau "kekayaan, kedudukan, dan perempuan" menjadi sangat dominan di tengah-tengah piramida hirarki kebutuhan ini, tapi menjadi tidak signifikan pada puncak piramida. Urutan skala prioritas kebutuhan ini menjawab pertanyaan mengapa kebutuhan spritual ini ditinggalkan di usia dini. Teori kebutuhan digunakan dalam psikologi dan ekonomi untuk analisa dan sinthesa kebutuhan personel dan konsumen. Terutama dalam manajemen personalia dan manajemen pemasaran dan penjualan. Salah satu rumus jitu pemasaran dan penjualan adalah menawarkan produk ketika orang sedang sangat membutuhkannya. Dengan mengetahui usia dan peringkat kelas ekonomi seseorang, kita dapat mengetahui apa yang tengah menjadi kebutuhannya, dan dengan demikian teori ini dapat digunakan untuk memotivasi orang, agar orang mau melakukan sesuatu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya.

Piramida skala prioritas kebutuhan ini diangkat dan dikembangkan dari the theory of need dan the hierarchy of need, yang semula dikemukakan oleh Abraham H. Maslow (Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. Harper. New York, USA, 1955).

2.2 Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang bersifat padat. (UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Sampah menurut SNI 19-2454-1991 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah umumnya dalam bentuk sisa makanan (sampah dapur), daun-daunan, ranting, pohon, kertas, plastik. Kain bekas, kaleng-kaleng, debu sisa penyapuan, dsb.

Sampah adalah massa heterogen yang merupakan buangan masyarakat urban dan akumulasi buangan pertanian, industrial, dan mineral yang lebih homogen (Tchhoubanoglous, 1993 : 13).

Sampah adalah bahan buangan bukan cairan yang dihasilkan dari aktivitas domestik, komersil, pertanian, pelayanan umum, perindustrian dan sebagainya,

ataupun bahan buangan berasal dari suatu proses alami yang mungkin terjadi. (masduki, tanpa tahun).

Definisi lainnya, Dinas Pekerjaan Umum dalam meteri training proyek PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman) sektor persampahan (1986 : II-I) mengatakan bahwa sampah adalah suatu benda yang saat itu dianggap tidak berguna lagi, kehadirannya tidak diinginkan dan tidak disenangi, harus segera disingkirkan, merupakan benda buangan yang timbul dari lingkungan masyarakat normal, yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar.

2.2.1 Sumber Sampah

Sumber sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti: pasar, rumah tangga, pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah.

Sampah yang dihasilkan manusia sehari-hari kemungkinan mengandung limbah berbahaya, seperti sisa batere, sisa oli/minyak rem mobil, sisa bekas pemusnah nyamuk, sisa biosida, dsb.

Di negara industri jenis sampah atau yang dianggap sejenis sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti : (Tchobanoglous, 1993:20)

- Pemukiman : biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya.
- Daerah komersial : yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya.
- Institusi : yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jenis sampah yang dihasilkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial.

- Konstruksi dan pembongkaran bangunan : meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang dihasilkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain.
- Fasilitas umum : seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang dihasilkan antara lain rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya.
- Pengolah limbah domestik seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air buangan, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya.
- Kawasan industri : jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri, dan sebagainya.
- Pertanian : jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian.

Di Indonesia, penggolongan sampah yang sering digunakan adalah sebagai

(a) sampah organik, atau sampah basah, yang terdiri atas daun –daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah, dan lain sebagainya.

(b) Sampah anorganik, atau sampah kering : yang terdiri atas kaleng, plastik, besi dan logam lainnya, gelas, mika atau bahan-bahan, kadang kertas dimasukan ke dalam kelompok ini. Sedangkan bila dilihat dari sumbernya, maka sampah perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota di Indonesia sering dikategorikan dalam beberapa kelompok yaitu (SK SNI 19-3242-1994):

- Sampah dari Rumah Tinggal : merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga atau sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari kelompok sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton / dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon.
- Sampah dari daerah Komersial : sumber sampah dari kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Khusus dari pasar tradisional, banyak dihasilkan sisa sayur, buah, makanan mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini adalah mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

- Sampah dari perkantoran / Institusi : sumber sampah dari kelompok ini meliputi dari perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga permasyarakatan, dll. Dari sumber ini potensial dihasilkan sampah seperti halnya dari daerah komersial non pasar.
- Sampah dari jalan / Taman dan Tempat Umum : sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dll. Dari daerah ini umumnya dihasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.
- Sampah dari industri dan rumah sakit sejenis sampah kota : kegiatan umum dalam lingkungan industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik, dll. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah, bagaimana agar sampah kota tersebut tidak termasuk dalam sistem pengelolaan sampah kota.

2.2.2 *Komposisi sampah*

Berdasarkan sifat-sifat biologis dan kimianya, sampah padat digolongkan sebagai berikut (Damanhuri, 2005:4) :

- Sampah yang dapat membusuk (garbage), seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, sampah pasar, sampah pertanian, dan lain-lain.
- Sampah yang tidak membusuk (refuse), seperti plastik, kertas, karet, gelas, logam, kaca, dan sebagainya.
- Sampah yang berupa debu dan abu.
- Sampah yang mengandung zat-zat kimia atau zat fisis yang berbahaya. Disamping berasal dari industri atau pabrik-pabrik, sampah jenis ini banyak pula dihasilkan dari kegiatan kota termasuk dari rumah tangga.

Tabel II.1
Komposisi Sampah

No	Kategori sampah	% Berat	% Volume
1	Kertas dan bahan-bahan kertas	32,98	62,61
2	Kayu/produk dari kayu	0,38	0,15
3	Plastik, kulit, dan produk karet	6,84	9,06
4	Kain dan produk tekstil	6,36	5,1
5	Gelas	16,06	5,31
6	Logam	10,74	9,12
7	Bahan batu, pasir	0,26	0,07
8	Sampah organik	26,38	8,58

Sumber : Damanhuri, 2005

Pengertian sampah organik seperti tercantum dalam **Tabel II.1** lebih bersifat untuk mempermudah pengertian umum, untuk menggambarkan komponen sampah yang cepat terdegradasi (cepat membusuk), terutama yang berasal dari sisa makanan. Sampah yang membusuk (*garbage*) adalah sampah yang dengan mudah terdekomposisi karena aktivitas mikroorganisme. Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan, baik dalam pengumpulan, pembuangan, maupun pengangkutanannya. Pembusukan sampah ini dapat menghasilkan yang berbau tidak enak, seperti amoniak dan asam-asam volatil lainnya. Selain itu, dihasilkan pula gas-gas hasil dekomposisi, seperti gas metan dan sejenisnya, yang dapat membahayakan keselamatan bila tidak ditangani secara baik. Penumpukan sampah yang cepat membusuk perlu dihindari. Sampah kelompok ini kadang dikenal sebagai sampah basah, atau juga dikenal sebagai sampah organik. Kelompok inilah yang berpotensi untuk diproses dengan bantuan mikroorganisme, misalnya dalam pengomposan atau gasifikasi, atau cara-cara lain seperti sebagai bahan pakan ternak.

Sampah yang tidak membusuk atau refuse pada umumnya terdiri atas bahan-bahan kertas, logam, plastik, gelas, kaca, dan lain-lain. Refuse sebaiknya didaur ulang, apabila tidak maka diperlukan proses lain untuk memusnahkannya, seperti pembakaran. Namun pembakaran refuse ini juga memerlukan penanganan lebih lanjut, dan berpotensi sebagai sumber pencemaran udara yang bermasalah, khususnya bila mengandung plastik. Kelompok sampah ini dikenal pula sebagai sampah kering, atau sering pula disebut sampah anorganik.

Sampah berbahaya adalah semua sampah yang mengandung bahan beracun bagi manusia, flora, dan fauna. Sampah ini pada umumnya terdiri atas zat kimia organik maupun anorganik seta logam-logam berat, yang kebanyakan merupakan buangan industri. Sampah jenis ini sebaiknya dikelola oleh suatu badan yang berwenang dan dikeluarkan ke lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampah jenis ini tidak dapat dicampurkan dengan sampah kota biasa.

- Komposisi sampah juga dipengaruhi oleh faktor (Damanhuri, 2005:5) :
- Cuaca : di daerah yang kandungan airnya tinggi, kelembaban sampah juga akan cukup tinggi
- Frekuensi pengumpulan : semakin sering sampah dikumpulkan maka semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. Tetapi sampah organik akan berkurang

karena membusuk, dan yang akan terus bertambah adalah kertas dan sampah kering lainnya yang sulit terdegradasi.

- Musim : jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang sedang berlangsung.
- Tingkat sosial ekonomi : Daerah ekonomi tinggi pada umumnya menghasilkan sampah yang terdiri atas bahan kaleng, kertas, dan sebagainya.
- Pendapatan per kapita : masyarakat dari tingkat ekonomi lemah akan menghasilkan total sampah yang lebih sedikit dan homogen
- Kemasan produk : kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan mempengaruhi. Negara maju seperti Amerika tambah banyak yang menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia banyak menggunakan plastik sebagai pengemas.

2.2.3 Timbulan Sampah

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun di masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan merata timbulan sampah akan merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan dan sebagainya. Bagi kota-kota di negara berkembang, dalam hal mengkaji besaran timbulan sampah, agaknya perlu diperhitungkan adanya faktor pendaurulangan sampah mulai dari sumbernya sampai di TPA.

Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara satu negara dengan negara lainnya. Variasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan, antara lain (Damanhuri, 2005:2) :

- Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya.
- Tingkat hidup : makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar timbulan sampahnya.
- Musim : di negara Barat, timbulan sampah akan mencapai angka minimum pada musim panas.
- Cara hidup dan mobilitas penduduk.
- Iklim : di negara Barat, debu hasil pembakaran akan bertambah pada musim dingin.

- Cara penanganan makananya.

Bagi negara berkembang dan beriklim tropis seperti di Indonesia, faktor musim sangat besar pengaruhnya terhadap berat sampah. Dalam hal ini, musim yang dimaksud adalah musim hujan dan kemarau, tetapi dapat juga berarti musim buah-buahan tertentu. Di samping itu, berat sampah juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya lainnya. Oleh karenanya, sebaiknya evaluasi timbulan sampah dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Timbulan sampah dapat diperoleh dengan sampling (estimasi) berdasarkan standar yang sudah tersedia. Timbulan sampah bisa dinyatakan dengan sistem volume atau satuan berat. Jika digunakan satuan volume, derajat pepadatan (densitas sampah) harus dicantumkan. Oleh karena itu, lebih baik digunakan satuan berat karena ketelitiannya lebih tinggi dan tidak perlu memperhatikan derajat pepadatan. Timbulan sampah ini dinyatakan sebagai :

- Satuan berat : kg/orang/m²/hari, kg/bed/hari dan sebagainya
- Satuan volume : L/orang/hari, L/m² hari, L/bed/hari, dan sebagainya

Di Indonesia umumnya menerapkan satuan volume.

Tabel II.2
Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya

No	Sumber sampah	SK SNI S-04-1993-04	
		Volume (Liter)	Berat (Kilogram)
1	Rumah permanen (per orang/ hari)	2,25-2,50	0,35-0,40
2	Rumah non permanen (per orang/ hari)	2,00-2,25	0,30-0,30
3	Rumah semi permanen (per orang/ hari)	1,75-2,00	0,25-0,30
4	Kantor (per pegawai/ hari)	0,50-0,75	0,025-0,1
5	Toko (per petugas/ hari)	2,50-3,00	0,15-0,35
6	Sekolah (per murid/ hari)	0,10-0,15	0,01-0,02
7	Jalan (per meter/ hari)	0,10-0,20	0,02-0,10
8	Hotel (per tempat tidur/ hari)	-	-
9	Pasar (per m ² / hari)	0,20-0,60	0,005-0,025

Sumber : SK SNI S-04-1993-04

Tata cara mengukur timbulan sampah dapat dilihat berdasarkan *SNI 19-3964-1994*. Apabila tidak tersedia data timbulan sampah dari hasil pengukuran, maka untuk mengukur timbulan sampah dapat digunakan angka sebagai berikut :

Satuan timbulan sampah Kota besar = 2 –2,25/liter/orang/hari atau

0,4- 0,5 kg/ orang/hari

Satuan timbulan sampah Kota kecil = 1,5 –2 liter/orang/hari atau
0,3- 0,4 kg/ orang/hari

Satuan timbulan sampah diatas sudah meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang dalam berbagai kegiatan dan berbagai lokasi yaitu rumah, jalan, pasar, hotel, restoran, taman, dan sebagainya.

Pengukuran sampah sebaiknya dilakukan dengan jangka waktu yang lama dan berkesinambungan atau paling sedikit tiga kali musim yang sama, sehingga dapat diketahui fluktuasi besarnya produksi sampah yang mendekati kebenaran. (*Direktorat Penyehatan lingkungan Pemukiman*).

2.3 Pengelolaan sampah

Merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan sampah pada wadah di sumber (penghasil), dikumpulkan menuju penampungan sementara, kemudian diangkut ke tempat pemrosesan dan daur ulang, seperti pengomposan, insinerasi, *landfilling* atau cara lain. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. (Damanhuri, 2005:3-1).

Disamping sebagai bagian dari infrastruktur sebuah kota, pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan salah satu dari sekian banyak upaya dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan kadangkala terjadi penyimpangan dalam cara pengelolaan, sehingga timbul eksek yang justru mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Kelemahan dalam manajemen operasional dan keterbatasan biaya operasional ditambah dengan langkanya tenaga profesional dalam penanganan persampahan merupakan faktor penyebab utama permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional pengelolaan persampahan kota diantaranya: (Damanhuri, 2005:4-1).

- Kapasitas peralatan yang belum memadai.
- Pemeliharaan alat yang kurang.

- Sulitnya pembinaan tenaga pelaksana khususnya tenaga harian lepas.
- Sulit memilih metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah.
- Siklus operasi persampahan tidak lengkap/terputus karena berbedanya penanggung jawab.
- Koordinasi sektoral antar birokrasi pemerintah seringkali lemah.
- Manajemen operasional lebih dititikberatkan pada aspek pelaksana, sedangkan aspek pengendalian lemah.
- Perencanaan operasional seringkali hanya untuk jangka pendek.

Dalam pengelolaan persampahan skala kota yang rumit, terdapat beragam *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Setiap *stakeholders* berperan sesuai dengan posisinya masing-masing. Dalam skala kota, peran Pemerintah Kota dalam mengelola sampah sangatlah penting, dan pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai bentuk pelayanan yang merupakan bagian dari infrastruktur kota tersebut. *Stakeholders* utama yang biasa terdapat dalam pengelolaan sampah di Indonesia antara lain adalah (Damanhuri, 2005:4-1) :

- a. Pengelola kota, yang dapat bertindak sebagai pengelola sampah.
- b. Masyarakat atau institusi penghasil sampah yang menggantungkan penanganan sampahnya pada sistem yang berlaku di sebuah kota.
- c. Institusi non-pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan sampah, termasuk aktivitas daur-ulang, seperti swasta, LSM, pengelola real estate, dsb yang aktivitasnya berkoordinasi dengan pengelola sampah kota.
- d. Masyarakat yang bertindak secara individu dalam penanganan sampah, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, misalnya kelompok pemulung yang memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasil.
- e. Institusi yang tertarik dan peduli terhadap persoalan persampahan.

Berdasarkan hal di atas, pengelolaan sampah di Indonesia khususnya di sebuah kota, mengenal 3 kelompok pengelolaan yaitu (Damanhuri, 2005:4-2) :

- a. Pengelolaan Oleh Swadaya Masyarakat.

Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah ke tempat pengumpulan sampah, atau ke tempat pemrosesan lainnya. Di kota-kota, pengelolaan ini biasanya dilaksanakan oleh RT/RW, dengan kegiatan mengumpulkan sampah dari bak sampah di sumber sampah, misalnya di rumah-rumah, diangkut dengan sarana

yang disiapkan sendiri oleh masyarakat, menuju ke tempat penampungan sementara.

b. Pengelolaan Formal

Pengelolaan biasanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, atau institusi lain termasuk swasta yang ditunjuk oleh kota, urutan pembuangan sampah tahap pertama dilakukan oleh penghasil sampah, dan di daerah pemukiman biasanya dilaksanakan oleh organisasi RT/RW, dimana sampah diangkut dari bak sampah ke TPS. Tahap berikutnya, sampah diangkut ke TPA oleh truk sampah milik pengelola kota atau institusi yang ditunjuk. Biasanya anggaran suatu kota belum mampu menangani seluruh timbulan sampah.

c. Sistem Pengelolaan Informal

Terbentuk karena adanya dorongan kebutuhan untuk pelayanan sebagian masyarakat yang secara tidak sadar ikut berperan serta dalam penanganan sampah kota. Sistem informal memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi berupa kegiatan pemungutan, pemilahan, dan penjualan sampah untuk didaur-ulang. Rangkaian ini melibatkan pemulung, lapak, bandar, dan industri daur-ulang dalam rangkaian sistem perdagangan.

Pengelolaan sampah dari sebuah kota adalah sebuah sistem yang kompleks, dan tidak dapat disejajarkan atau disimplifikasikan begitu saja, misalnya dengan penanganan sampah daerah rural. Keberhasilan upaya-upaya sektor informal saat ini tidak dapat begitu saja diaplikasikan dalam menggantikan sistem formal yang selama ini ada. Dibutuhkan waktu yang lama karena menyangkut juga perubahan perilaku masyarakat serta kemauan semua pihak untuk menerapkannya.

Berdasarkan arus pergerakan sampah sejak dari sumber hingga menuju ke pemrosesan atau pembuangan akhir, penanganan sampah di suatu kota di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kelompok utama tingkat pengelolaan yaitu (Damanhuri, 2005:4-2) :

1. Penanganan sampah dari tingkat sumber : merupakan kegiatan penanganan secara individual yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah dalam area dimana penghasil sampah tersebut berada.
2. Penanganan Tingkat Kawasan : merupakan kegiatan penanganan secara komunal untuk melayani sebagian atau keseluruhan sumber sampah yang ada dalam area dimana pengelola kawasan berada.

3. Penanganan Tingkat Kota : merupakan penanganan sampah yang dilakukan oleh pengelola kebersihan kota, baik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau dilaksanakan oleh institusi lain yang ditunjuk untuk itu, yang bertugas untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah yang ada dalam kota yang menjadi tanggung jawab.

2.3.1 Tingkat Pengelolaan

Berdasarkan arus pergerakan sampah sejak dari sumber hingga menuju pemerosesan atau pembuangan akhir, penanganan sampah di suatu kota di Indonesia dibagi dalam 3 kelompok utama tingkat pengelolaan, yaitu (Damanhuri, 2005:4-2) :

a. Penanganan Tingkat Sumber

Penanganan tingkat sumber merupakan kegiatan penanganan secara individual yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah dalam area dimana sampah tersebut berada. Beberapa ciri penanganan sampah tingkat ini adalah :

- Sangat tergantung pada karakter, kebiasaan dan cara pandang sampah.
- Penghasil sampah pada tingkat ini dapat berbentuk individu atau kelompok individu atau dalam bentuk institusi misalnya kantor, hotel, dsb.
- Kelompok individu dapat berkarakter homogen, seperti dari sebuah rumah tinggal, atau, bersifat heterogen, seperti pejalan kaki di keramaian, pedagang kaki lima di tempat-tempat umum.
- Keberhasilan upaya-upaya dalam penanganan sampah tergantung pada tingkat kesadaran masing-masing individu. Pada level ini peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah sangatlah dominan, sehingga pendekatan penanganan sampah yang berbasiskan masyarakat penghasil sampah merupakan dasar dalam strategi pengelolaan sampah.

b. Penanganan Sampah Tingkat Kawasan

Penanganan sampah tingkat kawasan merupakan kegiatan penanganan secara komunal untuk melayani sebagian atau keseluruhan sumber sampah yang ada dalam area dimana pengelolaan sampah berada. Beberapa ciri penanganan sampah tingkat kawasan :

- Ciri sampah di tingkat ini adalah bersifat heterogen, sampah berasal dari sumber-sumber sampah yang berbeda.

- Dalam level ini akan bertemu dan saling berinteraksi stakeholders yang berasal dari tingkat sumber dengan tingkat kota.
- Keberhasilan upaya dalam penanganan sampah skala ini sangat bergantung pada level kesadaran kelompok pembentuk tingkat kawasan misalnya, RT, RW, Kelurahan, atau lainnya. Oleh karena kelompok ini terdiri dari individu-individu yang mungkin mempunyai pemahaman berbeda tentang persampahan, maka peran organisasi pengelola serta dukungan inisiator dan atau stakeholders penentu lainnya, seperti ketua RT, Ketua RW, Lurah, atau LSM yang mengorganisir pengelolaan sampah pada tingkat ini sangat penting.
- Peran serta masyarakat seperti diharapkan terjadi pada tingkat sumber, pada tingkat kawasan relatif lebih sulit di bangun.
- Disamping itu peran aktif pengelola kota sangat menentukan, agar sistem pengelolaan tingkat kawasan ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan sampah kota secara keseluruhan.

c. Penanganan Sampah Tingkat Kota

Penanganan sampah tingkat kota merupakan penanganan sampah yang dilakukan oleh pengelola kebersihan kota, baik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau dilaksanakan oleh institusi lain yang ditunjuk untuk itu, yang bertugas untuk melayani sebagian atau keseluruhan wilayah yang ada dalam kota menjadi tanggung jawabnya. Beberapa ciri penanganan sampah tingkat kota :

- Pada level ini, pengelolaan sampah diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur perkotaan
- Bila dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, maka bentuk pengelolaan dapat berupa Perusahaan Daerah, Dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPTD) atau sebagai seksi dari sebuah Dinas. Terdapat kemungkinan bahwa pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh pihak luar atau swasta, baik keseluruhan pelayanan, maupun sebagian dari pelayanan, dengan kontrol kualitas pelayanan tetap dibawah kendali Pemerintah Daerah.
- Ciri khas dari level ini adalah bagaimana memperlihatkan agar kota itu terlihat bersih, sehingga area yang merupakan wajah sebuah kota akan lebih diprioritaskan pelayanannya.

2.3.2 Tingkat dan Kualitas Pelayanan

Tingkat pelayanan merupakan tinjauan kemampuan terhadap pengelola kota untuk menyediakan pelayanan kebersihan kepada masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam pengelolaan sampah skala kota, guna menentukan tingkat pelayanan pengelolaan sampah di kota tersebut, digunakan 2 (dua) indikator utama, yaitu (Kimpraswil, 2003) :

1. Persentase jumlah penduduk kota dan sarana lain yang memperoleh pelayanan dari sistem.
2. Persentase timbulan sampah yang dapat dikelola oleh pengelola sampah tingkat kota.

Dalam merancang sistem pengelolaan sampah, maka persentase pelayanan setiap sumber sampah perlu ditentukan, yang berdasarkan atas kondisi saat ini serta kemampuan sistem itu sendiri, misalnya :

- Pelayanan bagi lingkungan pemukiman saat ini baru mencapai 40%. Maka dalam 5 tahun ke depan diproyeksikan menjadi 50%, sedang 10 tahun ke depan diproyeksikan menjadi 75%.
- Pelayanan di daerah jalan protokol, pasar, rumah sakit, hotel, taman kota, perkantoran, dan fasilitas umum misalnya mendapat prioritas utama, dan misalnya ditargetkan menjadi 100%.

Pengertian penduduk kota yang dilayani biasanya tidak terbatas pada pelayanan dimana penduduk tersebut bertempat tinggal, tetapi mencakup pula dimana penduduk itu beraktivitas. Pemahaman lain yang perlu ditekankan adalah, bahwa pelayanan tidak terbatas dalam arti hanya menyingkirkan sampah dari lingkungan sumber sampah, dan keluar dari kota tersebut, tetapi juga mengandung pengertian bahwa pengelolaan sampah mencakup pelayanan agar sampah yang ditangani tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan yang bukan penghasil sampah yang ditangani tersebut.

Kualitas pelayanan meliputi frekuensi pengumpulan/pengangkutan, dukungan dan kondisi prasarana/sarana, serta estetika hasil pelayanan. Frekuensi pengumpulan/pengangkutan akan terkait sistem pelayanan yang ada serta jenis sampah yang akan dikelola. Sampah basah sangat dianjurkan untuk diangkut setiap hari sedangkan sampah kering dapat dilakukan 1 atau 2 kali seminggu.

2.3.3 Daerah Dan Jenis Pelayanan

Daerah pelayanan merupakan daerah yang berada dalam tanggung jawab pengelola sebuah kota, yang dilayani pengelolaan sampahnya, paling tidak sampah didaerah tersebut diangkut menuju pengelolaan atau pemerosesan akhir. Daerah yang tidak dilayani diharapkan menangani sampahnya secara individu, maupun secara komunal. Beberapa pertimbangan yang biasa di Indonesia adalah (Damanhuri, 2005:4-6):

- Daerah dengan kepadatan rendah, dianggap masih memiliki daya dukung lingkungan yang tinggi sehingga dapat menerapkan pola penanganan sampah setempat secara mandiri.
- Daerah dengan tingkat kepadatan di atas 50 jiwa/ha perlu mendapatkan pelayanan persampahan karena penerapan pola penanganan sampah setempat akan berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.
- Prioritas daerah pelayanan dimulai dari daerah pusat kota, daerah komersial, pemukiman dengan kepadatan tinggi, daerah pemukiman baru, kawasan strategis atan kawasan andalan.
- Pengembangan daerah pelayanan diarahkan dengan menerapkan rumah tumbuh yaitu pengembangan ke wilayah yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah yang telah mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan penentuan skala kepentingan daerah pelayanan, frekuensi pelayanan dapat dibagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut (Damanhuri, 2005:4-5) :

Kondisi-1 : wilayah dengan pelayanan intensif, adalah daerah jalan protokol, pusat kota, kawasan pemukiman tidak teratur, dan daerah komersial.

Kondisi-2 : wilayah dengan pelayan menengah adalah kawasan pemukiman teratur.

Kondisi-3 : wilayah dengan pelayanan rendah adalah daerah pinggiran kota.

Kondisi-4 : wilayah tanpa pelayanan, misalnya karena kondisi terlalu jauh, dan belum terjangkau oleh truk pengangkut sampah.

Lebih lanjut, penentuan daerah pelayanan berupa identifikasi masalah dan potensi yang tergambar dalam peta-peta sebagai berikut Damanhuri, 2005:4-5) :

- Peta problem : minimal menggambarkan kerawanan sampah, tingkat kesulitan pelayanan, kerapatan timbulan sampah, tataguna lahan, jumlah penduduk, kepadatan rumah/ bangunan.

- Peta pemecahan masalah : menggambarkan pola yang digunakan, kapasitas perencanaan (meliputi alat dan personel), jenis sarana dan prasarana, potensi pendapatan jasa pelayanan serta rute dan penugasan. Jenis pelayanan pengelola sampah dapat dibagi menjadi,
- Penyapuan jalan.
- Pengumpulan sampah.
- Pengangkutan sampah.
- Penanganan sampah.

Pelayanan sampah pada masyarakat industri bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan kekomplekan itu sendiri. Pengelolaan pada masyarakat industri membutuhkan keterlibatan beragam teknologi dan beragam disiplin ilmu. Termasuk di dalamnya teknologi-teknologi yang terkait dengan bagaimana mengontrol timbulan sampah.

Tabel II.3
Skala Kepentingan Daerah Pelayanan

No	Parameter	Bobot	Nilai	
			Kerawanan Sanitasi	Potensi Ekonomi
1	Fungsi dan nilai daerah :	3	-	-
	a. daerah di jalan protokol/pusat kota	-	3	4
	b. Daerah komersial	-	3	5
	c. Daerah perumahan teratur	-	4	4
	d. Daerah industri	-	2	4
	e. Jalan, taman, dan hutan kota	-	3	1
	f. Daerah perumahan tidak teratur, selokan	-	5	1
2	Kepadatan penduduk :	3	-	-
	a. >50 jiwa/ha (rendah)	-	1	4
	b. > 100 jiwa/ha < 300 jiwa/ha (sedang)	-	3	3
	c. > 300 jiwa/ha (tinggi)	-	5	1
3	Daerah pelayanan :	3	-	-
	a. Yang sudah dilayani	-	5	4
	b. Yang dekat dengan yang sudah dilayani	-	3	3
	c. Yang jauh dari daerah pelayanan	-	1	1
4	kondisi lingkungan :	2	-	-
	a. Baik (sampah dikelola, lingkungan bersih)	-	1	4
	b. sedang (sampah dikelola, lingkungan kotor)	-	2	3
	c. Buruk (sampah tidak dikelola, lingkungan kotor)	-	3	2
	d. Buruk sekali (sampah tidak dikelola,			

No	Parameter	Bobot	Nilai	
			Kerawanan Sanitasi	Potensi Ekonomi
	lingkungan sangat kotor), daerah endemis penyakit menular	-	4	1
5	Tingkatan pendapatan penduduk :	2	-	-
	a. Rendah	-	5	1
	b. sedang (sampah dikelola, lingkungan kotor)	-	3	3
	c. Tinggi	-	1	5
6	Topografi	1	-	-
	a. Datar/rata (kemiringan < 5%	-	2	4
	b. Bergelombang (kemiringan 5-15%)	-	3	3
	c. berbukit/curam (kemiringan > 15 %)	-	3	1

Sumber : Damanhuri, 2005) Keterangan : angka total tertinggi dari skor (bobot nilai) merupakan pelayanan tingkat pertama, angka-angka berikut dibawahnya merupakan pelayanan selanjutnya.

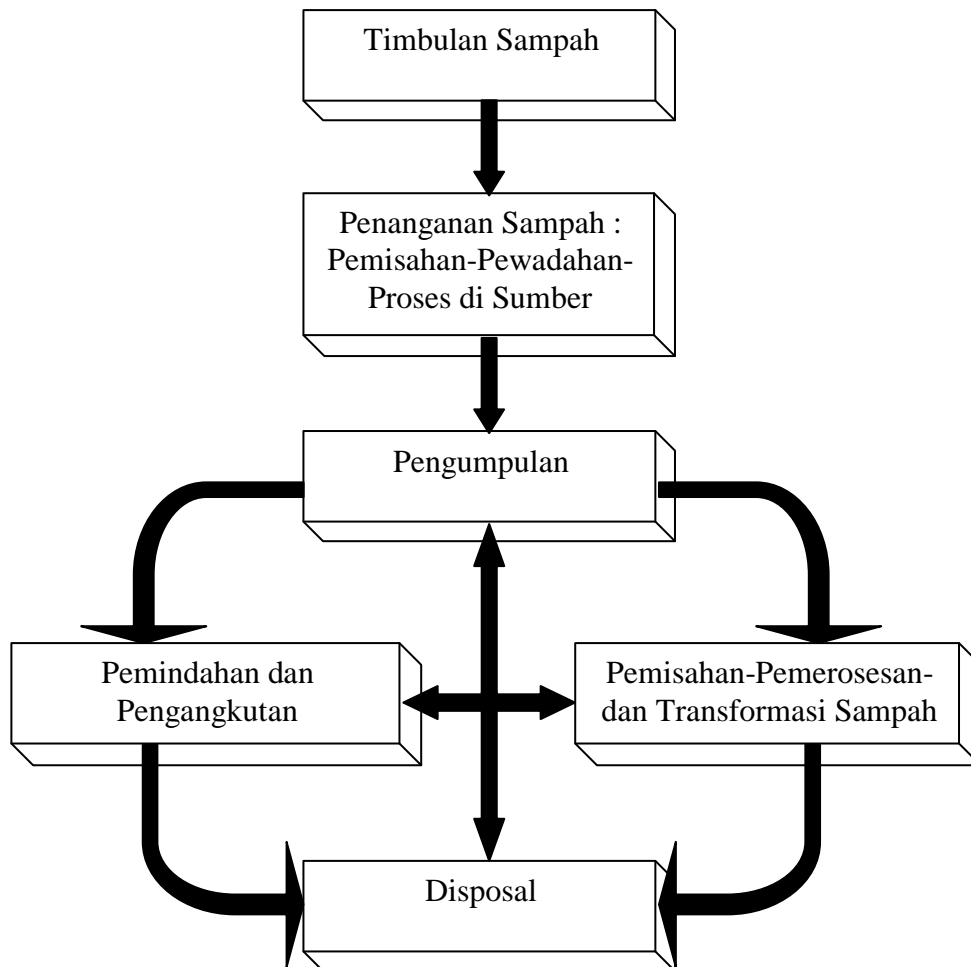
2.3.4 Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Teknik operasoinal Pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan (Tcbanoglous, 1993:15) :

- pewadahan sampah
- pengumpulan sampah
- pemindahan sampah
- pengangkutan sampah
- pengelolaan dan pendaur-ulangan sampah
- pembuangan akhir sampah.

Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas kegiatan pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

Gambar 2.1
Skema teknik operasional Pengelolaan Sampah



catatan :

- pengelolaan sampah B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku.
- Kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan pemindahan.
- Kegiatan pemilahan dan daur ulang diutamakan di sumber.

Beberapa penjelasan umum tentang manajemen teknis operasional ini adalah:

- a. Sub sistem pengumpulan sampah dikenal dengan beberapa pola seperti:
 - Pola individual:
 - Pada pola ini dilakukan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut jarak pendek seperti gerobak atau yang lainnya untuk diangkut ke penampungan sementara. Pola ini dapat dilakukan juga dengan cara

door-to-door menggunakan truk sampah untuk langsung diangkut ke pengolahan/pembuangan sampah.

- Pola komunal:
- Pada pola ini pengumpulan sampah dari beberapa rumah dilakukan pada satu titik pengumpulan, langsung oleh penghasil sampah untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan.

Dalam aspek penyimpanan dan pengumpulan, pendekatan teknologi dan pengetahuan dasar tentang karakteristik masing-masing sangat diperlukan agar tidak menimbulkan permasalahan, baik dari sudut biaya operasi maupun keselamatan kerja dan lingkungan.

- b. Subsistem pemindahan menerima sampah yang berasal dari sumber, untuk kemudian diangkut ke TPA. Dikenal dua pola yaitu sistem yang permanen dan yang dapat diangkut (dipindahkan).

Subsistem pemindahan mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut:

- Sebagai peredam tingkat ketergantungan fase pengumpulan dengan fase pengangkutan
- Pos pengendalian tingkat kebersihan wilayah yang bersangkutan.

- c. Subsistem pengangkutan terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- Pengangkutan dari satu lokasi pemindahan ke TPA
- Pengangkutan dari kelompok pemindahan menuju ke TPA
- Pengangkutan dengan pola door- to-door.

Aspek pengangkutan sampah kadang dilupakan dan akan menjadi permasalahan besar apabila sampah harus diangkut ke luar dari sumber asalnya guna diproses lebih jauh. Hal ini terutama menyangkut pengamanan selama perjalanannya.

- d. Pengelolaan limbah yang sudah terbentuk bukan hanya terbatas pada segi bagaimana mengolahnya dan menyingkirkannya agar tidak mencemari lingkungan. Aspek lain yang perlu diperhatikan, adalah aspek penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutannya. Pengolahan, pendaur ulangan dan atau pemusnahan limbah merupakan inti dalam usaha mengurangi dampak negatif dari limbah yang sudah terbentuk.

2.3.5 Pengumpulan Sampah

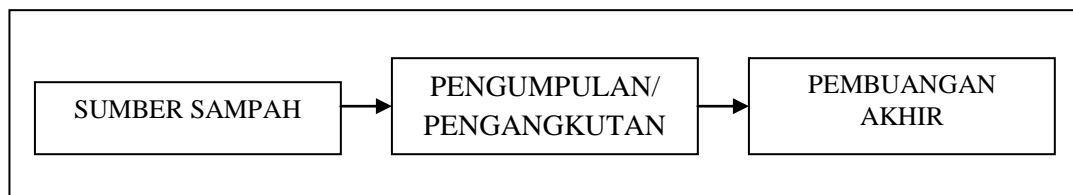
Pengumpulan sampah adalah proses proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat pembuangan sementara atau ke (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan *Transfer Depo/container*) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan penjelasan sebagai berikut (Damanhuri, 2005:6-6):

a. secara Langsung (*door to door*) :

pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir.

Gambar 2.2

Bagan Proses Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah Dengan Sistem Individual Langsung

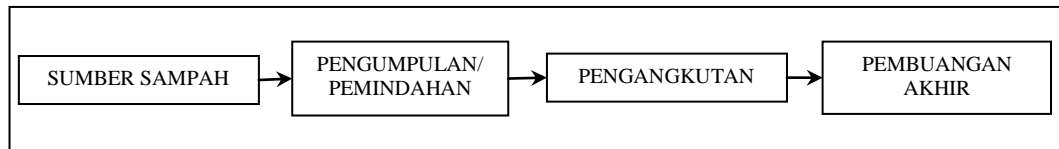


b. Secara tidak langsung (*communal*) :

Pada sistem ini, sebelum diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam gerobak tangan (*hand cart*) dan diangkut ke TPS. Dengan adanya TPS ini maka proses pengumpulan sampah secara tidak langsung TPS ini dapat berfungsi sebagai lokasi pemrosesan skala kawasan guna mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke pemrosesan akhir.

Gambar 2.3

Bagan Proses Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah Dengan Sistem Individual Tidak Langsung



Sumber : Damanhuri, 2005

2.3.6 Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah dapat dilakukan secara fisik, kimia, maupun biologi. Tujuan pengolahan sampah adalah untuk (Tchobanaglou, 1993 : 16):

- Meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah,
- Memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dapat di daur pakai (*reuse*),
- Memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dapat di daur ulang (*recycle*),
- Memperoleh produk hasil konversi (misalnya kompos) dan energi dalam bentuk panas dan biogas.

Pembangunan sistem persampahan yang lengkap dan dikelola secara terpadu, selain memerlukan modal investasi awal yang cukup besar, juga memerlukan kemampuan manajemen operasional yang baik. Untuk mewujudkan maksud tersebut dapat dijalin hubungan kerjasama antar daerah dan atau bermitra usaha dengan sektor swasta yang potensial dan berpengalaman. Kerjasama kemitraan dapat mempercepat proses penyelesaian sarana dan prasarana dengan cakupan pelayanan yang lebih luas dan peningkatan dalam mutu pelayanannya.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan harus sensitif dan akomodatif terhadap aspek komposisi dan karakteristik sampah dan kecenderungan perubahannya di masa yang akan datang. Sistem pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan pergeseran nilai sampah (*waste shifting values*) yang selama ini dianggap sebagai bahan buangan yang tidak bermanfaat, bergeser nilainya menjadi bahan-bahan bernilai bila diolah menjadi kompos dan bahan daur ulang dan daur pakai.

Teknik-teknik pemrosesan dan pengolahan sampah yang secara luas diterapkan di lapangan, khususnya di negara industri antara lain adalah :

- Pemilahan sampah, baik secara manual maupun secara mekanis berdasarkan jenisnya.
- Pemadatan sampah (baling).
- Pemotongan sampah.
- Pengomposan baik dengan cara konvensional maupun dengan rekayasa.

- Pemerosesan sampah sebagai sumber gas-bio.
- Pembakaran dalam sistem insenerator, dengan pilihan pemanfaatan efisiensi panas.

2.3.7 Pembuangan

proses akhir dari rangkaian penanganan sampah yang biasa dijumpai di Indonesia adalah dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada umumnya pemerosesan akhir sampah yang dilaksanakan di TPA adalah proses *landfilling* (pengurugan), dan sebagian besar dilaksanakan dengan *open dumping*, yang mengakibatkan permasalahan lingkungan, seperti timbulnya bau, tercemarnya air tanah, timbulnya asap, dsb. Teknologi *landfilling* membutuhkan lahan luas, karena memiliki kemampuan reduksi volume sampah secara terbatas.

Karena berfungsi sebagai tempat penimbunan, maka kebutuhan luas lahan TPA dirasakan tiap waktu meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan. Sedangkan persoalan yang dihadapi di kota-kota adalah keterbatasan lahan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka diperlukan suatu usaha optimalisasi TPA yang telah ada sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan masa layan TPA (Damanhuri, 2005:9-1).

TPA sampah merupakan langkah akhir dari rangkaian proses penanganan sampah. Dalam pemusnahan ini di kenal berbagai metode, antara lain adalah *landfill*. *Sanitary landfill* adalah metode *landfilling* yang dianggap paling baik. Di Indonesia dikenal terminologi *Controlled Landfill* atau lahan urug terkendali yang merupakan perbaikan/peningkatan dari cara *open dumping*, tetapi belum sebaik *sanitary landfill*. Perbaikan atau peningkatan antara lain dengan kegiatan penutupan sampah. Bila dalam *sanitary landfill* didinginkan adanya penutupan harian, dan *open dumping* urugan sampah sama sekali tidak dilakukan, maka dalam *controlled landfill* penutupan ditunda sampai 5-7 hari.

2.3.8 Daur ulang sampah

Bentuk lain pemanfaatan limbah dalam daur ulang adalah kemungkinannya sebagai sumber energi. Paling tidak terdapat dua bentuk energi hasil daur ulang yang telah biasa dijumpai di lapangan, yaitu: (G. Thchobanaglou; F. Kreith : Hanbook of Solid waste Management dalam E. Damanhuri 2005:5-6)

- sebagai energi panas seperti yang dikeluarkan dari sebuah insenerator dengan bahan bakar limbah bernilai kalor tinggi.
- sebagai energi kimia seperti yang dikeluarkan dari reaktor anaerob atau sebuah landfill limbah organik seperti sampah, yaitu dalam bentuk gas metan. Kemungkinan lain dari pemanfaatan limbah misalnya sebagai sumber protein atau bahan lain, baik dengan rekayasa yang sistematis seperti pembuatan alkohol, maupun sebagai bahan makanan. Sebagai bahan makanan pendekatan ini telah banyak di gunakan di Indonesia, khususnya dari limbah yang berkategori organik, misalnya sebagai pakan ternak atau sebagai cacing.

Banyak kosa kata yang digunakan dalam aplikasi daur ulang ini, seperti *reduce, recovery, reuse, recle, reclamation*. Upaya ini dilapangan dikenal sebagai 3-R atau 4-R dan sebagainya. Dari sebuah literatur, masing-masing kosa kata tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, berikut ini adalah upaya pemanfaatan limbah, dengan penekanan pada (A.F.M. Barton : Resource Recovery and Recyling, john Wiley & Sons, 1979 dalam E. Damanhuri 2005:5-6) :

- Reduce : upaya mengurangi terbentuknya limbah, termasuk penghematan atau pemilihan bahan yang dapat mengurangi kuantitas limbah serta sifat bahaya dari limbah.
- Recovery : upaya untuk memberikan nilai kembali limbah yang terbuang, sehingga bisa dimanfaatkan kembali dalam bentuk, melalui upaya pengumpulan dan pemisahan yang baik.
- Reuse : upaya yang dilakukan bila limbah tersebut dimanfaatkan kembali tanpa mengalami proses atau tanpa transformasi baru, misalnya botol minuman kembali menjadi botol minuman.
- Recycle : misalnya botol minuman dilebur namun tetap dijadikan produk yang berbasis pada gelas. Bisa saja terjadi bahwa kualitas produk yang baru sudah mengalami penurunan dibanding produk asalnya. Kosa kata inilah yang paling sering digunakan. Mungkin kosa kata yang sepadan adalah daur-ulang.
- Reclamation : bila limbah tersebut dikembalikan menjadi bahan baku baru, seolah-olah sumber daya alam yang baru. Limbah tersebut diproses terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi input baru dari suatu kegiatan produksi, dan dihasilkan produk yang mungkin berbeda dibanding produk asalnya.

Semua pihak sepakat bahwa program-program tersebut dinilai bermanfaat, tetapi sampai saat ini upaya-upaya nyata belum terlihat. Perlu kemauan semua pihak, bukan hanya penghasil sampah, tetapi juga *stakeholders* lainnya, termasuk pemerintah untuk secara nyata menerapkan konsep ini. Manfaat dari upaya tersebut dalam jangka panjang antara lain adalah :

- Berkurangnya secara drastis ketergantungan terhadap terhadap pembuangan akhir.
- Lebih meningkatkan efisien dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana persampahan.
- Terciptanya peluang usaha bagi masyarakat dari pengelolaan sampah (usaha daur ulang dan pengomposan).
- Terciptanya jalinan kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan antara pemerintah dan masyarakat/swasta dalam rangka menuju terlaksananya pelayanan sampah yang berkualitas.
- Adanya pemisahan dan pemilahan sampah baik dari sumber timbulan maupun di tempat pembuangan akhir dan adanya pemusatan kegiatan pengelolaan akan lebih menjamin terkendalinya dampak lingkungan yang tidak dikehendaki.

Daur ulang limbah pada dasarnya telah dimulai sejak lama. Di Indonesiapun, khususnya limbah yang bersifat hayati, seperti sisa makanan, daun-daunan dsb. Dalam pengelolaan persampahan di Indonesia, upaya daur ulang memang cukup menonjol, walaupun umumnya baru melibatkan sektor informal.

2.4 Aspek Non-Teknis Dalam Pengelolaan

Keberhasilan pengelolaan persampahan bukan hanya bergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non-teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah. Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 1980-an menggariskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan sistem yang terdiri dari 5 komponen sub sistem (Damanhuri, 2005:10-1) yaitu:

1. Peraturan/hukum
2. Kelembagaan dan organisasi

3. Teknik operasional
4. Pembiayaan
5. Peran serta masyarakat

2.4.1 Aspek Hukum

Peraturan-peraturan yang diperlukan keberadaannya dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan kota antara lain adalah yang mengatur tentang :

1. ketertiban umum, kewajiban melaksanakan pemenuhan sistem pengelolaan sampah dan larangan memperlakukan sampah yang mengakibatkan gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan keselamatan umum yang ditunjukkan kepada setiap pemeran baik perorangan atau badan.
2. Status perencanaan strategis atau master plan atau rencana induk pengelolaan sampah kota untuk menjamin konsistensi kebijakan dan program pengelolaan sampah secara terintegrasi dengan pengelolaan prasarana kota lainnya.
3. Bentuk lembaga dan organisasi pengelola sampah kota.
4. Tatacara penyelenggaraan pengelolaan sampah di perkotaan yang mencakup seluruh lokasi sumber timbulan sampah.
5. Tarif jasa pelayanan kebersihan dengan besaran yang memadai dan fleksibel terhadap perubahan kondisi finansial.
6. Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengolahan dan pembuangan akhir.
7. Kerjasama dan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah.
8. Badan khusus yang berfungsi untuk mengawasi dan memberi sanksi bagi para perusak lingkungan. Disadari bahwa kelemahan yang selalu ada di Indonesia adalah penindakan terhadap pelanggar di bidang pengelolaan sampah, yang kadang terkalahkan dengan pelanggaran ketertiban lainnya seperti becak, PKL, bangunan liar.

2.4.2 Aspek Kelembagaan

Penyelenggara pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah sebagai fungsi pelayanan umum. Pengelola sampah kota diharapkan berbentuk dinas tersendiri dengan mempertimbangkan berbagai hal, sehingga lembaga

pengelola tersebut memiliki kapasitas memadai dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota/Bupati. Pelayanan kebersihan kota, lebih khusus pengelolaan sampah kota, merupakan kewenangan otonomi daerah yang telah diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat ke Daerah melalui PP 14/1987, dan terkait dengan pelaksanaan tugas desentralisasi oleh Dinas Kota/Kabupaten seperti diatur dalam PP/84/2000.

Pengelola sampah kota berbentuk Dinas tersendiri diharapkan akan memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup tugas pelayanan umum pengelolaan sampah kota.
- Pemberian perijinan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup pengelolaan sampah kota.
- pengelolaan dana operasional dan pemeliharaan khusus Dinas Kebersihan.

Dengan bentuk kelembagaan berupa Dinas tersendiri, akan memungkinkan institusi ini memfokuskan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelayanan pengelolaan sampah yang volume dan rutinitasnya tinggi serta perkembangan permasalahan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan sampah kota harus berbentuk Dinas tersendiri dapat dilakukan analisis beban pekerjaan, tugas, dan tanggungjawab pelayanan persampahan dibandingkan dengan Dinas lainnya dalam organisasi Pemerintah Kota/Daerah.

Dinas di tingkat Propinsi dapat saja dibentuk, yang bertugas untuk mengkoordinasikan permasalahan pengelolaan sampah antar daerah seperti halnya mengelola TPA bersama. Institusi ini harus jelas kedudukan dan tugas pokoknya seperti di dalam PP 14/1987. Dinas Propinsi Pengelolaan TPA dapat merupakan salah satu solusi mengatasi kesulitan TPA Pemerintah Kabupaten dan Kota. Alternatif institusi lain selain Dinas adalah misalnya melalui swastanisasi pengelolaan kebersihan, atau dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi kemasyarakatan (LSM).

2.4.3. Retribusi persampahan

Dalam rangka melaksanakan pola pembiayaan *cost recovery*, upaya peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan harus diikuti dengan perbaikan sistem penarikan retribusi. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan tarif dan pola penarikan retribusi. Kedua hal tersebut akan sangat mendukung dalam penyediaan biaya pengelolaan persampahan suatu kota.

Retribusi merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat di dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Retribusi harus disiapkan dengan seksama serta mempunyai landasan yang kokoh, agar masyarakat dapat menerima kenyataan bahwa untuk hidup sehat diperlukan biaya dan masyarakat dapat percaya bahwa uang yang dibayarnya benar-benar digunakan untuk pengelolaan persampahan. Komponen yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan penentuan tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- kebutuhan biaya pengelolaan per tahun
- Tingkat pelayanan/jumlah sampah yang akan dikelola.
- Jumlah timbulan sampah masing-masing sumber.
- Pengelompokkan wajib retribusi.
- Pola subsidi silang.
- Kemampuan Pemda mensubsidi.
- Kemampuan dan Kemauan masyarakat membayar retribusi, khususnya ditinjau dari tingkat penghasilan masyarakat berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah serta urgensi pelayanan yang dituntut oleh masyarakat.

2.4.4 Aspek Peran Serta Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud apabila ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada kebutuhan. Pengertian masyarakat disini dapat diperluas lebih jauh untuk pejabat pemerintah (birokrasi), pengusaha, pedagang, pendidik, dsb.

Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan sosialisasi terhadap peranserta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, yaitu kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa dan terpadu yaitu pengelola dan masyarakat. Sosialisasi ini harus dilakukan dengan secara terus menerus, terarah, terencana, dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Peranserta masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah kota dan bersifat menunjang program pengelolaan sampah kota. Tujuan program peranserta masyarakat adalah :

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya program pengelolaan sampah.
- Memperoleh dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
- Meningkatkan kinerja keseluruhan sistem pengelolaan sampah kota.

Keterlibatan peranserta masyarakat harus bersifat menyeluruh terhadap rangkaian proses implementasi pengelolaan sampah dan juga bersifat terus-menerus. Guna memaksimalkan peranserta masyarakat, maka pedoman yang disiapkan juga harus meliputi program-program peningkatan kesadaran dan pendidikan publik.

2.5. Metode Analisis

2.5.1 Teori Distribusi Frekuensi

Dalam Buku Metoda Statistika, Sudjana (1975:46-47), untuk membuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama, maka hal-hal yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tentukan rentang, ialah data terbesar dikurangi data terkecil.
- b. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas sering biasa diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilah menurut keperluan.

Cara lain dapat menggunakan aturan sturges, yaitu :

$$\text{Banyak kelas} = 1 + (3,3) \log n$$

Dimana n menyatakan banyak data dan hasil akhir dijadikan bilangan bulat.

Untuk contoh kita dengan $n = 15$, maka :

$$\begin{aligned} \text{Banyak kelas} &= 1 + (3,3) \log 15 &= 1 + (3,3) (1,1761) \\ &= 1 + (3,3) (1,1761) &= 4,8811 = 5 \end{aligned}$$

- c. Tentukan panjang kelas interval p . Jika akan dilakukan dengan menggunakan perkiraan, maka ditentukan oleh aturan sebagai berikut :

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

harga p diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan. Jika data berbentuk satuan, ambil harga p teliti sampai satuan. Untuk data hingga satu desimal, p ini juga diambil hingga satu desimal, dan begitu seterusnya.

Untuk contoh kita, maka jika banyak kelas diambil 5, didapat :

$$p = \frac{161}{5} ; \text{ bisa kita ambil } p = 32 \text{ atau } p = 33$$

- a. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini biasa diambil sama dengan data terkecil atau data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya daftar diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung.

Dengan adanya teori distribusi frekuensi tersebut, maka penentuan kategori (kategorisasi) dalam penelitian ini pun dilakukan dengan mengikuti tahapan yang telah dijelaskan di atas.

2.5.2 Teori MCDM

Dalam melakukan pemilihan kecamatan untuk pelaksanaan penelitian “Kajian Wilayah Prioritas Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat” digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dengan membandingkan kondisi kecamatan contoh dengan kondisi yang baik bagi kegiatan pengembangan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Secara kuantitatif dengan menggunakan metode *scoring* dan pembobotan yang merupakan penggabungan berbagai variabel yang terkait. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap beberapa parameter yang telah ditetapkan.

- a. Langkah pertama, data hasil pengamatan yang diperoleh dibandingkan dengan nilai kriteria masing-masing sesuai dengan kecocokan untuk kegiatan pengembangan kecamatan. Nilai hasil pengamatan disesuaikan dengan kriteria kemudian isikan nilai hasil perbandingan antara data hasil survei yang telah

melalui tahap kategorisasi dengan nilai kriteria di kolom nilai Angka pada kolom nilai besarnya disesuaikan dengan nilai pada kriteria, yaitu :

- i). Nilai 1 ; Hasil pengamatan termasuk ke dalam kategori Kecil (K) dengan kriteria pemilihan kecamatan, sehingga memiliki angka rendah.
 - ii). Score 2; Hasil pengamatan termasuk ke dalam kategori Sedang (S) dengan kriteria pemilihan kecamatan, sehingga memiliki angka sedang.
 - iii). Score 3; Hasil pengamatan termasuk ke dalam kategori Tinggi (B) dengan kriteria pemilihan kecamatan, sehingga memiliki angka tinggi.
- b. Langkah kedua, pemberian bobot untuk masing-masing parameter. Adapun penentuan nilainya didasarkan pada hasil analisis hirarki proses (AHP).
- c. Langkah ketiga, adalah perhitungan nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dengan cara mengkalikan nilai *scoring* dengan nilai bobot yang didapat dari hasil *bobot*. Penentuan bobot penilaiannya didasarkan pada metode *scoring* dengan menghitung total sebagai berikut :

$$P_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} W_j \quad \text{untuk } i = 1, 2, 3 \dots m$$

Dimana : a_{ij} = Parameter i dengan kriteria j

W_j = bobot kriteria j

$a_{ij} > 0$

$W_j \geq 0$

2.6. Tinjauan Studi Terdahulu

2.6.1 Ani Priyana, Identifikasi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Di Wilayah Cicurug kabupaten Sukabumi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan, 2004.

Latar Belakang studi ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Partisipasi adalah tindakan seseorang secara sadar dan tanpa suatu paksaan untuk ikut terlibat dalam suatu pekerjaan atau kegiatan yang sudah menjadi suatu paksaan untuk ikut terlibat dalam suatu pekerjaan atau kegiatan yang sudah menjadi suatu kesepakatan bersama. Kesempatan merupakan modal dasar suatu tindakan partisipasi, karena dengan kesepakatan didapatkan penyeragaman langkah dalam melakukan suatu tindakan. Kesepakatan tersebut dapat terjadi pada semua tingkatan

ataupun skala, baik nasional, wilayah/daerah (regional), komunitas antara penyelenggara dan pembangunan, atau antar pelaku yang terlibat dalam pembangunan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Paradigma partisipasi yang melibatkan seluruh pihak (stake-holder) menjadi pemicu bagi upaya memformalkan partisipasi masyarakat di segala aspek pembangunan. Salah satu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah dalam pengelolaan persampahan. Sampah merupakan salah satu akibat negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, dimana benda-benda tersebut kita buang karena tidak akan dimanfaatkan lagi. Namun sering tanpa disadari benda yang dibuang itu sebenarnya masih tetap ada disekitar kita dan sampah hanya berpindah tempat saja. Bila benda yang disebut sampah ini tidak dibuang dengan cara mengangkutnya ketempat yang telah disediakan, maka sampah itu akan menimbulkan gangguan baik pada lingkungan maupun penghasil sampah itu sendiri. Tetapi oleh karena kesibukan dan ketidakmampuan penghasil sampah untuk memindahkannya ketempat pembuangan sebagaimana mestinya, maka diperlukan jasa pihak lain yang secara khusus mempunyai tugas untuk mengangkut sampah. Dari sinilah muncul kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Wilayah Cicurug. Dengan ditemukannya faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen sistem pengelolaan persampahan. Dengan demikian akhirnya diharapkan dapat diciptakan suatu sistem terpadu yang dapat berjalan secara efektif, lancar dan handal.

- a. Kajian pengelolaan persampahan saat ini yang dilakuakn oleh pemerintah dan masyarakat.
- b. Identifikasi variabel-variabel (dihubungkan dengan 5 komponen umum pengelolaan persampahan).
- c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui prosedur analisis faktor.
- d. Hasil akhir penelitian berupa rekomendasi yang didasarkan pada hasil analisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi.

Kesimpulan studi berdasarkan hasil analisis yang digunakan diantaranya yaitu terdapat 8 (delapan) faktor dominan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Faktor ke delapan faktor tersebut yaitu program pemerintah, birokrasi, peraturan, retribusi, kesejahteraan hidup, lama tinggal, tata cara pengelolaan dan jenis kegiatan pengelolaan perasampahan. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam pengelolaan persampahan, maka harus memperhatikan pelaksanaan dan pengelolaan sub sistem-sub sistem utama pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh instansi kebersihan, serta harus melihat kedalam masyarakat itu sendiri, karena faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

2.6.2 Sidik Landobosa, Evaluasi Tingkat Penerimaan (Akseptabilitas) Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Desa Sayang. Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, 2004.

Kawasan Jatinangor cenderung mengarah pada bentuk kawasan perkotaan. Kenyataan ini dapat dilihat melalui perkembangannya yang mencirikan sifat-sifat kekotaan. Berbagai Kriteria yang mendukung pernyataan tersebut (Ahmad Yudi Affandi, 2002) antara lain:

1. Kondisi demografi, terjadinya pemusatan antara pengelompokan penduduk.
2. Arus migrasi, meningkatnya jumlah arus migrasi masuk dan keluar
3. Aktivitas penduduk, kegiatan non pertanian yang semakin mendominasi dibandingkan kegiatan pertanian
4. Fasilitas dan utilitas perkotaan, fungsi dan peranan fasilitas perkotaan yang ada sudah sesuai khususnya untuk fasilitas perdagangan dan kesehatan

Peningkatan perkembangan kota tersebut terjadi terutama sejak dibangunnya kampus perguruan tinggi di Jatinangor (Heppi Theresia, 1998)

Konsekuensi yang dihadapi wilayah ini secara langsung adalah kemampuannya dalam mengakomodasi dan mengendalikan perkembangan tersebut.

Tujuan dan Manfaat Penelitian :

Tujuan studi ini adalah untuk melakukan evaluasi formatif terhadap tingkat penerimaan (akseptabilitas) masyarakat terhadap keberadaan sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun didesa ini berdasarkan indikator-indikator penerimaan.

Manfaat dai penelitian ini antara lain:

- ❖ Memberikan umpan balik antara masukan demi perbaikan sistem bagi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di desa Sayang.
- ❖ Memberikan informasi dan masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan usaha pengelolaan sampah sejenis di tempat lain.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, disimpulkan bahwa seluruh responden cenderung menerima sistem pengolahan sampah terpadu yang dilakukan di desa Sayang. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil penilaian terhadap indikator penerimaan yang telah dibentuk. Kedua jenis penilaian yang dilakukan adalah penilaian terhadap tiap subsistem dan keseluruhan sistem. Kecenderungan penerimaan terhadap tiap subsistem disebabkan oleh penerimaan terhadap sebagian besar indikator utama kecuali indikator penerimaan terhadap pemusnahan residu sampah. Seluruh responden menolak indikator utama ini sehingga menyebabkan penolakan terhadap subsistemnya. Pada dasarnya proses pemusnahan residu sampah yang dilakukan di desa Sayang berbeda dengan konsepsi yang ditawarkan PUSKIM.

2.6.3 Wartini, Studi Pengelolaan Sampah Sistem Komunal Di Permukiman Kota Bandung. Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, 2006.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan aspek-aspek pengelolaan sampah sistem komunal yang telah dilakukan di permukiman kota Bandung.

Adapun sasaran dari penelitian ini meliputi:

- ❖ Mengkaji aspek-aspek pengelolaan sampah secara teoritis
- ❖ Mengkaji pihak-pihak yang terlibat dan bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan sampah sistem komunal.
- ❖ Mengkaji bentuk kelembagaan/organisasi pengelolaan sampah sistem komunal tersebut dalam penentuan jenis pengelolaan dan proses pembiayaannya.
- ❖ Mengkaji sistem pembiayaan pengelolaan sampah sistem komunal tersebut.
- ❖ Mengkaji bentuk peraturan/hukum yang mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah sistem komunal.

- ❖ Mengkaji pelaksanaan aspek teknis operasional pengelolaan sampah sistem komunal, yang meliputi: (1) Sistem pewadahan, (2) Sistem pengumpulan dan (3) Sistem pengolahannya.
- ❖ Mengkaji kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan pengelolaan sampah sistem komunal.
- ❖ Mengkaji manfaat pengelolaan sampah sistem komunal.

Pengelolaan sampah sistem komunal merupakan jenis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat baik ditingkat RT ataupun RW. Pengelolaan tersebut dimaksudkan untuk membantu permasalahan pemerintah karena keterbatasannya dalam memberikan pelayanan persampahan, juga bermanfaat untuk menjaga kebersihan-kebersihanb dilingkungan permukiman.

Metode analisis yang digunakan diantaranya adalah :

- ❖ Perhitungan Timbulan Sampah
 - Perhitungan Penentuan Jumlah Sampel,
 - Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk, dan
 - Perhitungan Jumlah Penduduk
- ❖ Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah
 - Pewadahan,
 - Reduksi Dan Daur Ulang,
 - Pengumpulan,
 - Ritasi Pengumpulan Sampah,
 - Pengangkutan dan Pembuangan Akhir Sampah, dan
 - Penampungan.

Kesimpulan akhir dari studi ini diantaranya :

1. Berdasarkan hasil sampling besarnya timbulan sampah rata-rata untuk setiap harinya adalah sebesar 0,4 Kg/Orang/hari atau 2,37 L/ Orang/hari dengan berat jenis 0,17 Kg
2. Daerah pelayanan dibagi dalam 2 wilayah/ zona untuk lebih memudahkan dalam segi operasional dan kemampuan sarana & prasarana serta pengawasannya.
3. Kebutuhan alat pengangkut/Pick Up untuk operasional pengumpulan sampai dengan akhir periode perencanaan adalah sebanyak 5 unit.

4. Kebutuhan mobil pengangkut sampah ke TPA sampai dengan akhir periode perencanaan adalah sebanyak 4 unit.
5. untuk mencapai tingkat pelayanan 100% maka tarif retribusi ditetapkan Rp.0,- dan untuk menutupi biaya operasional pengelolaan sampah diambil dari hasil penjualan sampah yang diolah dari aktifitas pengelolaan sampah.

Tabel II.4
Matriks Studi Terdahulu

Penulis	Judul	Tujuan	Hasil Studi
Ani Priyana	Identifikasi Faktor-faktor Dominan yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Di wilayah Cicurug Kabupaten Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kajian Pengelolaan persampahan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. ❖ Identifikasi variabel-variabel ❖ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui prosedur analisis faktor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan hasil analisis yang digunakan yaitu terdapat 8 faktor dominan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2. untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam pengelolaan persampahan, maka harus memperhatikan pelaksanaan dan pengelolaan sub-sistem utama pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh instansi kebersihan.
Sidik Landobosa,	Evaluasi Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Desa Sayang.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan umpan balik antara masukan demi perbaikan sistem bagi keterlanjutan sistem pengelolaan sampah di desa sayang. Memberikan informasi dan masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan usaha 	Seluruh masyarakat cenderung menerima sistem pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan di desa sayang. Kecenderungan penerimaan tiap subsistem disebabkan oleh penerimaan terhadap sebagian besar indikator utama kecuali indikator penerimaan terhadap pemusnahan residu sampah.

Penulis	Judul	Tujuan	Hasil Studi
Wartini	Studi Pengelolaan Sampah Sistem Komunal Di Permukiman Kota Bandung.	<p>pengelolaan sampah sejenis di tempat lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengkaji aspek-aspek pengelolaan sampah secara teoritis. ❖ Mengkaji pihak-pihak yang terlibat dan bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan sistem komunal. ❖ Mengkaji pelaksanaan aspek teknis operasional pengelolaan sampah sistem komunal yang meliputi: sistem pewadahan, sistem pengumpulan, dan sistem pengolahannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil sampling besarnya timbulan sampah rata-rata untuk setiap harrinya adalah sebesar 0.4 kg/org/hari atau 2.37 L/orang/hari dengan berat jenis 0.17Kg. 2. Daerah pelayanan dibagi dalam 2 wilayah/zona untuk lebih memudahkan dalam segi operasional dan kemampuan sarana & prasarana serta pengawasannya. 3. Untuk mencapai tingkat pelayanan 100% mak tarif retribusi ditetapkan Rop.0,- dan untuk menutupi biaya operasional pengeloaan sampah diambil dari hasil penjualan sampah yang diolah dari aktifitas pengeloaan sampah.

Bab III Gambaran Umum

3.1 Sejarah dan kondisi Geografis Perkembangan KBB

Wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan wilayah subur dan indah pemandangannya dengan kondisi geografis yang potensial (berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif. Secara geografis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara $107^{\circ} 1,10'$ sampai dengan $107^{\circ} 4,40'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 3,73'$ sampai dengan $7^{\circ} 1,031'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sekitar $1.305,77 \text{ Km}^2$ atau 130.577 Ha (*sumber: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007*). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bandung Barat terletak diantara kabupaten atau kota lain yang relatif telah berkembang yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Kecamatan terluas di kabupaten Bandung Barat ini adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas $160,7962 \text{ km}^2$ atau $16.079,62 \text{ Ha}$ (12,29%) dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngamprah dengan luas $36,0858 \text{ km}^2$ atau 3.608 Ha (2,76%). Secara detail luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Tabel III.1** di bawah ini.

Tabel III.1
Luas Wilayah Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2006

No.	Kecamatan	Luas		Prosentase (%)
		(Km ²)	Ha	
1	Lembang	98,2654	9.826,54	7.44
2	Parongpong	43,3938	4.339,38	3.45
3	Cisarua	55,3641	5.536,41	4.24
4	Cikalongwetan	112,0781	11.207,81	8.68
5	Cipeundeuy	101,2466	10.124,66	7.74
6	Ngamprah**	36,0858	3.608,58	2.76
7	Cipatat	125,4969	12.549,69	9.59
8	Padalarang	51,5763	5.157,63	3.94
9	Batujajar	83,6839	8.368,39	6.40
10	Cihampelas	46,6271	4.662,71	3.57
11	Cililin	81,5452	8.154,52	6.23
12	Cipongkor	76,1465	7.614,65	5.82
13	Rongga	113,1200	11.312,00	8.65
14	Sindangkerta	120,3479	12.034,79	9.20
15	Gununghalu*	160,7962	16.079,62	12.29
Total		1.305,774	130.577,40	100,00

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2007

*Keterangan: * Kecamatan Terluas*

*** Kecamatan Terkecil*

Sejak tahun 1998, sebelum adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, wacana pemekaran Bandung Barat sudah bergulir. Saat itu Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat kepada Bupati Bandung untuk mengkaji rencana pembentukan kabupaten baru. Usulan gubernur waktu itu adalah pembentukan Kabupaten Padalarang yang mencakup Bandung Barat dan Kota Administratif Cimahi.

Lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Pertimbangan dan Proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dan keinginan masyarakat itu dituangkan secara formal dalam surat keputusan DPRD Kabupaten Bandung No.11 tahun 2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Di tingkat Provinsi, lahir Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat No. 135/Kep.DPRD-7/2005 tentang persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian disusul dengan surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri bernomor 135.1/1197/Desen tertanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.

Penetapan Kabupaten Bandung Barat didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007.

3.1.1 Administrasi Pemerintahan dan Batas Wilayah

Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom baru ke-26 di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 ditetapkan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 15 kecamatan yaitu: Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta dan Gununghalu, dengan jumlah desa sebanyak 165 desa. Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Lembang (16 desa), sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Parongpong (7 desa). Secara detail jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Tabel III.2. berdasarkan batas Administrasi wilayah tersebut menunjukkan adanya hubungan antar wilayah denga

kabupaten lain yang berpengaruh terhadap dinamika pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel III.2
Jumlah Desa Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Prosentase (%)
1	Lembang*	16	9.70
2	Parongpong**	7	4.24
3	Cisarua	8	4.85
4	Cikalongwetan	13	7.88
5	Cipeundeuy	12	7.27
6	Ngamprah	11	6.67
7	Cipatat	12	7.27
8	Padalarang	10	6.06
9	Batujajar	13	7.88
10	Cihampelas	10	6.06
11	Cililin	11	6.67
12	Cipongkor	14	8.48
13	Rongga	8	4.85
14	Sindangkerta	11	6.67
15	Gununghalu	9	5.45
TOTAL		165	100

Sumber: Laporan Akhir RTRW 2009 - 2029

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa (Kabupaten Purwakarta); Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Cislak (Kabupaten Subang), dan Kabupaten Sumedang;
- Timur : Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);
- Selatan : Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);
- Barat : Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

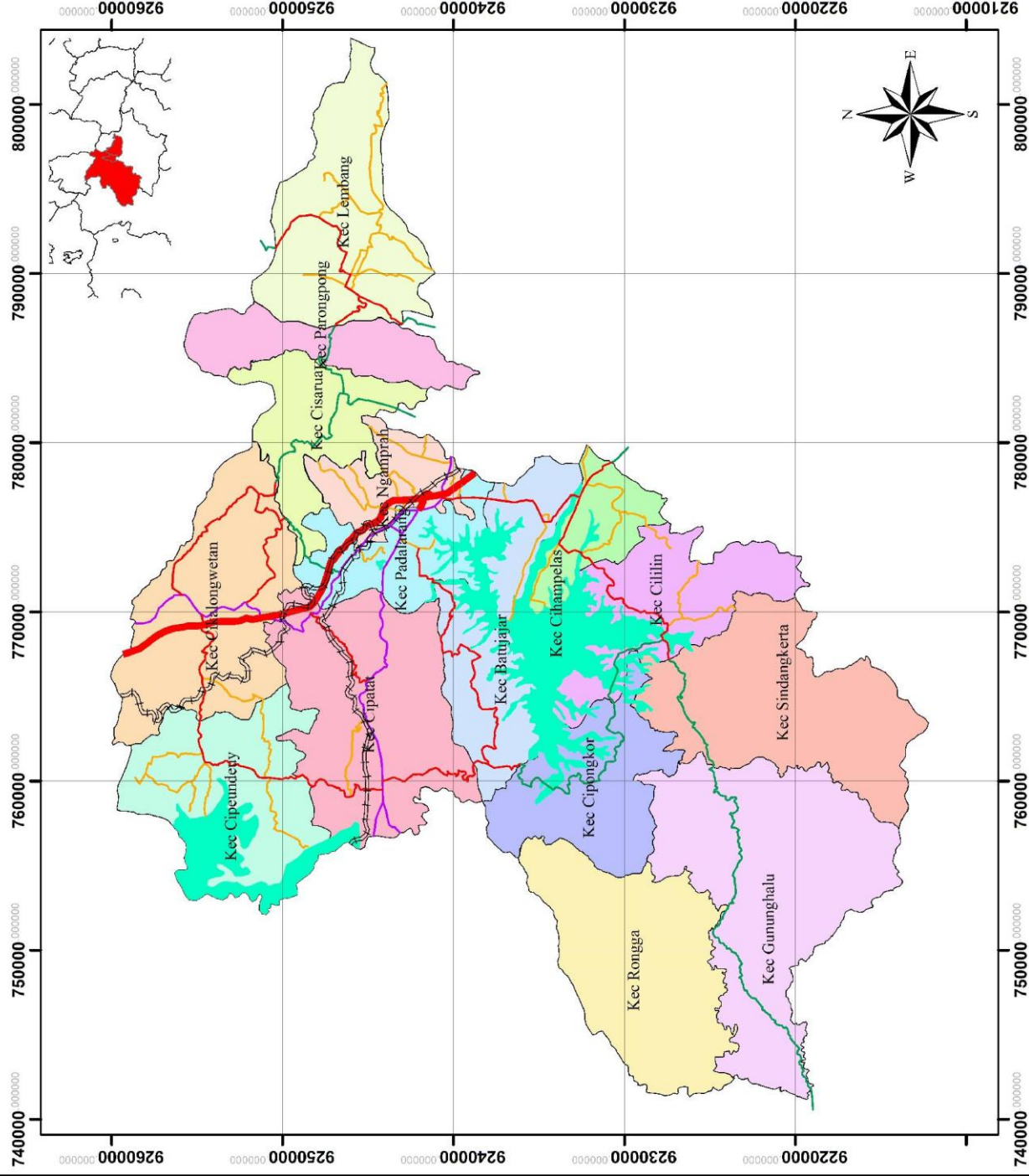
Kajian Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Bandung Barat

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ

Kecamatan

- Kec Batujajar
- Kec Cihampelas
- Kec Cikalongwetan
- Kec Cililin
- Kec Cipatat
- Kec Cipeundeuy
- Kec Cipongkor
- Kec Cisarua
- Kec Gununghalu
- Kec Lembang
- Kec Ngamprah
- Kec Padalarang
- Kec Parongpong
- Kec Rongga
- Kec Sindangkerta



0 4,125 8,250 Meters

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013

3.1.2 Fisik Dasar

a. Klimatologi

Berdasarkan uraian data yang diperoleh, zone agroklimat di Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zone agroklimat B1, B2, dan B3. Zone agroklimat B1, B2 dan B3 mempunyai bulan-bulan basah (>250 mm/bl) selama 7 sampai 9 bulan berturut-turut dan bulan kering kurang (< 100 mm/bl) kurang dari 2 bulan (Zone B1) atau bulan kering antara 2 – 3 bulan (Zone B2) atau bulan kering lebih dari 3 bulan (Zone B3). Berdasarkan kondisi bulan-bulan basah tersebut, maka pada wilayah yang mempunyai zone agroklimat B1, B2 dan B3, peruntukannya bagi sawah tadah hujan bisa dilakukan selama 2 kali tanam dalam setahun.

Berdasarkan data yang diperoleh curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat < 1500 – 3500 mm/tahun. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan kurang dari 1500 mm/tahun adalah wilayah pedataran yaitu sebagian Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 1500-2000 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 2000-2500 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, Sindangkerta. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 2500-3000 mm/tahun sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gununghalu dan Sindangkerta. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan di bagian utara Kabupaten Bandung Barat (3000-3500 mm/tahun) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy.

b. Topografi

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%), di Kecamatan Gununghalu sebagai kecamatan yang mempunyai kemiringan lereng sangat terjal terluas (13.480 Ha). Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas (4.899 Ha). Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.3**

Tabel III.3
Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha)
di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lembang	1.530	-	5.201	-	2.970
2	Parongpong	2.290	-	950	-	1.225
3	Cisarua	530	-	2.292	1.500	1.214
4	Cikalongwetan	550	-	3.400	3.200	4.058
5	Cipeundeuy	2.450	-	3.200	-	4.475
6	Ngamprah	1.160	-	379	1.650	420
7	Cipatat	2.950	710	1.950	-	6.940
8	Padalarang	4.096	202	860	-	-
9	Batujajar	4.899	-	580	-	2.889
10	Cihampelas	2.150	-	-	490	2.701
11	Cililin	1.640	1.140	-	710	3.986
12	Cipongkor	2.210	200	2.050	1.090	2.075
13	Rongga	1.700	-	292	507	8.812
14	Sindangkerta	1.064	600	4.350	425	5.596
15	Gununghalu	320	-	400	1.880	13.480
Total		29.539	2.852	25.904	11.452	60.841

Sumber: - Suseda, BPS Kabupaten Bandung, 2006.

- Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2006

c. Ketinggian

Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 – 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan persentase ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelas mengenai ketinggian di wilayah perencanaan dapat dilihat pada **Tabel III.4**

Tabel III.4
Ketinggian per Kecamatan (Ha) di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	< 500	500-1000	1000-1500	1500-2000
1	2	3	4	5	6
1	Lembang	-	74,46	8.421,87	924,59
2	Parongpong	-	645,94	1.798,51	1.920,89
3	Cisarua	-	751,19	3.470,80	956,18
4	Cikalongwetan	2.439,59	7.914,34	820,58	-
5	Cipeundeuy	7.342,61	-	-	6.678,73
6	Ngamprah	-	3.173,85	431,49	-
7	Cipatat	6.535,30	6.768,53	-	3.801,66
8	Padalarang	-	751,19	-	-
9	Batujajar	-	4.011,49	-	-
10	Cihampelas	-	4.648,59	6,97	-
11	Cililin	-	6.121,86	1.987,14	-

No.	Kecamatan	< 500	500-1000	1000-1500	1500-2000
1	2	3	4	5	6
12	Cipongkor	-	7.238,50	356,34	-
13	Rongga	-	9.791,08	1.489,99	-
14	Sindangkerta	-	4.252,90	5.907,23	1.868,03
15	Gununghalu	-	3.470,23	9.260,21	3.330,80
Total		16.317,50	59.614,15	33.951,13	10.480,39
Persentase (%)		12,61	46,08	26,24	8,10

Sumber: Peta Ikonos Skala 1 : 25.000; BPN Kabupaten Bandung Tahun 2007; Peta RBI Tahun 2006 dan Bappeda Kabupaten Bandung.

d. Morfologi

Morfologi atau bentuk lahan adalah bentuk eksternal permukaan bumi, memiliki susunan bentuk topografi beragam dari datar, berbukit sampai bergunung. Ditinjau secara regional Kabupaten Bandung Barat merupakan dataran tinggi yang dikelilingi perbukitan dan gunungapi Kuarter.

Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Uraian masing-masing morfologi sebagai berikut

Datar (0-8%)

Kemiringan lereng datar (0-8%) secara umum menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kemiringan lereng datar (0-8%) sebagian besar terdapat di bagian tengah Kabupaten Bandung Barat, didasarkan wilayah administratifnya sebagian besar termasuk Kecamatan Batujajar, Padalarang, Cipatat, Cihampelas dan Ngamprah. Apabila dilihat bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Metropolitan Bandung yang juga merupakan Cekungan Bandung, maka lereng datar (0-8%) ini adalah bagian bawah dari sistem Cekungan Bandung. Lereng datar terdapat pula di bagian utara Kabupaten Bandung Barat, meliputi sebagian dari Kecamatan Parongpong dan lembang; di bagian selatan Kabupaten Bandung Barat, mencakup sebagian dari Kecamatan Cipongkor, Rongga,

Cililin dan Sindangkerta; dan dibagian barat Kabupaten Bandung Barat yang meliputi sebagian Kecamatan Cipeundeuy. Luas seluruh daerah dengan lereng 0-8% adalah 29539 Ha atau 22,62% dari seluruh luas Kabupaten Bandung Barat.

Lereng Landai (>8-15%)

Lereng landai (>8-15%) terdapat di Kecamatan Cililin, Cipatat, Sindangkerta, Padalarang dan Cipongkor. Lereng ini umumnya merupakan kaki perbukitan dan pegunungan, terpit oleh lereng datar (<8%) dan agak curam (>15-30%). Luas seluruh daerah dengan lereng landai (>8-15%) adalah 2.852 Ha atau 2,18% dari seluruh luas Kabupaten Bandung Barat.

Lereng Agak Curam (>15-25%)

Di Kabupaten Bandung Barat, lereng agak curam tersebar di tiga belas (13) kecamatan, kecuali Kecamatan Cililin dan Cihampelas. Lereng ini umumnya merupakan tubuh bukit dan gunung. Luas lereng agak curam sekitar 25.904 Ha atau 19,84% dari seluruh Kabupaten Bandung Barat.

Lereng Curam (>25-45%)

Lereng curam (>30-40%) umumnya terdapat di bagian utara (Kecamatan Cikalong Wetan dan Cisarua), selatan (Kecamatan Gununghalu dan Cipongkor), dan tengah (Kecamatan Ngamprah) Kabupaten Bandung Barat, terpit oleh lereng agak curam dan lereng sangat curam atau berada diantara lereng agak curam. Ditinjau dari bentuk lahan (morfologi) lereng curam terdapat pada tubuh perbukitan dan pegunungan. Luas lereng curam sekitar 11.452 Ha atau 8,77% dari seluruh Kabupaten Bandung Barat.

Lereng terjal (>40%)

Lereng terjal (>40%) pada umumnya terdapat di tubuh dan puncak bukit atau gunung, tersebar di selatan, barat, utara, dan timur kecuali di bagian tengah (Kecamatan Padalarang) Kabupaten Bandung Barat. Luas lereng curam (>40%) sekitar 60.841 Ha atau 46,59% dari seluruh Kabupaten Bandung Barat.

3.1.3 Kondisi Kependudukan

Kondisi eksisting kependudukan di wilayah perencanaan yang tersebar di 15 kecamatan, seperti jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah kepala keluarga,

penyebaran penduduk, jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipeluknya, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tenaga kerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai issue permasalahan dari aspek sosial kependudukan di wilayah perencanaan.

A. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Berdasarkan data terakhir tahun 2007, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 1.493.238 jiwa dengan jumlah rumah tangga (kepala keluarga) sebanyak 298.648 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 758.670 jiwa penduduk laki-laki dan 734.568 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 15 kecamatan dan 165 desa di Kabupaten Bandung Barat. Dilihat perkecamatan, kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Lembang dengan jumlah penduduk berjumlah 165.786 jiwa atau sebesar 11,10 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Rongga dengan jumlah penduduknya sebanyak 57.471 jiwa atau hanya sebesar 3,85% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat.

Dilihat dari jumlah rumah tangga, Kecamatan Lembang merupakan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Lembang adalah sebanyak 33.157 kepala keluarga dan Kecamatan yang jumlah rumah tangganya paling sedikit adalah Kecamatan Rongga dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.494 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **tabel III.5**

B. Distribusi Penduduk

Konsentrasi penduduk yang cukup tinggi pada umumnya tersebar di wilayah kecamatan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya berada di wilayah tengah dan utara Kabupaten. Selain itu penyebaran penduduk yang tinggi juga terjadi di wilayah-wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi seperti Ngamprah dan Padalarang. Penyebaran

penduduk yang relatif rendah pada umumnya terdapat di Kecamatan Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, Sindangkerta dan Gununghalu.

Tabel III.5
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007

N0	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (KK)
			(Jiwa)			
			L	P		
1	Lembang	9.826,54	87.511	78.274	165.786	33.157
2	Parongpong	4.339,38	44.642	42.267	86.909	17.382
3	Cisarua	5.536,41	31.957	31.749	63.706	12.741
4	Cikalong Wetan	11.207,81	55.794	55.656	111.450	22.290
5	Cipeundeuy	10.124,66	40.790	41.254	82.044	16.409
6	Ngamprah	3.608,58	68.070	68.530	136.600	27.320
7	Cipatat	12.549,69	60.895	59.387	120.282	24.056
8	Padalarang	5.157,63	78.842	72.894	151.736	30.347
9	Batujajar	8.368,39	55.450	54.001	109.451	21.890
10	Cihampelas	4.662,71	49.084	49.331	98.415	25.677
11	Cililin	8.154,52	45.067	41.293	86.360	17.272
12	Cipongkor	7.614,65	41.415	42.814	84.229	16.846
13	Rongga	11.312	28.516	28.956	57.471	11.494
14	Sindangkerta	12.034,79	33.030	31.477	64.507	12.901
15	Gununghalu	16.079,62	37.607	36.685	74.292	19.678
Jumlah		130.577,4	758.670	734.568	1.493.238	298.648

Sumber: Sumber: Data Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung Barat, Suseda 2007

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh tahun 2007, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 1.493.238 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan dan 165 desa. Dilihat dari penyebaran penduduknya, penduduk di Kabupaten Bandung Barat terbanyak tersebar di Kecamatan Lembang dengan jumlah 165.786 jiwa atau sebesar 11,10%. Penyebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Rongga dengan jumlah 57.471 jiwa atau hanya sebesar 3,85% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya jumlah dan sebaran penduduk di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **tabel III.6**

Tabel III.6
Jumlah dan Sebaran Penduduk
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007

N0	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (%)
1	Lembang	9.826,54	16	165.786	11,10
2	Parongpong	4.339,38	7	86.909	5,82

N0	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (%)
3	Cisarua	5.536,41	8	63.706	4,27
4	Cikalong Wetan	11.207,81	13	111.450	7,46
5	Cipeundeuy	10.124,66	12	82.044	5,49
6	Ngamprah	3.608,58	11	136.600	9,15
7	Cipatat	12.549,69	12	120.282	8,06
8	Padalarang	5.157,63	10	151.736	10,16
9	Batujajar	8.368,39	13	109.451	7,33
10	Cihampelas	4.662,71	10	98.415	6,59
11	Cililin	8.154,52	11	86.360	5,78
12	Cipongkor	7.614,65	14	84.229	5,64
13	Rongga	11.312	8	57.471	3,85
14	Sindangkerta	12.034,79	11	64.507	4,32
15	Gununghalu	16.079,62	9	74.292	4,98
Jumlah		130.577,4	165	1.493.238	100,00

Sumber: Data Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung Barat, Suseda 2007

C. Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di suatu tempat, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor kelahiran, dan faktor kedatangan dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah penduduk di suatu tempat adalah faktor kematian (akibat bencana alam dan peperangan) dan faktor perpindahan.

Berdasarkan data tahun 2003 sampai dengan data tahun 2007, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,58% per tahun. Dilihat per kecamatan jumlah penduduk setiap kecamatan pada umumnya mengalami peningkatan, tetapi untuk Kecamatan Cihampelas pada tahun 2003 jumlah penduduknya dianggap tidak ada. Hal ini dikarenakan pada tahun 2003 Kecamatan Cihampelas belum terbentuk. Kecamatan Cihampelas terbentuk pada tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Cililin.

D. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, dalam hal ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat terhadap luas total setiap kecamatan. Selama tahun 2003-2007 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pula pada peningkatan kepadatan penduduk. Dengan luas 1.305,77 Km² dan jumlah penduduk sebesar 1.493.238 jiwa, kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 1.144 jiwa/Km² pada tahun 2007. Kepadatan

penduduk tiap kecamatan umumnya telah melebihi 450 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ngamprah dengan tingkat kepadatan 3.785 jiwa/km² sementara kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Gununghalu dengan tingkat kepadatan 462 jiwa/km². Karakteristik penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kepadatan dari tahun 2003 sampai 2007 dapat dilihat pada **tabel III.7**

3.1.4 Kondisi Sarana Wilayah

Sarana adalah suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya aktivitas kehidupan yang baik dan berjalannya berbagai aktivitas antar masyarakat. Dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup masyarakat di suatu kota tersebut. Semakin lengkap dan memadai tingkat pelayanan sarana dari segi kuantitas maka kebutuhan akan sarana oleh masyarakat semakin memadai/baik

Sarana Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar juga mempunyai fungsi yang strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, pembinaan generasi muda, tempat persemaian budaya, pengejawantahan jati, dan diri barang modal (capital goods). Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni. Perumahan dan permukiman perlu menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya.

Tabel III.8
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2003-2007 Di Kabupaten Bandung Barat

N0	Kecamatan	Tahun 2003			Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007	
		Luas	Penduduk	Kepadatan	Penduduk	Kepadatan	Penduduk	Kepadatan	Penduduk	Kepadatan	Penduduk	Kepadatan
		(Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)
1	Lembang	9826,54	147986	15	152120	15	156607	16	161205	16	165786	17
2	Parongpong	4339,38	78648	18	81010	19	82310	19	84608	19	86909	20
3	Cisarua	5536,41	57486	10	59220	11	60396	11	62212	11	63706	12
4	Cikalong Wetan	11207,81	99853	9	102744	9	105733	9	108824	10	111450	10
5	Cipeundeuy	10124,66	70016	7	72267	7	75052	7	77206	8	82044	8
6	Ngamprah	3608,58	122046	34	124360	34	129290	36	133114	37	133.054	37
7	Cipatat	12549,69	108553	9	111440	9	114217	9	117538	9	120282	10
8	Padalarang	5157,63	135452	26	139289	27	144064	28	148350	29	151736	29
9	Batujajar	9826,54	100012	10	101993	10	103707	11	106724	11	109451	11
10	Cihampelas	4.662,71	0	0	91519	20	95064	20	97663	21	98415	21
11	Cililin	8154,52	165611	20	79469	10	82260	10	84792	10	86.360	11
12	Cipongkor	8368,39	76013	9	77883	9	79812	10	82160	10	84229	10
13	Rongga	7614,65	50445	7	52332	7	54366	7	55854	7	57471	8
14	Sindangkerta	12.034,79	58116	5	59850	5	61124	5	62946	5	64507	5
15	Gununghalu	11312	66098	6	68133	6	70434	6	72428	6	74292	7
Jumlah		130577,4	1336335	10	1373629	11	1416441	11	1455624	11	1493238	11

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka, Tahun 2003-2006
Data Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung Barat, Suseda 2007
Hasil Analisis, 2008

Guna lahan untuk kegiatan perumahan dan permukiman termasuk penggunaan yang paling dominan dalam pemanfaatan lahan terbangun. Menurut sifat kegiatannya, perumahan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

Perumahan yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang lazim disebut perkampungan.

Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara massal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan fasilitas sosial yang umumnya disebut kompleks perumahan.

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus merapat, sedangkan di lokasi-lokasi lainnya yang relatif jauh dari pusat kota pada umumnya mempunyai pola cluster, sedangkan kompleks perumahan pada umumnya pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan.

A. Jumlah Perumahan

Perumahan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat pada umumnya adalah perumahan yang dibangun secara massal oleh perusahaan atau lembaga pengembang (pihak swasta) yang sering disebut dengan developer. Jumlah sarana perumahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 82 perumahan yang hanya tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan total jumlah rumah 13.858 unit rumah. Dilihat dari jumlah perumahan, perumahan paling banyak terdapat di Kecamatan Batujajar dengan jumlah perumahan sebanyak 37 lokasi perumahan. Namun, bila dilihat dari banyaknya jumlah unit rumahnya (bangunan rumah), Kecamatan Ngamprah merupakan kecamatan dengan jumlah unit rumah terbanyak yaitu berjumlah 5.029 unit rumah dengan jumlah perumahan 9 (sembilan) perumahan. Berdasarkan data tahun 2006 belum semua kecamatan di Kabupaten Bandung Barat memiliki sarana perumahan. Kecamatan yang belum memiliki sarana perumahan yaitu Kecamatan Cihampelas, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor, Cisarua dan Cipeundeuy. Untuk lebih jelasnya jumlah perumahan dan persebarannya di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **tabel III.9**

Tabel III.9
Jumlah Perumahan Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2006

No	Kecamatan	Perumahan	
		Lokasi Perumahan	Total Unit
1	Lembang	3	353
2	Parongpong	21	3,562
3	Cisarua	0	0
4	Cikalongwetan	3	480
5	Cipeundeuy	0	0
6	Ngamprah	9	5,029
7	Cipatat	2	1,000
8	Padalarang	6	2,900
9	Batujajar	37	500
10	Cihampelas	0	0
11	Cililin	1	34
12	Cipongkor	0	0
13	Rongga	0	0
14	Sindangkerta	0	0
15	Gununghalu	0	0
Jumlah		82	13,858

Sumber: Basis Data Kabupaten Bandung, 2006

B. Permukiman

Permukiman yang dimaksud disini adalah Perumahan yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang lazim disebut perkampungan. Berdasarkan data yang diperoleh kondisi maupun bentuk bangunan rumah di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar tergolong kedalam bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Berdasarkan konstruksi bangunan, jenis konstruksi bangunan rumah penduduk (perkampungan) di wilayah perencanaan Kabupaten Bandung Barat terbagi atas 3 (tiga) jenis konstruksi yaitu rumah berkonstruksi permanen, semi permanen, dan sederhana (non permanen).

Rumah yang dimaksud rumah permanen adalah rumah yang bahan/konstruksi dindingnya terbuat dari batu, rumah semi permanen yang dimaksud adalah rumah yang bahan/konstruksi dindingnya terbuat dari sebagian batu sedangkan rumah sederhana adalah rumah yang bahan/konstruksinya terbuat dari kayu, papan ataupun bambu, panggung dan tidak layak huni. Sifat ketradisional dalam mendirikan rumah juga masih menjadi dasar dalam pembangunan rumah di Kabupaten Bandung Barat yang berbentuk rumah panggung, dan rumah jenis ini tersebar disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data yang diperoleh,

di Kabupaten Bandung Barat terdapat rumah tak layak huni yang tersebar di 13 (tigabelas) kecamatan dengan jumlah rumah keseluruhan 12.663 unit rumah.

C. Pola Penggunaan Lahan

Gambaran umum kondisi penggunaan lahan Kabupaten Bandung Barat meliputi distribusi penggunaan lahan, kondisi penggunaan lahan menurut jenisnya, kondisi penggunaan lahan kawasan terbangun, penggunaan lahan kawasan non terbangun, dan penggunaan lahan menurut fungsinya.

a. Distribusi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya.

Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti sungai, jalan). Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, yang mana dalam struktur wilayah pengembangan Jawa Barat berfungsi sebagai *hinterland* dari kabupaten Bandung. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat sangat sederhana, hal ini ditunjukkan dari penggunaan lahan, sebagai berikut (**Tabel III.10**)

1. Kawasan lindung (hutan, belukar, semak, waduk, rawa dan sungai)
2. Kawasan budidaya, terbagi menjadi dua bagian yaitu :
 - Kawasan budidaya pertanian (kebun campur, sawah, sawah tadah hujan, perkebunan/kebun, dan tegal/ladang);
 - kawasan budidaya non pertanian (permukiman, industri, intitusi, pasar/pertokoan, jalan, jalan kereta api, lapangan, taman, dan tambang);
3. Kawasan lain-lainnya (tanah kosong dan rumput)

Berdasarkan data penggunaan tanah di kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 luas pemanfaatan ruang sebagai kawasan terbangun sudah mencapai 25.812,82 Ha atau 19,73%. Pada penggunaan lahan keseluruhan di Kabupaten Bandung Barat,

kawasan terbangun terbagi menjadi beberapa bagian-bagian, antara lain: permukiman, jasa perdagangan, industri, pasar, lapangan bola, terminal, taman, fasilitas umum dan tambang.

1. Permukiman

Permukiman di Kabupaten Bandung Barat memiliki luas 20.260,16 Ha atau sebanyak 15,49% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat, perumahan ini dibedakan atas 2 macam utama, yaitu permukiman (perumahan) yang dibangun oleh pengembang (*developer*) dan permukiman (kampung) yang dibangun secara individu oleh masyarakat.

Tabel III.10
Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat (dalam Ha)
Tahun 2007

No	JENIS GUNA LAHAN	Total Luas (Ha)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
A	KAWASAN LINDUNG		
	1 kawasan lindung	19,171.04	14.65
	JUMLAH A	19,171.04	14.65
B	KAWASAN BUDIDAYA		
	Kawasan Budidaya		
	1 Pertanian		
	a. Kebun Campur	8,758.76	6.70
	b. Perkebunan/kebun	9,562.95	7.31
	c. Sawah	16,309.44	12.47
	Sawah Tadah		
	d. Hujan	19,342.69	14.79
	e. Tegal/Ladang	24,472.31	18.71
	JUMLAH B1	78,446.16	59.96
	Budidaya Non		
	2 Pertanian		
	a. Industri	2,270.73	1.74
	b. Institusi	251.94	0.19
	c. Jalan	2,000.00	1.53
	f. Jalan kereta api	52.76	0.04
	g. Pasar / pertokoan	776.79	0.59
	h. Permukiman	20,260.16	15.49
	i. Lapangan	50.02	0.04
	j. Taman	35.11	0.03
	k. Tambang	114.31	0.09
	JUMLAH B2	25,812.82	19.73
	JUMLAH B	104,256.98	79.69
C	LAINNYA		
	1 Tanah Kosong	3,702.29	2.83

No	JENIS GUNA LAHAN	Total Luas (Ha)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
	2 Rumput	3,689.94	2.82
JUMLAH C		7,391.54	5.65
JUMLAH TOTAL A,B,C		130,821.73	100.00

Sumber: Laporan Akhir RTRW 2009-2029

2. Permukiman

Permukiman di Kabupaten Bandung Barat memiliki luas 20.260,16 Ha atau sebanyak 15,49% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat, perumahan ini dibedakan atas 2 macam utama, yaitu permukiman (perumahan) yang dibangun oleh pengembang (*developer*) dan permukiman (kampung) yang dibangun secara individu oleh masyarakat.

3. Industri

Daerah industri memiliki luas 2.270,73 Ha atau 1,74% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Bandung Barat. Penggunaan lahan industri ini adalah untuk industri yang tergolong industri besar yang memang menggunakan lahan secara signifikan, dan industri berat yang sangat membutuhkan konsentrasi penggunaan lahan yang tinggi. Sebenarnya ada juga industri skala menengah dan kecil, namun penggunaan lahannya tidak signifikan dan umumnya terselip di antara penggunaan lahan lainnya, seperti perumahan dan jasa. Penggunaan lahan industri yang diidentifikasi dalam hal ini adalah industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan, seperti yang terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Batujajar, Cipatat dan Cikalong Wetan; sementara di Kecamatan Padalarang pada umumnya adalah industri keras seperti pabrik kertas, dan pengolahan genteng serta industri farmasi.

4. Jasa

Penggunaan lahan jasa/pasar seluas 776,79 Ha atau 0,59%, meliputi kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa yang umumnya berlokasi di pusat-pusat pelayanan permukiman dan di tepi jalan raya utama pada suatu kawasan.

Penggunaan Lahan Menurut Fungsinya

Wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat juga dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan lindung, yang berfungsi untuk melindungi kawasan Kabupaten

Bandung Barat; dan kawasan budidaya, yang berfungsi untuk tempat pembudidayaan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

b. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
2. Kawasan perlindungan setempat Cagar budaya dan kawasan sempadan sungai.

c. Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Pertanian

Berdasarkan data penggunaan tanah di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 luas pemanfaatan ruang sebagai kawasan budidaya pertanian sudah mencapai 78.446,16 Ha atau mencapai 59,96% dari total penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat. Pada penggunaan lahan kawasan budidaya pertanian, kawasan ini terbagi menjadi beberapa bagian-bagian, antara lain: sawah, sawah tadah hujan, tegalan/ladang, kebun campur, dan perkebunan/kebun.

1. Sawah

Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi dua yaitu sawah tadah hujan dan sawah. Total penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Bandung Barat seluas 35.652,43 atau sekitar 27,26% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat. Sawah terluas ada di Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Lembang, sedangkan sawah tadah hujan hanya terdapat pada Kecamatan Cihampelas.

2. Tegalan/Ladang, Kebun Campurdan Perkebunan/Kebun

Termasuk dalam kelompok penggunaan lahan ini adalah tegalan/ladang, kebun campur, perkebunan rakyat dan hutan rakyat, yang merupakan bagian dari pertanian lahan kering. Total luas pertanian lahan kering tersebut adalah 32.793,72 Ha atau 22,72% dari luas wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri atas: kebun campur seluas 8.758,76 Ha, tegalan/ladang seluas 9.562,65 Ha, dan perkebunan/kebun seluas 24.472,31 Ha. Pertanian lahan kering yang diusahakan oleh masyarakat/rakyat ini meliputi perkebunan rakyat dengan tanaman yang paling menonjol adalah kelapa dan sejumlah kecil kopi, teh, cengkeh dan karet. Lahan tegalan, kebun campuran,

perkebunan rakyat dan hutan rakyat ini relatif tersebar, dan Kecamatan Gununghalu merupakan yang terluas.

3.1.5 Kondisi Prasarana Wilayah

A. Sistem Drainase

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan air (*Kamus Tata Ruang, 1997*). Secara umum kondisi drainase yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat kondisinya kurang baik.

Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bandung Barat sangat bervariasi dan sebagian besar masih memanfaatkan sungai yang melintasi daerah permukiman. Prasarana lingkungan saluran drainase di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari: saluran primer (saluran alam seperti sungai yang ada di sekitar kota/pusat-pusat kecamatan); saluran sekunder (saluran buatan berukuran besar, seperti irigasi); saluran tersier dan kuarter (saluran buatan, seperti drainase jalan, permukiman, saluran irigasi cacing, dsb). Saluran drainase sekunder dan tersier pada umumnya sudah mengalami kerusakan, tidak terawat, banyak sampah sehingga air tidak dapat mengalir (tergenang). selain itu terdapat juga beberapa daerah permukiman yang dibangun di atas saluran drainase dan sempadan sungai. Hal ini juga dapat mengakibatkan tidak berfungsinya drainase sebagai penyalur air sehingga pada saat musim hujan air yang tidak tertampung drainase meluap dan menimbulkan banjir. Saluran drainase yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan saluran primer yaitu Sungai Cihideng dan Sungai Susukan Legok yang mengalir diantara Desa Jayagiri Kecamatan Lembang yang juga berkaitan erat dengan saluran drainase air hujan desa Jayagiri, sedangkan saluran drainase sekunder berupa irigasi. Sedangkan saluran drainase tersier Kabupaten Bandung Barat belum disemua lingkungan perumahan ada dan disekitar jalan-jalan yang ada di setiap Kecamatan. Drainase utama (primer) lainnya yang ada Di Kabupaten Bandung Barat adalah Sungai Cisungapan yang mengalir disekitar Desa Lembang, Sungai Cirapuhan yang mengalir Di Sekitar Desa Pagerwangi.

Untuk Saluran drainase sekunder yang ada di Kabupaten Bandung Barat contohnya adalah yang ada Di Kecamatan Cililin, Cikalongwetan dan Kecamatan Lembang. Sementara drainase tersier yang ada di Kabupaten Bandung Barat hanya ada Kecamatan Lembang salah satunya terdapat di Desa Lembang yang dimulai dari

sebelah Selatan Jalan Grand Hotel, jalan Kayuambon dan disebelah barat jalan Cijeruk sampai dengan area Situ Umar dan berakhir di Sungai Cisungapan. Untuk wilayah yang berada di utara Jalan Kayuambon, air hujannya mengarah pada Jalan Maribaya, Jalan Cendana, Jalan Kenanga dan berakhir Di Sungai Legok. Drainase lainnya yang terdapat Di Kecamatan Lembang sebagai drainase tersier berada di sekitar Desa Pagerwangi yang berlokasi di belakang SESKOU sepanjang jalan Desa Pagerwangi dan akan diterima oleh Sungai Cirapuhan.

Di Kota Padalarang sistem drainase pada umumnya mengikuti pola jaringan jalan, dimana arah aliran dari sebelah barat menuju timur mengikuti kemiringan lahan. Sebagian saluran drainase yang ada masih terbuat dari konstruksi tanah, sedangkan saluran dengan konstruksi beton/bata tertutup masih terbatas pada daerah pusat kota terutama sekitar terminal dan pertokoan/pasar. Hanya beberapa jalan utama yang dilengkapi dengan *street inlet*. Pada beberapa ruas jalan saluran drainase kurang terpelihara dan banyak tersumbat oleh sampah yang menimbun di sekitar saluran. Hal ini sangat mengganggu kapasitas dan fungsi saluran di musim hujan.

B. Sistem Prasarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial maupun untuk kebutuhan lainnya terpenuhi melalui beberapa sumber. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh (data tahun 2006) penduduk di Kabupaten Bandung Barat dalam memperoleh air bersih tidak hanya berasal dari satu sumber saja tetapi dari berbagai sumber seperti air bersih yang berasal dari air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Semua sumber air bersih tersebut digunakan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk kebutuhan air minum, masak, mencuci dan mandi. Jika menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM maka kapasitas air bersih tersebut harus dapat/sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar semua masyarakat dapat terlayani. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih perlu dilakukan pembangunan sarana-sarana air bersih. Untuk lebih jelasnya jumlah pengguna air bersih dari setiap sumber air bersih di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Tabel III.11**

Tabel III.11
Jumlah Pengguna Air Bersih Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007

No	Kecamatan	Air Kemasan	Ledeng	Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Aair Sungai	Air Hujan	Lainnya
1.	Lembang	581	26	3.175	6.965	126	30.973	-	-	-	-
2.	Parongpong	1.877	41	4.188	6.917	1.151	7.709	-	-	-	-
3.	Cisarua	392	4.3	196	4.748	162	8.629	196	-	-	-
4.	Cikalongwet	-	33	260	7.250	3.845	16.593	336	-	-	-
5.	Cipeundeuy	-	29	430	12.905	1.402	5.177	430	-	-	-
6.	Ngamprah	1.470	11.	5.119	8.116	756	8.719	-	-	-	-
7.	Cipatat	-	19	928	12.477	6.199	8.784	1.094	-	-	-
8.	Padalarang	526	4.5	7.318	8.274	8.689	8.777	-	-	-	-
9.	Batujajar	1.486	96	1.695	15.620	200	4.295	242	-	-	3.1
10.	Cihampelas	355	64	1.066	15.632	1.422	4.811	-	-	-	-
11.	Cililin	626	58	3.616	5.179	3.948	196	7.655	-	-	-
12.	Cipongkor	-	28	300	352	10.965	1.882	8.243	-	-	-
13.	Rongga	-	21	304	3.229	4.140	1.380	6.309	19	-	-
14.	Sindangkerta	-	1.0	174	3.970	628	1.256	9.633	-	-	-
15.	Gununghalu	-	5.6	132	581	1.428	2.596	10.58	11	3	-
Total		7.313	30.	28.901	112.215	45.061	111.777	44.72	31	3	3.1

Sumber: -Suseda, BPS Kabupaten Bandung, 2006

Untuk air ledeng dilayani oleh PDAM. Cakupan pelayanan air bersih di wilayah perkotaan yang sudah terlayani PDAM, adalah sebagian Kecamatan Padalarang, Batujajar, Ngamprah, Cililin, Cikalongwetan, Lembang, Cisarua, dan Parongpong. Sedangkan cakupan penyediaan air bersih, di wilayah perdesaan adalah sebagian Kecamatan Cipatat, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, Rongga, Cipeundeuy, dan Cihampelas. Untuk wilayah perdesaan, sumber air bersih berasal dari mata air, sumur dangkal dan sumur bor, dengan sistem distribusi menggunakan pompa atau pipa gravitasi. Dari keseluruhan sarana yang digunakan masyarakat dalam penyediaan air bersih adalah dengan sambungan langsung ke rumah, hidran umum atau dengan terminal air. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber air yang dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, baik itu berasal dari air tanah maupun air permukaan. Hal ini dilihat dari banyaknya sungai yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat, terdapatnya 2 (dua) situ dan 2 (dua) waduk yang cukup besar di kabupaten ini. Situ yang terdapat di

kabupaten ini adalah situ Patengan dan Situ Cileunca, sementara waduk yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah Waduk Saguling dan Waduk Cirata. Walaupun secara teoritis potensi air permukaan cukup baik, namun akhir-akhir ini fenomena kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap besarnya ketersediaan air permukaan tersebut. Terjadinya kerusakan daerah tangkapan air (*catchment area*) di berbagai daerah juga layak diwaspadai sebagai ancaman terhadap potensi ketersediaan air di Kabupaten Bandung Barat dan terjadinya hutan gundul yang dapat menyebabkan tidak terserapnya air ke dalam tanah sehingga air hujan yang jatuh hanya lewat saja tanpa terserap dengan baik oleh tanah. Oleh sebab itu perhitungan terhadap kapasitas sumber daya air ini sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan komprehensif sehingga perencanaan pengembangan kapasitas pelayanan penyediaan air bersih nantinya di kemudian hari tetap dapat berjalan tanpa kendala berkurangnya sumber daya air. Berdasarkan data dan perhitungan dapat dibuat suatu neraca air berdasarkan ketersediaan air berbanding kebutuhan konsumsi penduduk.

C. Sistem Prasarana Air Limbah

Air limbah secara umum terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu limbah domestik dan limbah industri. Air limbah domestik atau dari kegiatan rumah tangga ini ada dua macam, pertama adalah air limbah bekas mandi dan cuci, kedua adalah limbah kakus atau *human waste*. Air limbah yang dominan dewasa ini adalah air limbah domestik, yang terdiri atas air limbah bekas cuci dan mandi, serta air limbah *faecal* atau tinja. Untuk air limbah bekas cuci dan mandi akan dibuang/disalurkan ke saluran-saluran yang ada di sekitar perumahan; untuk waktu yang akan datang perlu dikelola agar tidak langsung dialirkan ke saluran alam, tetapi ditampung terlebih dahulu dalam tempat resapan. Sementara untuk limbah *faecal* diterapkan teknologi tangki septik (*septic tank*) secara individual rumah ataupun secara komunal terbatas pada kompleks-kompleks perumahan yang terencana. Pada saat ini Kabupaten Bandung Barat belum memiliki instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT). Besarnya timbulan air limbah bergantung dari banyaknya jumlah penduduk, semakin banyak penduduk semakin besar timbulan air limbah yang dihasilkan. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2007, besarnya timbulan air kotor/limbah yang dihasilkan adalah 35.837.712 liter/org/hari. Asumsi yang dihasilkan untuk menghitung besarnya timbulan air limbah adalah 20% (0,2) dari

air bersih yang dibutuhkan setiap orang. Untuk lebih jelasnya banyaknya air limbah yang dihasilkan oleh penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Tabel III.12**

Tabel III.12
Timbulan Air Limbah Per Kecamatan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Bersih 120ltr/org/hr	Air Kotor 20% Air Bersih
1	Lembang	165786	19894320	3978864
2	Parongpong	86909	10429080	2085816
3	Cisarua	63706	7644720	1528944
4	Cikalongwetan	111450	13374000	2674800
5	Cipeundeuy	82044	9845280	1969056
6	Ngamprah	136600	16392000	3278400
7	Cipatat	120282	14433840	2886768
8	Padalarang	151736	18208320	3641664
9	Batujajar	109451	13134120	2626824
10	Cihampelas	98415	11809800	2361960
11	Cililin	86360	10363200	2072640
12	Cipongkor	84229	10107480	2021496
13	Rongga	57471	6896520	1379304
14	Sindangkerta	64507	7740840	1548168
15	Gununghalu	74292	8915040	1783008
Jumlah		1.493.238	179.188.560	35.837.712

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Ket: Air Kotor/Limbah : 20%/org/hari dari kebutuhan air bersih

Pencemaran yang dihasilkan merupakan efek samping yang tidak diinginkan dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan industri menimbulkan pencemaran udara, badan air, dan timbulnya limbah berbahaya yang mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya bahkan bagi keadaan lingkungan secara global. Air dan udara yang tercemar, tanah yang terkontaminasi, hujan asam dan dampak lingkungan lainnya akan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup berarti akibat dampak terhadap kesehatan dan produktivitas. Dari sisi kualitas air sebagai contoh, telah dihadapkan pada kondisi dimana air sungai sebagai badan air penerima tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya akibat limbah cair yang dibuang ke sungai di mana penduduk domestik dan industri memiliki kontribusi di dalamnya. Oleh karena itu, tantangan bagi pembangunan yang berkelanjutan adalah berusaha menyeimbangkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan industri dengan jumlah zat pencemar di lingkungan

dengan mengurangi intensitas pencemaran akibat kegiatan tersebut. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengimplementasikan suatu sistem penyaluran air limbah yang baik.

Di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2006 total memiliki 155 industri. Perencanaan sistem penyaluran limbah domestik untuk tiap wilayah di Kabupaten Bandung Barat akan sangat spesifik dan berbeda-beda tergantung kepada situasi dan perkembangan dari masing-masing daerah tersebut. Secara umum sistem yang akan digunakan dalam penyaluran air limbah domestik adalah sistem setempat (*on site system*), baik secara individual pada tiap rumah tangga ataupun dengan sistem komunal, seperti jamban umum dan MCK umum. *Off site system* berupa sistem perpipaan air kotor perkotaan, untuk saat ini sudah bisa diterapkan untuk daerah-daerah tertentu yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan, walaupun belum bisa secara luas diterapkan di Kab. Bandung, karena akan butuh biaya yang sangat besar.

Untuk pengembangan sanitasi perkotaan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang mengajak masyarakat agar ikut terlibat dalam mengelola limbah rumah tangga secara berkelompok, antara lain mengenai pembuatan *septic tank*, di samping itu pembuatan jamban-jamban umum khususnya pada lingkungan yang padat, serta pengembangan armada pengolahan lumpur tinja. Untuk pengolahan lumpur tinja di wilayah perencanaan tidak ada akan tetapi di layani oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Bandung Barat. Setelah limbah terkumpul kemudian dialirkan ke suatu instansi pengelolaan air limbah (IPAL).

D. Sistem Persampahan

Sesuai dengan Undang-undang No.18 tahun 2008, yang menyatakan bahwa masalah pengelolaan sanitasi pada umumnya termasuk pengelolaan persampahan pada khususnya, merupakan masalah yang telah dilimpahkan pada Pemerintah Daerah. Sampah merupakan suatu sisa dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penduduk pada suatu wilayah. Sampah tidak dapat dihindarkan dari kegiatan penduduk, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan sampah tersebut dilakukan sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kebersihan. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengumpulan sampah dilakukan langsung oleh penduduk, kemudian sampah tersebut dibakar, ditimbun, atau dibuang langsung ke tempat sampah.
2. Pembuangan sampah dikumpulkan di tempat sampah di pekarangan rumah, lalu diangkut oleh petugas sampah ke TPS. Selanjutnya dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut dan dibuang pada lokasi TPA/TPSA.

Penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

a. Cakupan Pelayanan Sampah dan Timbunan Sampah

Pelayanan kebersihan bidang pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat, sampai saat ini masih belum optimal, dikarenakan belum seluruh wilayah terlayani oleh Dinas Pekerjaan Umum, terutama untuk wilayah perdesaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat baru 5 (lima) kecamatan yang dapat dilayani dengan jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) lk. 243,88 m³ perhari. Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung tahun 2006, jumlah timbulan sampah per hari di Kabupaten Bandung Barat adalah lk. 2,744 m³ perhari. Artinya jumlah sampah yang terangkut ke TPSA di Kabupaten Bandung baru mencapai 8,79%, sisanya dibuang ke sungai, ditimbun atau dibakar oleh masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, wilayah pelayanan kebersihan saat ini yang dapat

dilayani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan jumlah sampah terangkut di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Tabel III.13**

Tabel III. 13
Wilayah pelayanan Kebersihan Di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Terlayani/Tidak Terlayani	Sampah Terangkut m ³
1.	Lembang	√	39.34
2.	Parongpong	√	4.80
3.	Cisarua	x	-
4.	Cikalongwetan	x	-
5.	Cipeundeuy	x	-
6.	Ngamprah	√	47.94
7.	Cipatat	x	-
8.	Padalarang	√	104.06
9.	Batuajar	√	47.74
10.	Cihampelas	x	-
11.	Cililin	x	-
12.	Cipongkor	x	-
13.	Rongga	x	-
14.	Sindangkerta	x	-
15.	Gununghalu	x	-
Jumlah			243.88

(* Keterangan:

√ : terlayani

x : tidak terlayani

Dengan prosentase timbulan sampah tidak terangkut yang jumlahnya masih besar, beban pemerintah didalam mengatasi permasalahan sampah akan sangat berat tanpa dibantu oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk itu, pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mengatasi permasalahan pengolahan sampah. Disamping itu, rekayasa sosial yang mengarah kepada peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah, dengan demikian upaya mengurangi jumlah timbulan sampah yang harus diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan TPA dapat dikurangi di level rumah tangga sebagai unit terkecil di masyarakat. Rekayasa teknologi pengolahan sampah yang aman bagi lingkungan, mampu mengurangi jumlah timbulan sampah TPS dan TPA, perlu dilakukan sehingga kesulitan mencari lahan TPS dan TPA dapat teratasi. Dengan memiliki dua lokasi TPA, yaitu TPA Pasirbuluh di Kecamatan Lembang dengan luas lahan lk. 2,2 ha, dan TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat yang dipakai oleh Kota Bandung dan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat harus

menjaga agar lokasi TPA tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga keberadaan TPA mendapat dukungan dari masyarakat, terutama dari komunitas-komunitas pemerhati lingkungan. Melalui terobosan-terobosan pengelolaan sampah yang baik dan aman terhadap lingkungan, diharapkan dapat memperpanjang usia TPA dan meredam resistensi masyarakat terhadap keberadaan TPA tersebut.

b. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Mengingat sampah merupakan salah satu indikator kesehatan dan kebersihan lingkungan di suatu wilayah maka sampah tersebut dibuang dan diolah sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan membahayakan kehidupan manusia atau penduduk.

Tempat pembuangan akhir adalah untuk tempat terakhir dari pembuangan sampah dan tempat pengelolaan sampah. Syarat-syarat tempat pembuangan akhir diantaranya:

- Mempunyai jarak yang jauh dari sumber-sumber air maksimum 5 km.
- Bebas banjir
- Harus jauh dari permukiman penduduk

Jenis-jenis pengelolaan sampah diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Open dumping* merupakan jenis pengelolaan tahap akhir sampah yang paling sederhana.
- b. *Sistem pengurugan sampah* merupakan jenis pengelolaan tahap akhir sampah dengan cara penimbunan.
- c. *Incinerator* merupakan tempat pembuangan sampah akhir dengan cara dibakar dengan suhu 900-1400 derajat celcius.

Sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar masih berupa sampah domestik. Penghasil sampah didominasi oleh kegiatan rumah tangga. Persampahan domestik dewasa ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode *on-site*, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong di sekitar perumahan, sementara untuk sampah pasar dan sebagian perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA. Untuk jumlah TPS sendiri Kabupaten Bandung Barat memiliki 4 unit TPS

Tempat pembuangan sampah (TPA) di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 2 (dua), yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasirbuluh yang ada di Kecamatan Lembang dan Sarimukti di Kecamatan Cipatat.. Jumlah dan kapasitas TPA tersebut masih belum mampu menampung dan mengelola sampah yang volumenya semakin meningkat. Secara lebih jelas mengenai jumlah dan luas Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2005, dapat dilihat pada **Tabel III.14**

Tabel III.14
Jumlah TPS dan Sarana Sampah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2006

No	Kecamatan	Jenis Pengolahan			
		TPS		TPA	
		Lokasi	Luas (m ²)	Lokasi	Luas (m ²)
1	Cililin	-	-	-	-
2	Cihampelas	-	-	-	-
3	Sindangkerta	-	-	-	-
4	Gununghalu	-	-	-	-
5	Rongga	-	-	-	-
6	Cipongkor	-	-	-	-
7	Batujajar	1	8	-	-
8	Lembang	1	10	1	22.000
9	Parongpong	1	132	-	-
10	Cisarua	-	-	-	-
11	Ngamprah	1	-	-	-
12	Padalarang	1	50	-	-
13	Cipatat	-	-	1	250.000
14	Cipeundeuy	-	-	-	-
15	Cikalongwetan	-	-	-	-
Total		5	200	2	272.000

sumber: UPTD Keberihan Kabupaten Bandung Barat 2008

Kajian
Wilayah Perkotaan Prioritas
Pelayanan Persampahan
Di Kabupaten Bandung Barat

Gambar 3.2
Peta Pelayanan Persampahan
Kabupaten Bandung Barat

- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ

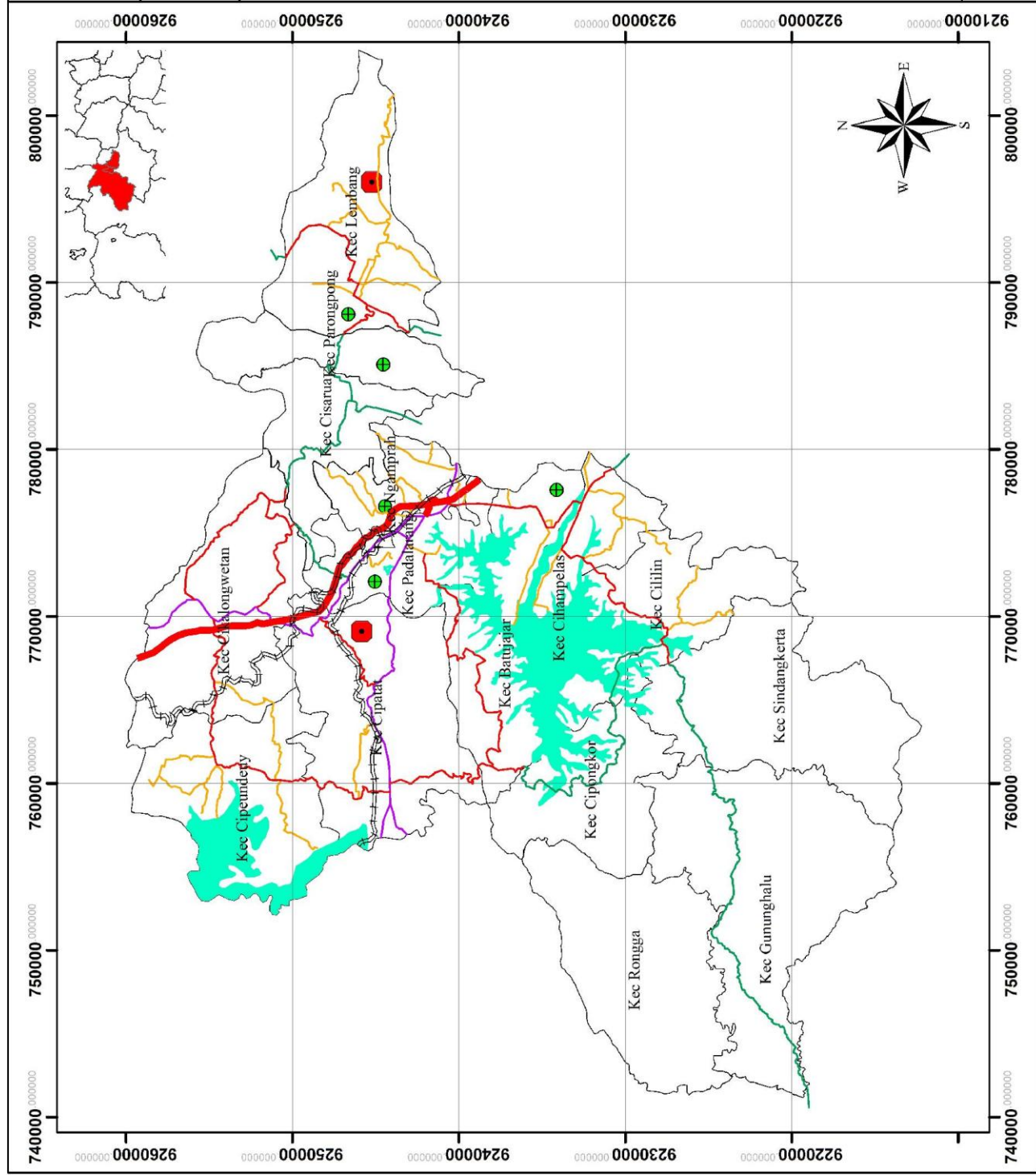
- Pelayanan Persampahan**
- TPA
 - TPS



Sumber :
 RTRW Kabupaten Bandung Barat
 Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS PASUNDAN
 BANDUNG
 2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat

Dalam pengembangan tata ruang Kabupaten Bandung Barat digunakan beberapa konsep pendekatan pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Konsep Pengembangan Agropolitan

Potensi sumberdaya lahan yang besar, memungkinkan Kabupaten Bandung Barat untuk dikembangkan sebagai kota pertanian/*agropolitan* (kecamatan di bagian utara dan selatan) dengan penekanan pada tanaman pangan dan perkebunan serta potensi untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar dan pengembangan budidaya peternakan.

2. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

Saat ini terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah tengah dan selatan.

Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan prasarana sarana dan proporsi kawasan terbangun serta aksesibilitas kawasan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Bandung Barat jangka panjang seharusnya diarahkan untuk *memperkecil ketimpangan antarwilayah* ini dengan upaya-upaya pemerataan pembangunan antar kawasan.

3. Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian

Meskipun sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan yang komparatif, pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat di masa mendatang harus memperhatikan karakteristik dan daya dukung lingkungan dan ekologi. Lahan-lahan pertanian subur khususnya di Wilayah Utara umumnya dicirikan dengan keberadaan jaringan irigasi teknis. Dengan demikian pengembangan kawasan-kawasan lahan kering dan lahan basah sebagai kawasan budidaya pertanian perlu mengembangkan sistem tata air yang baik dengan bahan-bahan yang mengandung mineral yang dibutuhkan tanaman. Disamping itu kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Bandung Barat juga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan tanaman hias serta tanaman obat-obatan.

4. Keterpaduan Antar Moda Transportasi

Wilayah Kabupaten Bandung Barat mempunyai moda transportasi darat. Moda transportasi darat terutama terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Moda transportasi darat yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari angkutan umum (angkot), bis dan kereta api.

3.2.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Tujuan dari Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat adalah mewujudkan Kabupaten sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL;
- b. pengembangan sistem pusat pelayanan yang sesuai dengan dayadukung dan dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya;
- c. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
- d. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya;
- e. penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
- f. mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk;
- g. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung;
- h. pencegahan kerusakan kawasan lindung;
- i. perwujudan keterpaduan kawasan budidaya;
- j. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung;
- k. pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri;
- l. pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan; dan
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

strategi penataan Ruang di Kabupaten Bandung Barat adalah:

- (1) Strategi untuk penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL meliputi:
 - a. meningkatkan peran kabupaten sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional;
 - b. meningkatkan peran PKL perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

- c. meningkatkan peran PKL perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan;
 - d. meningkatkan peran PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi PPK untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. meningkatkan peran PPL sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat pelayanan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk; dan
 - b. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar.
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang di WP Lembang dan WP Padalarang bagian Utara; dan
 - b. memantapkan fungsi PKL, PPK, dan PPL untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

- (5) Strategi untuk penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar Wilayah Pengembangan (WP);
 - b. mengembangkan sistem angkutan umum massal;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap Wilayah Pengembangan (WP);
 - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan; dan
 - f. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya, terutama di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN.
- (6) Strategi untuk mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah;
 - b. mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - c. mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP;
 - d. mencapai fungsi PKL, PPK, dan PPL dalam setiap Wilayah Pengembangan (WP); dan
 - e. meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap Wilayah Pengembangan (WP).
- (7) Strategi untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. merehabilitasi kawasan kritis;
 - b. menghentikan perusakan kawasan hutan; dan
 - c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan, seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh kawasan perkotaan.
- (8) Strategi untuk pencegahan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. melaksanakan sosialisasi rencana kawasan lindung; dan
 - b. mewujudkan penegakan hukum.
- (9) Strategi untuk perwujudan keterpaduan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan wilayah-wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian.
- (10) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. membatasi pengembangan lahan terbangun di kabupaten bagian utara;
 - b. mengatur bentuk permukaan tanah pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mengendalikan air larian dan mencegah erosi;
 - c. mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung; dan
 - d. mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
- (11) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan pusat kegiatan agroindustri berbasis florikultura yang berpusat Lembang; dan
 - b. mengembangkan pusat kegiatan agroindustri berbasis hortikultura yang berpusat Cililin.
- (12) Strategi untuk pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l diwujudkan dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata alam yang terletak di jalur Utara;
 - b. mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur Selatan; dan
 - c. mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur Barat.
- (13) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf m meliputi
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona pengangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

3.2.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupten Bandung Barat ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan Kabupaten Bandung Barat. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban, kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional, serta sebagai penunjang kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat terdiri atas rencana sistem pusat-pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana terkait dengan kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban, kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional, dan sebagai penunjang kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

1. Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat terdiri dari

- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sistem pusat kegiatan dan fungsi pusat kegiatan dan kawasan pengembangan. Rencana sistem kegiatan di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari PKN yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional meliputi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKL yang berfungsi sebagai pengembangan sebagai perdagangan dan jasa, industri perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan terdapat di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang, sedangkan untuk PKLp yang berfungsi pengembangan sebagai kawasan budaya, wisata, perekonomian untuk skala lokal, pendidikan, kesehatan, peribadatan. di Kabupaten Bandung Barat terdapat di Kecamatan Lembang, Kecamatan Cililin, dan Kecamatan Cikalongwetan. Untuk PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian skala lokal di Kabupaten Bandung Barat terdapat di perkotaan Cisarua, perkotaan Batujajar, perkotaan Cipatat, perkotaan Cipeundeuy dan perkotaan Cihampelas.

Rencana pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk PPL terdapat di:

- a. Desa Pasirpogor, Desa Puncaksari, Desa Cikadu, Desa Cintakarya, Desa Cicangkan Girang, dan Desa Sindangkerta berada di Kecamatan Sindangkerta;
- b. Desa Cijenuk, Desa Sarinagen, dan Desa Cijambu berada di Kecamatan Cipongkor;
- c. Desa Sinarjaya, Desa Bunijaya, dan Desa Cilangari berada di Kecamatan Gununghalu;
- d. Desa Cinengah, Desa Cibitung, dan Desa Cibedug berada di Kecamatan Rongga; dan
- e. Desa Cihanjuangrahayu berada di Kecamatan Parongpong; dan
- f. Desa Cipangeran berada di Kecamatan Saguling.

3.2.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Bandung Barat meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat,
- b. sistem jaringan perkeretaapian

sistem jaringan transportasi darat di wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan prasarana angkutan danau/waduk. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari: jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

Jaringan jalan terbagi dalam

- jaringan jalan nasional,
- jaringan jalan provinsi,
- jaringan jalan kabupaten; dan
- dan jaringan jalan desa.

Jaringan jalan nasional meliputi:

- a. pembangunan jalan tol Padalarang-Ciranjang-Sukabumi, pembukaan gerbang tol Warung Domba di Km 106.800 Cikalongwetan dan jalan akses tol ke Ngamprah;
- b. peningkatan dan pengembangan fungsi jalan arteri dan kolektor 1 bukan jalan tol meliputi ruas Citarum - Rajamandala - bts. Kota Padalarang, Eks tol Rajamandala, Jln. Raya Rajamandala;
- c. rencana pembangunan dan peningkatan fungsi ruas jalan menjadi arteri meliputi jalan Cisomang-Batas Kota Padalarang;
- d. pengembangan jaringan jalan primer, berupa pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang; dan
- e. pembangunan jalan layang meliputi:
 - 1. jalan layang tagog di Kecamatan Padalarang; dan
 - 2. jalan layang cimareme di Kecamatan Ngamprah.
- f. pembangunan jalan melintang dibawah jalan lain (Underpass) di Stasiun Padalarang.

Jaringan jalan provinsi di Kabupaten Bandung Barat meliputi:

- a. pemantapan ruas jalan kolektor primer terdiri atas:
 - 1. Jl.Cimareme;
 - 2. Cimareme-Batujajar;
 - 3. Jl. Batujajar;
 - 4. Batujajar (JBT.Batujajar)-Soreang (Sp.Alfathu);
 - 5. Sp.Orion-Cihaliwung;

6. Padalarang-Sp.Cisarua (jalan alternatif Bandung-Lembang);
 7. Bts. Cimahi-Cisarua-Lembang; dan
 8. Jl. Raya Lembang.
- b. peningkatan status dan fungsi jalan kolektor primer berupa rencana peningkatan ruas jalan strategis provinsi (akses Sarimukti), meliputi:
1. Rajamandala-Cipeundeuy; dan
 2. Cipeundeuy-Cikalongwetan.
- c. peningkatan fungsi ruas jalan menjadi kolektor primer 2 (dua) terdiri atas:
1. Selacau-Cililin;
 2. Cililin-Sindangkerta;
 3. Sindangkerta-Celak;
 4. Celak-Gununghalu;
 5. Gununghalu-Bunijaya;
 6. Bunijaya-Cilangari; dan
 7. Cilangari-Cisokan.

3.2.4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Jaringan prasarana energi yang meliputi
 - a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara dan bawah tanah;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan listrik ke desa-desa yang belum teraliri listrik;
 - c. pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada jaringan utama dan kawasan khusus di pusat kota;
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan dengan kapasitas rencana 4 x 260 MW;
 - e. optimalisasi operasional PLTA Saguling dengan kapasitas sebesar 700 MW dan PLTA Cirata dengan kapasitas sebesar 1.000 MW;
 - f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Tangkubanparahu;
 - g. optimalisasi dan pengembangan Jaringan Energi Nasional (Jaringan Transmisi Tenaga Listrik) SUTET 500 KV meliputi:
 1. Kecamatan Cililin;
 2. Kecamatan Cipongkor;
 3. Kecamatan Cipatat;

4. Kecamatan Sindangkerta;
 5. Kecamatan Batujajar;
 6. Kecamatan Cihampelas;
 7. Kecamatan Padalarang;
 8. Kecamatan Ngamprah;
 9. Kecamatan Cikalongwetan; dan
 10. Kecamatan Cipeundeuy.
- h. optimalisasi gardu induk distribusi tenaga listrik di Kecamatan Cipongkor dan Batujajar;
- i. pengembangan gardu induk distribusi tenaga listrik di kawasan yang belum mendapat pelayanan jaringan listrik; dan
- j. pengembangan potensi panas bumi, meliputi:
1. Desa Jayagiri, Desa Cikole, Desa Cikahuripan dan Desa Lembang di Kecamatan Lembang;
 2. Desa Cihanjuang, Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Cihideung dan Desa Karyawangi di Kecamatan Parongpong; dan
 3. Desa Jambudipa, Desa Pasirhalang dan Desa Kertawangi di Kecamatan Cisarua.
2. Sistem jaringan Telekomunikasi meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Telekomunikasi Nasional Serat Optik;
 - b. pengembangan dan peningkatan Sambungan Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel (RK);
 - c. pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel meliputi pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu (Base Transceiver Station/BTS) di seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. pengendalian pembangunan tower BTS dan menerapkan sistem penggunaan tower bersama;
 - e. penyusunan pranata dan perencanaan BTS; dan
 - f. pengembangan teknologi informasi dan mendukung Cyber Province.
3. Sistem jaringan sumber daya air di Kabupten Bandung Barat meliputi:
- a. Wilayah Sungai (WS) Ciujung-Cisadane-Ciliwung-Citarum;
 - b. pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten atau kota meliputi:
 1. Sungai Citarum;

2. Sungai Cidadap;
 3. Sungai Cisokan; dan
 4. Sungai Cimeta.
- c. pengembangan embung di Kecamatan Lembang;
- d. pemeliharaan waduk meliputi:
- a. Waduk Saguling; dan
 - b. Waduk Cirata;
- e. pemeliharaan situ meliputi:
1. Situ Lembang;
 2. Situ Ciburuy; dan
 3. Situ Lembang Dano.
- f. pengembangan sumber air baku untuk PLTA Cisokan; dan
- g. pengembangan sistem pengendalian banjir meliputi:
1. normalisasi sungai;
 2. pengerukan sungai;
 3. optimalisasi waduk Saguling dan Cirata; dan
 4. sumur resapan.

Sistem pengelolaan air baku untuk air minum meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.

Jaringan prasarana wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Jaringan prasarana lingkungan yang didalamnya mencakup pengembangan sistem air minum, pengembangan sistem persampahan, dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.

1. Pengembangan sistem air minum dalam rencana tata ruang Kabupaten Bandung Barat meliputi :
 - pembangunan perpipaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk melayani daerah yang belum terlayani;
 - peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air;
 - perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi;
 - peningkatan cakupan pelayanan sistem distribusi perpipaan di kawasan perkotaan; dan
 - pengembangan sistem jaringan pelayanan lintas wilayah;

- Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan pengembangan air minum;
 - Pengembangan alternatif pembiayaan; dan
 - Peningkatan kapasitas pengelola.
2. Pengembangan sistem persampahan dalam rencana tata ruang Kabupaten Bandung Barat meliputi:
- pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau penyediaan kontainer di setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga.
 - optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Sarimukti;
 - pengembangan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah terpadu melalui integrasi 3P (pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang) mulai dari sumber sampah (baik domestik, niaga dan industri) dengan prinsip pengelolaan sampah tuntas di tempat secara mandiri dan berkesinambungan; dan
 - peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem persampahan; dan
 - peningkatan kapasitas pengelola pengembangan alternatif pembiayaan.
3. Jalur dan ruang evakuasi bencana dalam rencana tata ruang Kabupaten Bandung Barat meliputi :
- pengembangan zona aman bencana;
 - penetapan jalur evakuasi bencana terdiri atas :
 - jalur evakuasi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Cililin melalui jalan Ciririp-Bangsaya-Buninagara ke Jalan Cililin-Sindangkerta menuju ruang evakuasi bencana di Pendopo Kecamatan Cililin;
 - jalur evakuasi bencana alam letusan gunung berapi di Kecamatan Lembang melalui jalan Bandung-Lembang menuju ruang evakuasi bencana di Kota Bandung;
 - jalur evakuasi bencana gempa bumi tektonik di Kecamatan Lembang melalui jalan Bandung-Lembang menuju ruang evakuasi bencana di Kota Bandung;

- jalur evakuasi bencana kebocoran bendungan di Waduk Saguling diarahkan ke Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Batujajar melalui jalan Saguling-Cioray, jalan Saguling-Baranangsiang, jalan Saguling-Cipangeran menuju ruang evakuasi bencana di Desa Baranangsiang; dan
- jalur evakuasi bencana kebocoran bendungan di Waduk Cirata diarahkan ke Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy.

→ penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana.

4. Jaringan prasarana di Kabupaten Bandung Barat lainnya terdiri atas:

- a. pengembangan sistem drainase; dan
- b. pengembangan sistem air limbah.

Pengembangan sistem drainase meliputi:

- a. pembangunan saluran drainase skala tersier di PPK;
- b. pemeliharaan saluran drainase;
- c. perbaikan dan normalisasi saluran drainase; dan
- d. perencanaan drainase terpadu dengan jaringan jalan.

Pengembangan sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
- b. penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;
- c. pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu meliputi:
 1. Kecamatan Cipatat; dan
 2. Kecamatan Batujajar.

Bab IV

KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PRIORITAS PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.1 Tahap Analisis

Tahap awal kegiatan analisis mengenai proses kajian tingkat pelayanan prioritas persampahan yaitu dengan melakukan pemilihan wilayah perkotaan. Kegiatan analisis pemilihan wilayah perkotaan diawali dengan pemilihan wilayah perkotaan, hasil pemilihan wilayah perkotaan tersebut ditindak lanjuti dengan pemilihan jenis pelayanan persampahan berdasarkan penentuan skala kepentingan daerah pelayanan persampahan sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan analisis tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap variabel-variabel yang berpengaruh. Pendekatan tersebut dilakukan selain untuk pemilihan lokasi, dapat juga untuk mengetahui jenis pelayanan persampahan di wilayah perkotaan terpilih.

Tahap akhir kegiatan dalam analisis dalam kegiatan identifikasi daerah dan jenis pelayanan ini yaitu menentukan wilayah perkotaan mana yang paling dominan di layanani oleh sistem pelayanan persampahan di kabupaten Bandung Barat. Adapun pembahasan lebih rinci mengenai kegiatan analisis kajian wilayah perkotaan prioritas pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat dijelaskan dalam pembahasan berikut.

No	Variabel	Pengertian	Sumber
1	Dominasi fungsi utama kawasan perkotaan	Dominasi fungsi kawasan yang sangat berpengaruh untuk pengembangan persampahan	SK.SNI 19-2454-2002
2	topografi	Kemiringan yang berada di kemiringan antara 0-15% yang memungkinkan untuk pengembangan persampahan	SK.SNI 19-2454-2002
3	Kepadatan Penduduk	Tingkat kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap timbulan sampah	SK.SNI 19-2454-2002
4	Tingkat Pendapatan Penduduk	Tingkat pendapatan penduduk berpengaruh terhadap pengelolaan persampahan dikarenakan biaya untuk pengelolaan persampahan tidak sedikit.	SK.SNI 19-2454-2002

No	Variabel	Pengertian	Sumber
5	Daerah Pelayanan	Daerah pelayanan adalah daerah yang sudah mendapatkan pelayanan dan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan	SK.SNI 19-2454-2002
6	Kondisi lingkungan	Menggambarkan kondisi eksisting lingkungan dilihat dari kondisi baik, sedang, buruk, buruk sekali.	SK.SNI 19-2454-2002

4.2 Analisis Penentuan Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan

Untuk melihat penentuan wilayah perkotaan prioritas pelayanan persampahan dilakukan dengan teknik analisis Distribusi Frekuensi dan MCDM. Dengan menggunakan variabel-variabel yang terdapat di atas maka untuk penentuan prioritas pelayanan persampahan di peroleh nilai terhadap wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Dari nilai-nilai yang didapat menggunakan Distribusi Frekuensi maka tahap selanjutnya adalah menjumlahkan nilai yang ada pada kecamatan dengan nilai bobot yang terdapat pada variabel sehingga didapat skor yang ada pada wilayah perkotaan tersebut.

4.2.1 Dominasi Fungsi utama Kawasan Perkotaan

Dominasi fungsi utama kawasan dibentuk berdasarkan hasil dari analisis wilayah perkotaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari Kondisi eksisting Kabupaten Bandung Barat itu sendiri sehingga terlihat fungsi-fungsi utama yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat memudahkan untuk pemberian nilai,. Adapun nilai untuk fungsi dan nilai daerah yaitu :

- **Fungsi Perumahan** : 5
- **Fungsi pariwisata** : 4
- **Fungsi perdagangan** : 3
- **Fungsi industri** : 2
- **Fungsi pertanian** : 1

Tabel IV.1
Nilai Dominasi Fungsi Utama Wilayah perkotaan di Kabupaten Bandung Barat

No	Perkotaan	Dominasi Fungsi Utama Kawasan (ha)										Nilai
		perumahan	%	pariwisata	%	Perdagangan	%	Industri	%	Pertanian	%	
1	Ngamprah	1669	46,2	112	3,10	125	3,5	169	5	343	9,5	5
2	Padalarang	1632	31,6	111	2,15	113	2,2	601	12	1583	30,7	5
3	Lembang	158	1,6	745	7,58	131	1,3	0	0	8	0,1	4
4	Cililin	1263	15,5	3	0,04	116	1,4	0	0	1908	23,4	1
5	Cikalongwetan	635	5,7	112	1,00	121	1,1	20	0	3704	33,0	1
6	Cisarua	450	8,1	112	2,02	112	2,0	0	0	106	1,9	5
7	Batujajar	1013	12,1	1	0,01	30	0,4	2218	27	874	10,4	2
8	Cipatat	1856	14,8	134	1,07	122	1,0	0	0	3532	28,1	1
9	Cipeundeuy	573	5,7	119	1,18	115	1,1	1500	15	1998	19,7	1
10	Cihampelas	774	16,6	2	0,04	118	2,5	100	2	2336	50,1	2

Sumber :Hasil Analisis dan Bapeda KBB

Berdasarkan fungsi dan nilai daerah wilayah perkotaan di Kabupaten Bandung Barat maka yang paling penting di kembangkan untuk pelayanan persampahan berada di penilaian dengan nilai tertinggi itu disebabkan nilai tertinggi dari wilayah perkotaan tersebut sesuai dengan penilain daerah dengan fungsi perumahan adalah daerah penghasil sampah yang besar. Hal itu dikarenakan daerah perumahan adalah daerah dengan rumah tangga tinggi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga ini yang setiap hari volume sampahnya meningkat. Sehingga dari hasil penilaian yang dilakukan terlihat bahwa wilayah yang memiliki nilai yang tinggi yaitu terdapat di wilayah perkotaan di Kecamatan Ngamprah dan wilayah perkotaan di Kecamatan Padalarang karena sesuai dengan penilaian analisis yang dilakukan terlihat bahwa ke dua wilayah perkotaan tersebut sesuai dengan variabel-variabel analisis dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa untuk wilayah perkotaan kecamatan masing-masing fungsi utamanya adalah perumahan.

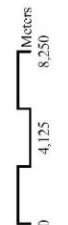
Wilayah perkotaan lain sesuai dengan hasil analisis dengan nilai 4 (empat) sesuai dengan analisis yang dilakukan bahwa untuk wilayah perkotaan yang termasuk ke dalam wilayah dengan fungsi utama perkotaan sebagai fungsi pariwisata terdapat di wilayah perkotaan Kecamatan Lembang. Sedangkan untuk wilayah perkotaan setelah dilakukan analisis dan mendapat nilai 2 (dua) adalah wilayah perkotaan Kecamatan Batujajar yang dominasi fungsi utamanya sebagai wilayah industri.

Kajian Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Bandung Barat

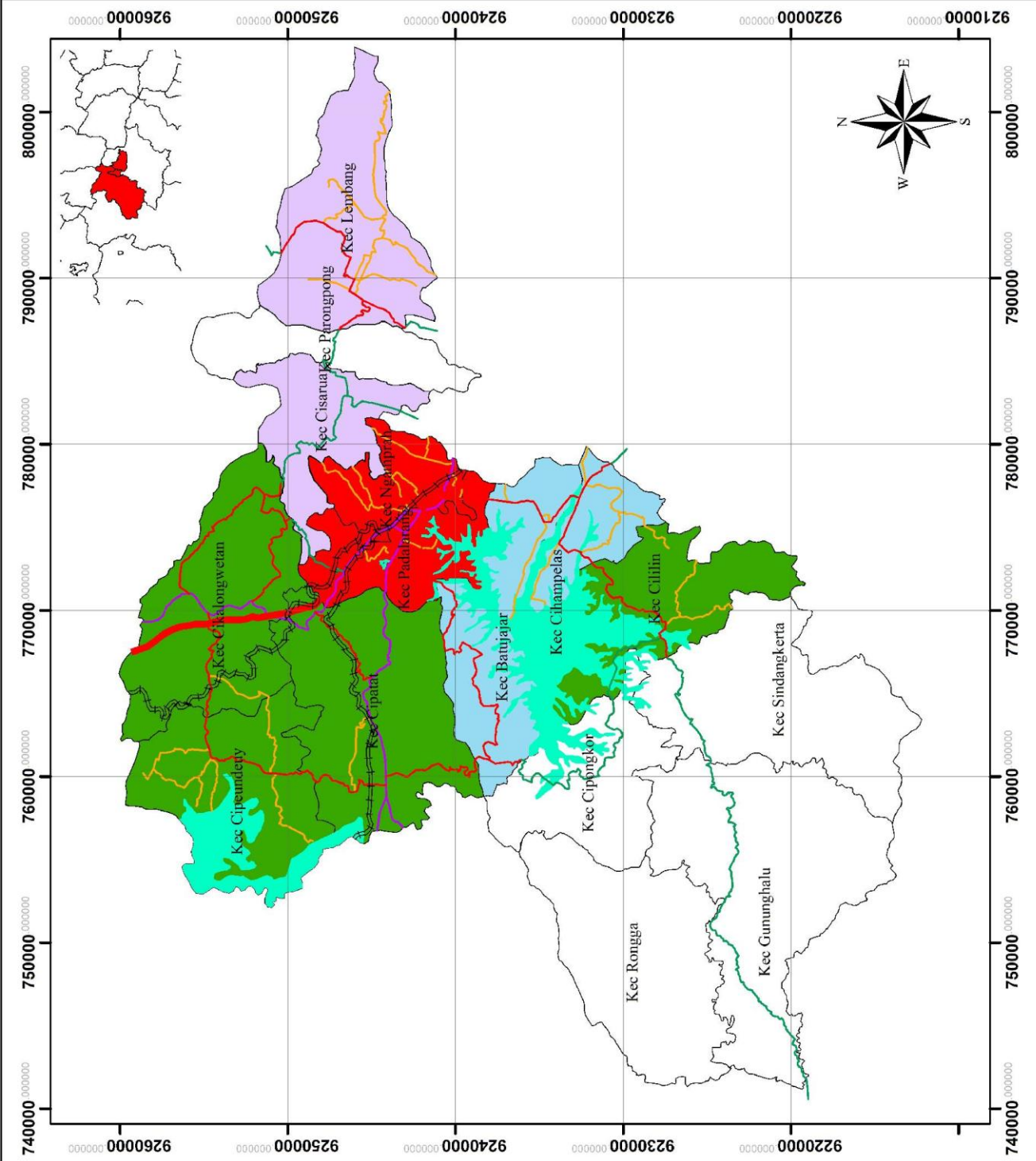
Gambar 4.1
Peta Dominasi Fungsi Kabupaten Bandung Barat

- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ
- Dominasi Fungsi**
- Fungsi Pertanian
 - Fungsi Industri
 - Fungsi Pariwisata
 - Fungsi Perumahan

Sumber :
RTRW Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

Untuk wilayah perkotaan yang memiliki penilaian rendah terdapat di wilayah perkotaan di Kecamatan Cipatat, dan wilayah perkotaan Cipeudeuy, karena wilayah perkotaan di kecamatan-kecamatan tersebut fungsi utamanya berupa kawasan pertanian. Dikarenakan dengan menggunakan asumsi bahwa wilayah dengan fungsi pertanian di kedua wilayah perkotaan tersebut sampah yang dihasilkan telah dikelola dengan baik, dan sampah yang dihasilkan biasanya sudah dimanfaatkan atau dikelola oleh warga sekitar.

4.2.2 Kategori Kondisi Kemiringan

Tabel IV.2 menggambarkan mengenai luas wilayah perkotaan yang ada di kemiringan 0–15% yang memungkinkan untuk pengembangan pelayanan persampahan di wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dengan membagi luas kemiringan yang berada di kemiringan 0-15% maka didapat kategori yang memungkinkan untuk proses analisis. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis dominasi fungsi utama kawasan dapat dilihat pada **tabel IV.1**.

Adapun untuk kategori kemiringan 0–15% di kabupataen Bandung barat di kategorikan menjadi 4 (empat) kategori:

- Kategori Besar (B)** : $\geq 64\%$ (4)
Kategori Sedang (S) : 32 - 64% (3)
Kategori Kecil (K) : 16 - 32% (2)
Kategori Kecil Sekali (KS) : 0 – 16% (1)

Tabel IV.2
Kondisi Kemiringan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009

No	Perkotaan	Luas (Ha)	Kemiringan 0-15%	%	Kategori	Nilai
1	Ngamprah	3.608,58	1160	32	K	2
2	Padalarang	5.157,63	4298	83	B	4
3	Lembang	9.826,54	1530	16	KS	1
4	Cililin	8.154,52	2780	34	S	3
5	Cikalongwetan	11.207,81	550	5	KS	1
6	Cisarua	5.536,41	530	10	KS	1
7	Batujajar	8.368,39	4899	59	S	3
8	Cipatat	12.549,69	3660	29	K	2
9	Cipeudeuy	10.124,66	2450	24	K	2
10	Cihampelas	4.662,71	2150	46	S	3

Sumber hasil Analisis 2009

Kajian

Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Bandung Barat

Gambar 4.2 Peta Kemiringan Kabupaten Bandung Barat

Legenda

- Jalan_Arteri
- Jln_Kolektor
- Jalan_Tol
- Jln_Kereta_Api
- Jln_Lokal
- Waduk_Situ

Kemiringan

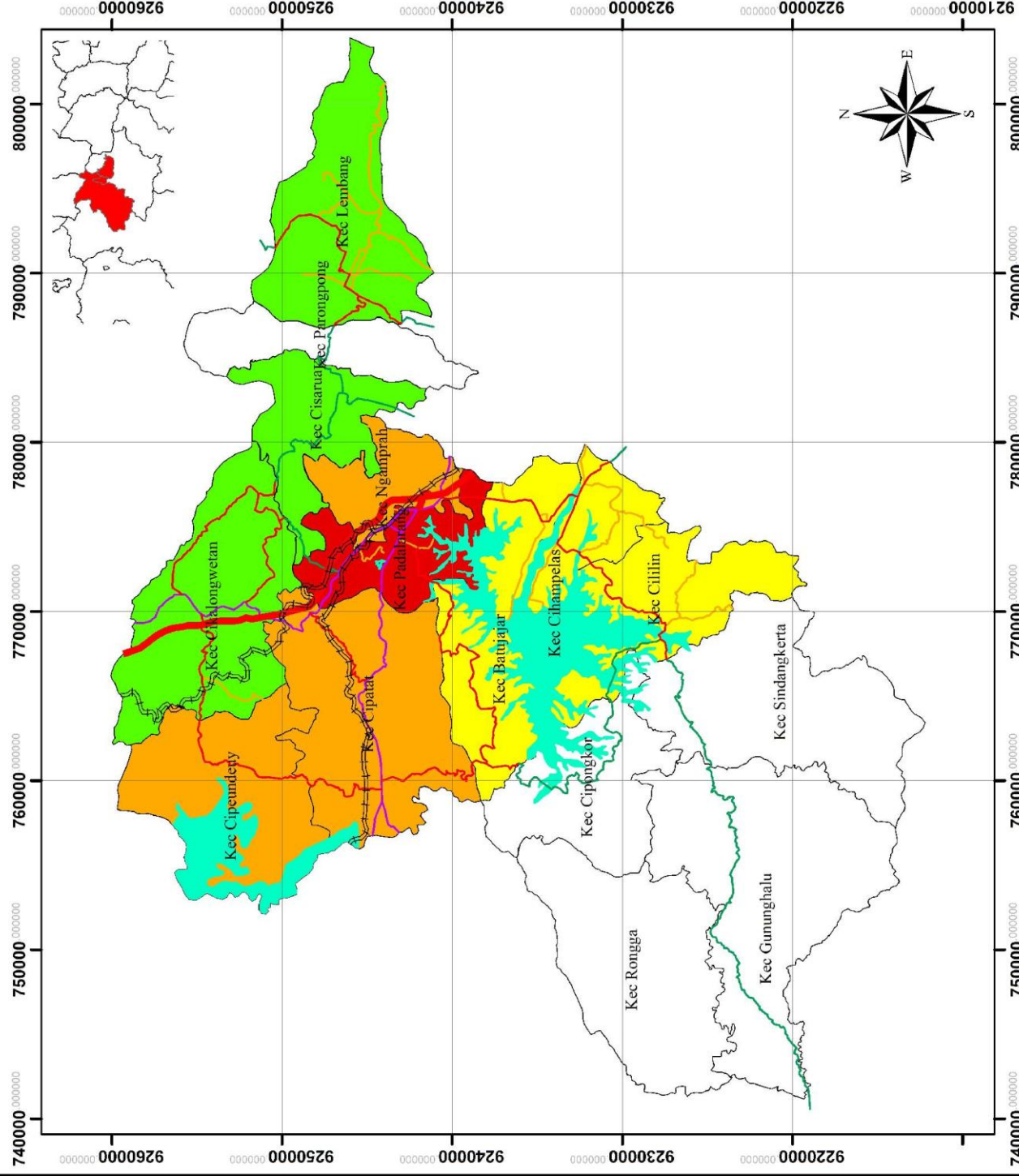
- 0-16% Kemiringan Kecil Sekali
- 16-30% Kemiringan Kkecil
- 32-64% Kemiringan Sedang
- 64% Kemiringan Besar



Sumber :
RTRW Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa luas kemiringan diantara 0 – 15% terbesar di Kabupaten Bandung Barat terdapat di wilayah perkotaan Padalarang sekitar 83% setelah dilakukan analisis, sedangkan untuk kategori sedang di kemiringan diantara 0 – 15% terdapat di Kecamatan Cililin, Cihampelas, dan Wilayah perkotaan Batujajar. Untuk kecamatan dengan kategori kecil sekali setelah dilakukan analisis terdapat di wilayah perkotaan Lembang, Cikalongwetan, dan kawasan Cisarua.

Wilayah perkotaan kecamatan dengan kategori tinggi terdapat di Kecamatan Padalarang ini artinya kecamatan tersebut paling besar kemungkinan untuk pengembangan pelayanan persampahan dikarenakan kemiringan antara 0 – 15% biasanya paling banyak dilakukan aktivitas penduduk seperti perumahan, industri, perdagangan dll yang memungkinkan untuk pelayanan persampahan prioritas dilakukan. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis kondisi kemiringan dapat dilihat pada **tabel IV.2**.

4.2.3 Kategori Kepadatan Penduduk

Analisis selanjutnya menjelaskan mengenai kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan melihat juga dominasi dari fungsi kawasan tersebut yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dengan membagi jumlah penduduk dengan luas lahan yang ada di kemiringan 0 – 15%. Sehingga didapat kategori yang memungkinkan untuk dianalisis, dalam kegiatan penulisan ini tingkat kepadatan penduduk sangat diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap studi kajian prioritas tingkat pelayanan persampahan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Adapun untuk tingkat kepadatan ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori dikarenakan tingkat kepadatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini setelah dilakukan analisis distribusi frekuensi dengan aturan sturges tidak memungkinkan untuk ditentukan 5 kelas sehingga penulis mencoba dengan 4 kelas sehingga didapat kategori seperti berikut yaitu :

Kategori Sangat Tinggi (ST)	: ≥ 28 jiwa/ha (5)
Kategori Tinggi (T)	: 21 – 28 jiwa/ha (4)
Kategori Sedang (S)	: 14 - 21 jiwa/ha (3)
Kategori Rendah (R)	: 7 - 14 jiwa/ha (2)
Kategori Rendah Sekali (RS)	: 0 – 7 jiwa/ha (1)

Tabel IV.3
Tingkat Kepadatan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 2009

No.	Perkotaan	Jumlah penduduk	Luas (Ha)	Kepadatan (jiwa/Ha)	Kategori	Nilai
1	Ngamprah	136600	3.608,58	38	ST	5
2	Padalarang	151736	5.157,63	29	ST	5
3	Lembang	165786	9.826,54	17	S	3
4	Cililin	86350	8.154,52	11	R	2
5	Cikalongwetan	11145	11.207,81	1	RS	1
6	Cisarua	63706	5.536,41	12	R	2
7	Batujajar	109451	8.368,39	13	R	2
8	Cipatat	120282	12.549,69	10	R	2
9	Cipeundeuy	82044	10.124,66	8	R	2
10	Cihampelas	98415	4.662,71	21	T	4

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan hasil Analisis 2009

Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa wilayah perkotaan yang termasuk kedalam tingkat kepadatan dengan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah wilayah perkotaan yang ada di kecamatan Ngamprah, Padalarang dan Cihampelas . Sedangkan untuk kepadatan sedang terdapat di wilayah perkotaan yang ada Kecamatan Lembang. Sedangkan untuk wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan terendah terdapat di wilayah perkotaan di Kecamatan Cililin, Cisarua, Batujajar.Cipatat dan wilayah perkotaan di Kecamatan Cipeundeuy.

Kesimpulan dari analisis tingkat kepadatan di Kabupaten Bandung Barat bahwa kondisi kepadatan yang mendominasi berbanding terbalik dengan kemiringan lain yang terdapat di wilayah perkotaan di kecamatan tersebut, ini dikarenakan tingkat kemiringan 0 – 15% sesuai dengan uraian analisis pada tingkat kemiringan dijelaskan bahwa kawasan yang berada di kemiringan tersebut di dominasi oleh kegiatan perumahan, industri, perumahan, perdagangan dll yang akan mendapat prioritas pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga wilayah perkotaan dengan kepadatan tertinggi akan mendapatkan pelayanan persampahan prioritas. Tetapi tidak sampai disini saja karena masih memungkinkan di variabel-variabel lain wilayah perkotaan kecamatan tertinggi itu mendapatkan bobot nilai yang kecil sehingga akan mempengaruhi penilaian keseluruhan pada analisis pemilihan kecamatan prioritas. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada **Tabel IV.3**.

Kajian
Wilayah Perkotaan Prioritas
Pelayanan Persampahan
Di Kabupaten Bandung Barat

Gambar 4.3
Peta Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bandung Barat

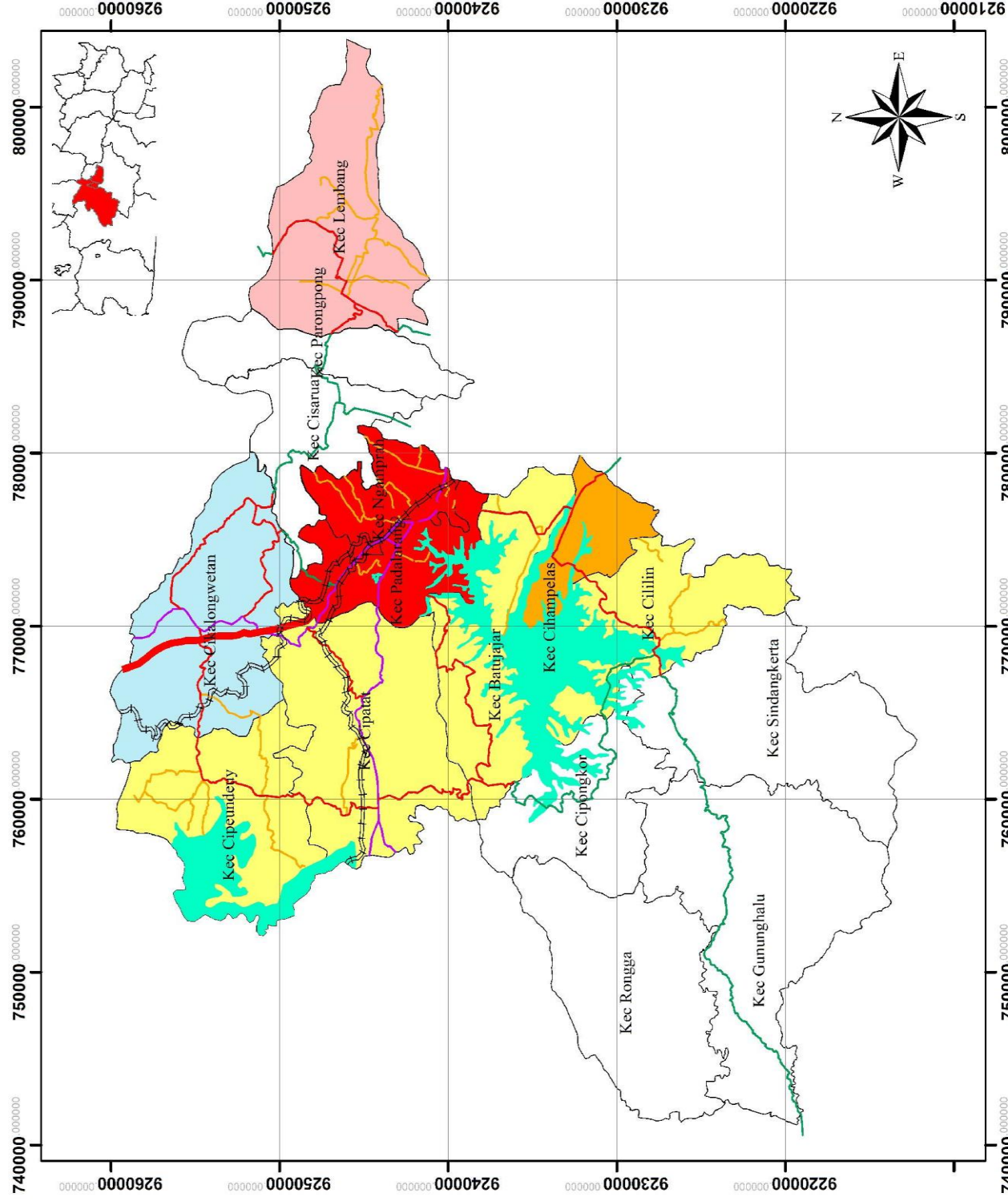
Legenda

- Jalan_Arteri
- Jln_Kolektor
- Jalan_Tol
- Jln_Kereta_Api
- Jln_Lokal
- Waduk_Situ

Kepadatan Penduduk

- 0-7 Rendah Sekali
- 7-14 Rendah
- 14-21 Sedang
- 21-28 Tinggi
- 28 Sangat Tinggi

Sumber :
 RTRW Kabupaten Bandung Barat
 Tahun 2008 - 2025



KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.2.4 Kategori Tingkat Pendapatan di Kabupaten Bandung Barat

Analisis kategori tingkat pendapatan menggambarkan mengenai tingkat pendapatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari hirarki kota yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang terdapat dalam RTRW serta informasi dari dinas – dinas terkait dikarenakan tingkat pendapatan tidak ada data yang begitu riil menggambarkan atau menginformasikan mengenai tingkat pendapatan ini. Sehingga disini dapat dilihat tingkat pendapatan penduduk di setiap wilayah perkotaan kecamatan yang ada namun ini juga menjadi informasi yang penting bagi penulis karena untuk analisis prioritas tingkat pelayanan persampahan wilayah Kabupaten Bandung Barat ini menjadi lebih mudah karena salah satu variabel yang terdapat dalam analisis daerah dan jenis pelayanan persampahan adalah mengenai tingkat pendapatan di suatu daerah atau kecamatan untuk memudahkan analisis . Adapun untuk kategori tingkat pendapatan ini di bagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

Kategori Tinggi (T) : \geq Rp.1.000.000 (3)

Kategori Sedang (S) : Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 (2)

Kategori Rendah (R): \leq Rp. 500.000 (1)

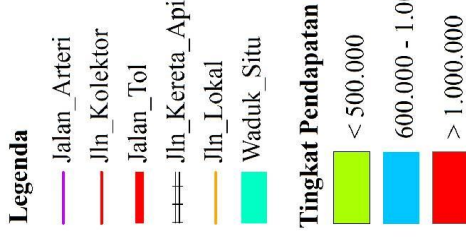
Tabel IV.4
Tingkat Pendapatan di Kabupaten Bandung Barat 2009

No.	Perkotaan	Tingkat Pendapatan	Kategori	Nilai
1	Ngamprah	1.800.000	T	3
2	Padalarang	1.800.000	T	3
3	Lembang	1.800.000	T	3
4	Cililin	650.000	S	2
5	Cikalongwetan	650.000	S	2
6	Cisarua	600.000	S	2
7	Batujajar	650.000	S	2
8	Cipatat	500.000	R	1
9	Cipeundeuy	500.000	R	1
10	Cihampelas	500.000	R	1

Sumber : hasil Analisis 2009

**Kajian
Wilayah Perkotaan Prioritas
Pelayanan Persampahan
Di Kabupaten Bandung Barat**

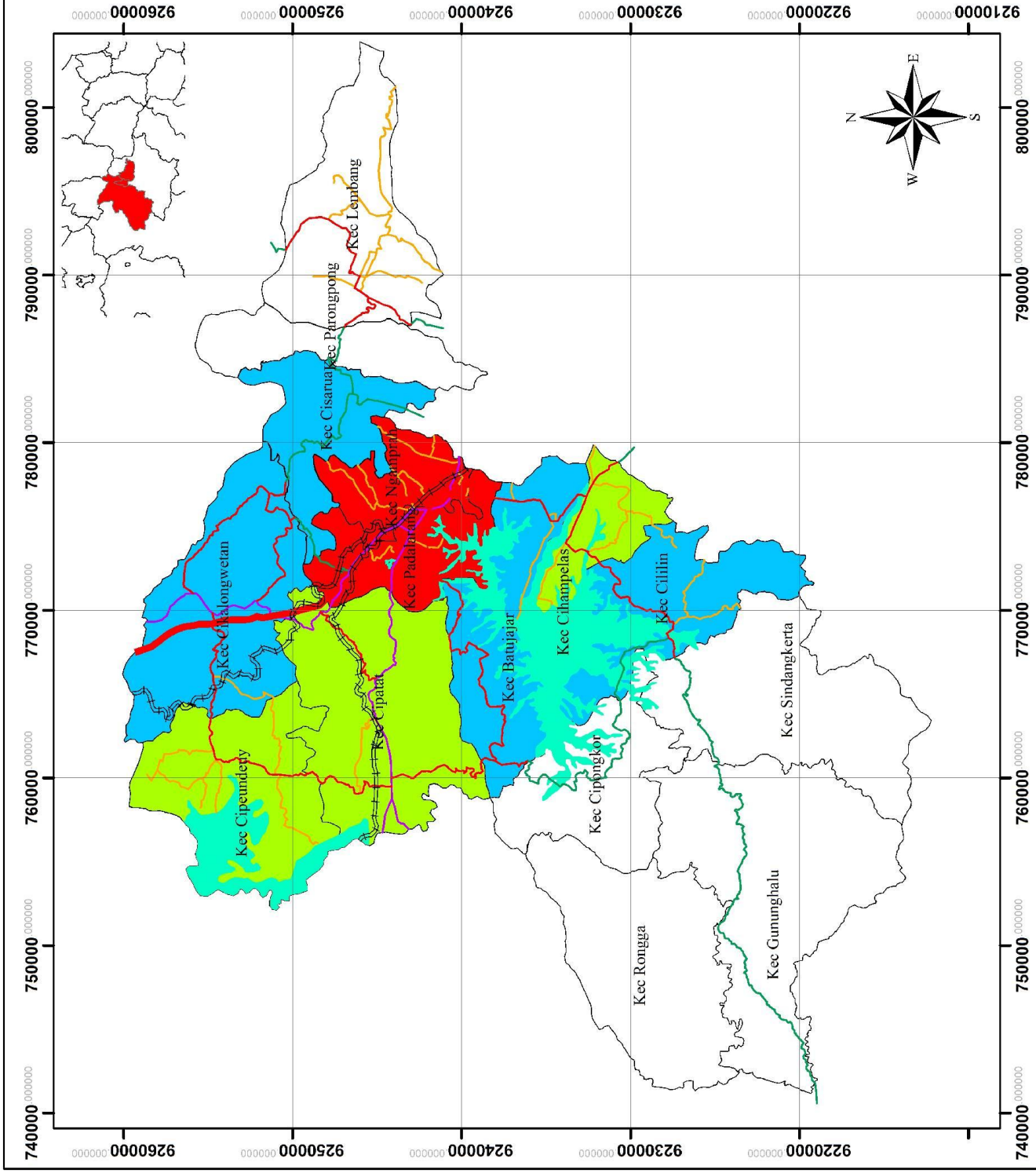
**Gambar 4.4
Peta Pendapatn Penduduk
Kabupaten Bandung Barat**



Sumber :
RTRW Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wilayah perkotaan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat memiliki perbedaan dengan tingkat pendapatan tidak terlalu besar. Hal ini diketahui jika membandingkan peringkat kecamatan pada masing-masing tingkat pendapatan tersebut. Peringkat tertinggi diperoleh wilayah perkotaan Kecamatan Lembang, Ngamprah, dan Kecamatan Padalarang, yang artinya semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar pula pengembangan untuk sistem pelayanan persampahan. Hal itu disebabkan masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih banyak menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-harinya.

Perbedaan yang cukup mencolok terdapat di wilayah perkotaan di Kecamatan Cipatat, Cipeundeuy, dan wilayah perkotaan Cihampelas dimana tingkat pendapatannya hanya Rp. 500.000 ini berbanding terbalik dengan kecamatan yang tingkat pendapatannya tinggi seperti di Kecamatan Lembang. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis tingkat pendapatan dapat dilihat pada **Tabel IV.4**.

4.2.5 Kategori Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan adalah penilaian terhadap wilayah perkotaan yang telah terlayani atau belum terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah UPTD Kebersihan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Daerah pelayanan persampahan ini merupakan salah satu variabel dalam kajian tingkat pelayanan persampahan dimana kita melihat apakah daerah perkotaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat tersebut sudah dilayani oleh sistem pelayanan persampahan atau belum sehingga menjadi salah satu penilaian dalam pengejaan analisis.

Adapun untuk kategori daerah pelayanan dikategorikan menjadi 3(tiga) kategori :

Kategori Belum Terlayani (B) : Yang jauh dari Terlayani (3)

Kategori Dekat yang Terlayani (DT) : Dekat dengan Terlayani (2)

Kategori Sudah Terlayani (S) : Sudah Terlayani (1)

Tabel IV.5
Daerah Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat 2009

No.	Perkotaan	Daerah Pelayanan	Kategori	Nilai
1	Ngamprah	√	S	1
2	Padalarang	√	S	1
3	Lembang	√	S	1
4	Cililin	×	DT	2
5	Cikalongwetan	×	B	3
6	Cisarua	×	DT	1
7	Batujajar	√	S	1
8	Cipatat	×	DT	2
9	Cipeundeuy	×	B	3
10	Cihampelas	×	DT	2

Sumber UPTD Kebersihan Kab.Bandung Barat, Hasil Analisis 2009

Hasi analisis menunjukkan bahwa wilayah perkotaan yang sudah terlayani dan belum terlayani persampahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini UPTD Kebersihan Bandung Barat. Dapat dilihat bahwa wilayah perkotaan Kecamatan yang sudah terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan pemerintah terdapat di wilayah perkotaan Kecamatan Ngamprah, wilayah perkotaan Kecamatan Padalarang, wilayah perkotaan Kecamatan Lembang, dan wilayah perkotaan Kecamatan Batujajar. Dari hasil analisis juga terlihat bahwa wilayah perkotaan kecamatan yang belum terlayani oleh sistem persampahan yang dilakukan oleh pemerintah berada jauh dari pusat pemerintahan atau pun pusat kota yang ada di kecamatan lain seperti terdapat di wilayah perkotaan Kecamatan Cikalongwetan dan wilayah perkotaan di Kecamatan Cipeundeuy. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Tabel IV.5**.

**Kajian
Wilayah Perkotaan Prioritas
Pelayanan Persampahan
Di Kabupaten Bandung Barat**

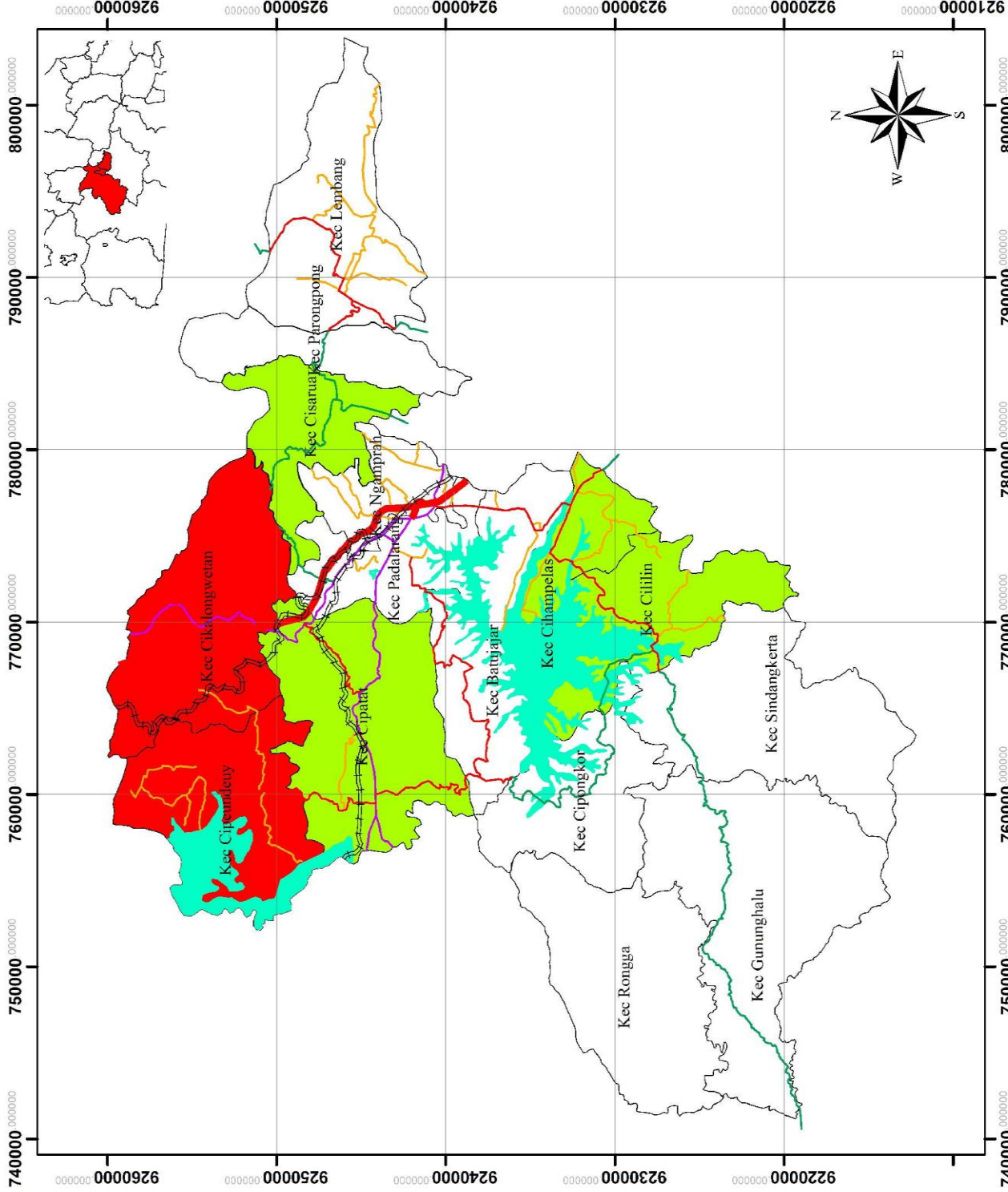
**Gambar 4.5
Peta Daerah Pelayanan
Kabupaten Bandung Barat**

- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ
- Daerah Pelayanan**
- Belum Terlayani
 - Dekat Terlayani

Sumber :
RTRW Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.2.6 Kategori Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan adalah penilaian terhadap kondisi lingkungan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari berbagai kondisi yang ada antara lain:

Kategori Buruk sekali (BS) : 4 (Sampah Tidak dikelola, sangat kotor)

Kategori Buruk (BK) : 3 (Sampah tidak dikelola, kotor)

Kategori Sedang (S) : 2 (Sampah dikelola, lingkungan kotor)

Kategori Baik (B) : 1 (sampah dikelola, lingkungan bersih)

Tabel IV.6

Kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat 2009

No.	Perkotaan	Kondisi Lingkungan	Kategori	Nilai
1	Ngamprah	Baik	B	1
2	Padalarang	Baik	B	1
3	Lembang	Baik	B	1
4	Cililin	Buruk	S	3
5	Cikalongwetan	Buruk	BK	3
6	Cisarua	Buruk	B	3
7	Batujajar	Sedang	S	2
8	Cipatat	Buruk	BK	3
9	Cipeundeuy	Buruk	BK	3
10	Cihampelas	Buruk	S	3

Sumber: Hasil Analisis 2009

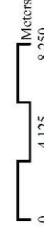
Variabel selanjutnya yang dilakukan analisis pada rat adalah variabel kondisi lingkungan. Dari analisis yang dikembangkan menunjukkan bahwa wilayah perkotaan kecamatan yang di Kabupaten Bandung Barat dengan variabel kondisi lingkungan. baik menurut informasi yang didapat dan hasil observasi di lapangan bahwa wilayah perkotaan kecamatan yang memiliki kondisi baik adalah wilayah perkotaan di Kecamatan : Lembang, Padalarang, dan wilayah perkotaan yang ada di Kecamatan Ngamprah. Sedangkan untuk wilayah perkotaan kecamatan dengan kondisi lingkungan buruk sesuai dengan informasi yang didapat dan hasil observasi lapangan terdapat di wilayah perkotaan di Kecamatan : Cikalongwetan, Cipatat, dan Wilayah perkotaan Cipeundeuy. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis kondisi lingkungan dapat dilihat pada **Tabel IV.6**.

**Kajian
Wilayah Perkotaan Prioritas
Pelayanan Persampahan
Di Kabupaten Bandung Barat**

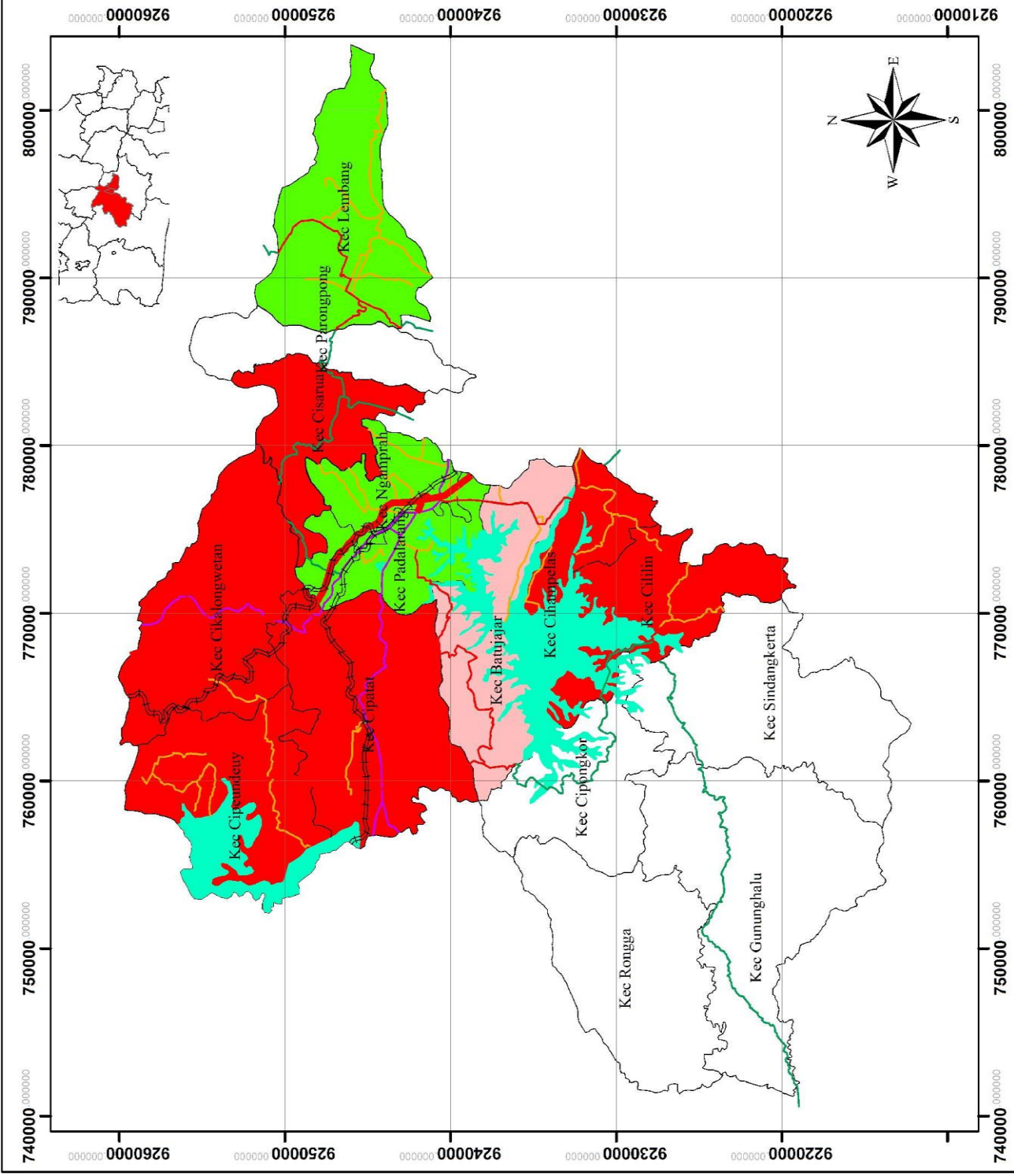
**Gambar 4.6
Peta Kondisi Lingkungan
Kabupaten Bandung Barat**

- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ
- Kondisi Lingkungan**
- Kategori Baik
 - Kategori Buruk
 - Kategori Sedang

Sumber :
RTRW Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.3 Kriteria Analisis

Adapun yang dimaksud dengan kriteria pemilihan wilayah perkotaan kecamatan berdasarkan pada variabel pemilihan wilayah perkotaan kecamatan, yaitu :

- (1) Dominasi Fungsi utama kawasan perkotaan
 - Fungsi perumahan (5)
 - Fungsi pariwisata (4)
 - Fungsi perdagangan (3)
 - Fungsi industri (2)
 - Fungsi pertanian (1)
- (2) Kondisi Kemiringan
 - Besar (4), kondisi kemiringan lebih dari 64%
 - Sedang (3), berada di antara 32 – 64%.
 - Kecil (2), berada di antara 16. – 32%
 - Kecil Sekali (1) berada diantara 0 – 16%.
- (3) Tingkat kepadatan penduduk : (kategorikan berdasarkan kepadatan)
 - Sangat Tinggi (5), kondisi kepadatan lebih dari 28 jiwa/ha.
 - Tinggi (4), berada diantara 21 – 28 jiwa/ha.
 - Sedang (3), berada diantara 14 – 21 jiwa/ha.
 - Rendah (2), berada diantara 7 – 14 jiwa/ha.
 - Rendah Sekali (1), berada diantara 0 – 7 jiwa/ha.
- (4) Tingkat pendapatan penduduk : (kategorikan berdasarkan pendapatan)
 - Tinggi (3), pendapatan tinggi.
 - Sedang (2), pendapatan sedang.
 - Rendah (1) pendapatan rendah.
- (5) Daerah pelayanan persampahan : (kategorikan berdasarkan pelayanan)
 - Belum Terlayani (3), belum terlayani pelayanan persampahan.
 - Dekat dengan Terlayani (2), dekat dengan daerah yang terlayani pelayanan persampahan.

- Sudah terlayani (1), sudah terlayani pengelolaan persampahan.

(6) Kondisi lingkungan : (kategorikan berdasarkan kondisi lingkungan)

- Buruk Sekali (4), sampah tidak dikelola lingkungan kotor daerah endemis penyakit.
- Buruk (3), sampah tidak dikelola lingkungan kotor.
- Sedang (2), sampah dikelola lingkungan kotor.
- Baik (1), sampah dikelola lingkungan baik.

4.4 Pemilihan Wilayah Perkotaan

Berdasarkan kriteria identifikasi pemilihan wilayah perkotaan kecamatan tersebut dan disesuaikan dengan pembahasan awal, maka diketahui bahwa Kabupaten Bandung Barat yang terbagi menjadi 15 Kecamatan menetapkan untuk pelayanan persampahan secara merata di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, nilai akhir yang terdapat dalam penghitungan metoda pembobotan ini memiliki arti sebagai wilayah kecamatan yang dianggap paling prioritas dan potensial untuk menjadi kecamatan yang paling cocok untuk pelayanan persampahan. Untuk menentukan kecamatan-kecamatan yang dianggap memiliki prioritas tertinggi diawali dengan menggunakan metode *scalling technique*, yang berfungsi untuk menentukan nilai dari masing-masing kategori variabel seperti diuraikan dalam pembahasan awal di atas.

Untuk memudahkan analisis setelah melakukan proses diatas selanjutnya dilakukan dengan proses penghitungan dengan menggunakan analisis MCDM (Multi Criteria Decision Making) dalam teknis analisis ini dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan membandingkan kondisi antar kecamatan alternatif, untuk memilih kecamatan alternatif yang baik bagi Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan pendekatan secara kuantitatif dilakukan dengan memanfaatkan hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yaitu metode scoring dengan menggunakan distribusi frekuensi. Adapun metode MCDM adalah metode untuk memberikan pemilihan terhadap beberapa variabel yang telah ditetapkan, yaitu dengan menggabungkan kedua metode sebelumnya sehingga diketahui besaran nilai untuk wilayah studi dan membantu peneliti untuk menetapkan kecamatan prioritas.

Tabel IV.7

No	Kriteria	Nilai Bobot	Alternatif Kecamatan										Keterangan Nilai
			Ngamprah	Padalarang	Lembang	Cililin	Cikaongwet an	Cisarua	Batujajar	Cipatat	Cipeundeuy	Cihampelas	
1	Fungsi dan Nilai daerah	Nilai	5	5	4	1	1	4	2	1	2	1	5.fungsi perumahan 4. fungsi pariwisata 3. fungsi perdagangan 2. fungsi industri 1. fungsi pertanian
	(Bobot 3)	Skor	15	15	12	3	3	12	6	3	6	3	
	2	Kemiringan	Nilai	2	4	1	3	1	1	3	2	2	
(Bobot 1)	Skor	2	4	1	3	1	1	3	2	2	3		
3	Kepadatan	Nilai	5	5	3	2	1	2	2	2	2	4	5. Sangat Tinggi 4. Tinggi 3. Sedang 2. Rendah 1. Rendah Sekali
(Bobot 3)	Skor	15	15	9	6	3	6	6	6	6	12		
4	Pendapatan	Nilai	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	
(Bobot 2)	Skor	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2		
5	Daerah pelayanan	Nilai	1	1	1	2	3	1	1	2	3	2	3. Belum terlayani 2. Dekat terlayani 1. Sudah Terlayani
(Bobot 3)	Skor	3	3	3	6	9	3	3	6	9	6		
6	Kondisi Lingkungan	Nilai	1	1	1	3	3	3	2	3	3	3	
(Bobot 2)	Skor	2	2	2	6	6	6	4	6	6	6		
Total Skor			43	45	33	28	26	32	26	25	31	32	

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pada wilayah perkotaan kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan prioritas yang paling besar skornya dan masuk kepada kondisi 1(satu) adalah :

- Kecamatan Padalarang : 45
- Kecamatan Ngamprah : 43

Wilayah perkotaan kecamatan yang termasuk pada kondisi 1 (satu) adalah wilayah perkotaan kecamatan dengan pelayanan intensif karena wilayah perkotaan kecamatan yang terpilih tersebut memiliki bobor tertinggi dengan asumsi wilayah perkotaan kecamatan tersebut menghasilkan timbunan sampah yang tinggi sehingga pelayanan persampahan pada wilayah perkotaan kecamatan tersebut menjadi prioritas.

b. Pada kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan menengah yang masuk pada skornya dan masuk kepada kondisi 2 (dua) adalah :

- Kecamatan Lembang : 33
- Kecamatan Cihampelas : 32
- Kecamatan Cisarua : 32
- Kecamatan Cipeundeuy : 31

Wilayah perkotaan kecamatan yang termasuk pada kondisi 2 (dua) adalah wilayah perkotaan kecamatan dengan pelayanan menengah yang sesuai dengan fungsi kecamatan bisa dikategorikan fungsi perumahan dan pariwisata dengan asumsi bahwa sampah banyak tetapi tidak berbahaya sehingga mendapat pelayanan menengah dalam hal pelayanan persampahannya.

c. Pada kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan rendah yang masuk pada kondisi 3 (tiga) adalah:

- Kecamatan Cililin : 28
- Kecamatan Cikalongwetan : 26

Wilayah perkotaan kecamatan yang termasuk pada kondisi 3(tiga) adalah wilayah perkotaan kecamatan dengan pelayanan rendah dengan asumsi wilayah perkotaan yang masuk pada kondisi 3 adalah daerah perkotaan tetapi jauh dari pusat kota utama.

d. Pada kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan tanpa pelayanan yang masuk pada bobotnya dan masuk pada kondisi 4 (empat) adalah:

- Kecamatan Batujajar : 26
- Kecamatan Cipatat : 25

Wilayah perkotaan kecamatan yang terpilih pada kondisi 4 (empat) dalam hal ini adalah wilayah tanpa pelayanan di karenakan kondisi kecamatan terlalu jauh dari dari pusat kota dan belum terjangkau oleh truk pengangkut sampah. Sehingga kecamatan yang termasuk pada kecamatan ini tidak mendapatkan pelayanan persampahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sistem Pelayanan persampahan yang ada di kawasan studi kasus sebagai salah satu implementasi kebijakan di Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya merupakan optimasi pelayanan persampahan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran studi. Optimasi pelayanan persampahan di sini diartikan mampu melayani persampahan sesuai dengan apa yang ingin dicapai pada penulisan ini. Disamping itu juga diperlukan rekomendasi-rekomendasi lanjutan bagi pelaksanaan pelayanan sistem persampahan.

5.1 Kesimpulan

Studi identifikasi jenis pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat dijabarkan dan diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- e. Pada kawasan perkotaan kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan prioritas yang paling besar proporsinya dan masuk pada kondisi 1 (satu) sehingga mendapatkan prioritas pelayanan adalah :
 - Kecamatan Padalarang
 - Kecamatan Ngamprah

- f. Pada kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan menengah dan masuk pada kondisi 2 (dua) adalah :
 - Kecamatan Lembang
 - Kecamatan Cihampelas
 - Kecamatan Cisarua
 - Kecamatan Cipeundeuy

- g. Pada kecamatan yang terpilih sebagai pelayanan persampahan rendah yang dan masuk pada kondisi 3 (tiga) adalah :
 - Kecamatan Cililin
 - Kecamatan Cikalongwetan

- h. Pada kecamatan yang terpilih tanpa pelayanan dan masuk pada kondisi (empat) adalah :

- Kecamatan Batujajar
- Kecamatan Cipatat

5.2 Saran

Tindak lanjut pelaksanaan pelayanan persampahan pada kawasan studi kasus Kabupaten Bandung Barat harus didukung oleh perangkat hukum. Hal tersebut untuk melindungi semua pihak, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian keterpaduan program antara instansi terkait perlu disiapkan secara mantap, sehingga terdapat kesatuan persepsi, dan tindakan nyata di lapangan.

Pengelolaan pelayanan persampahan prioritas tidak akan bermanfaat secara optimal jika tidak diikuti adanya kebijakan lanjutan untuk memonitor pelaksanaan pelayanan persampahan prioritas secara konsekuen dan efektif. Sistem pengawasan harus benar-benar dilaksanakan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah melihat hasil dari analisis didalam bab sebelumnya maka penulis ingin mencoba memberikan saran terkait dengan pelayanan persampahan antara lain:

1. Untuk pelayanan dengan menggunakan sistem komunal dilaksanakan di kecamatan yang berada pada kondisi 1(satu) hal itu dikarenakan bahwa kecamatan yang ada pada kondisi 1 adalah daerah yang memiliki fungsi perumahan.
2. Untuk pelayanan sistem komunal setelah diterapkan di kecamatan yang masuk pada kondisi 1(satu) diterapkan pula pada wilayah perkotaan kecamatan yang masuk pada kondisi 2 (dua) yang terdapat
3. Sedangkan untuk wilayah yang masuk pada pelayanan rendah atau dalam hal ini kecamatan yang termasuk pada kecamatan dalam kondisi 3 (tiga) terdapat di kecamatan Cililin dan Kecamatan Cikalongwetan. Hal ini disebabkan wilayah yang masuk dalam kondisi 3(tiga) adalah daerah pinggiran kota.
4. Pada kecamatan yang tidak mendapatkan pelayanan adalah daerah yang jauh dari pusat kota atau dalam hal ini kecamatan yang masuk dalam kondisi 4(empat) seperti terdapat di Kecamatan Cipatat dan Batujajar

5.3 Kelemahan Studi

Kelemahan studi dalam Kajian Wilayah Kecamatan Prioritas Pelayanan Persampahan di kabupaten bandung Barat:

1. Studi ini tidak didukung dengan data yang baik dikarenakan masih terbatas data yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
2. Kategorisasi pada variabel hanya didasarkan atas kabupaten Bandung Barat saja.
3. Hambatan yang ditemui dalam penentuan pelayanan prioritas ini adalah pada proses penilaian kecamatan, disebabkan tidak semua kecamatan karakteristiknya sama sehingga menyulitkan proses analisis yang dilakukan dalam pelayanan prioritas.

Kajian Wilayah Perkotaan Prioritas Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Bandung Barat

Gambar 5.1
Peta Hasil Analisis Kabupaten Bandung Barat

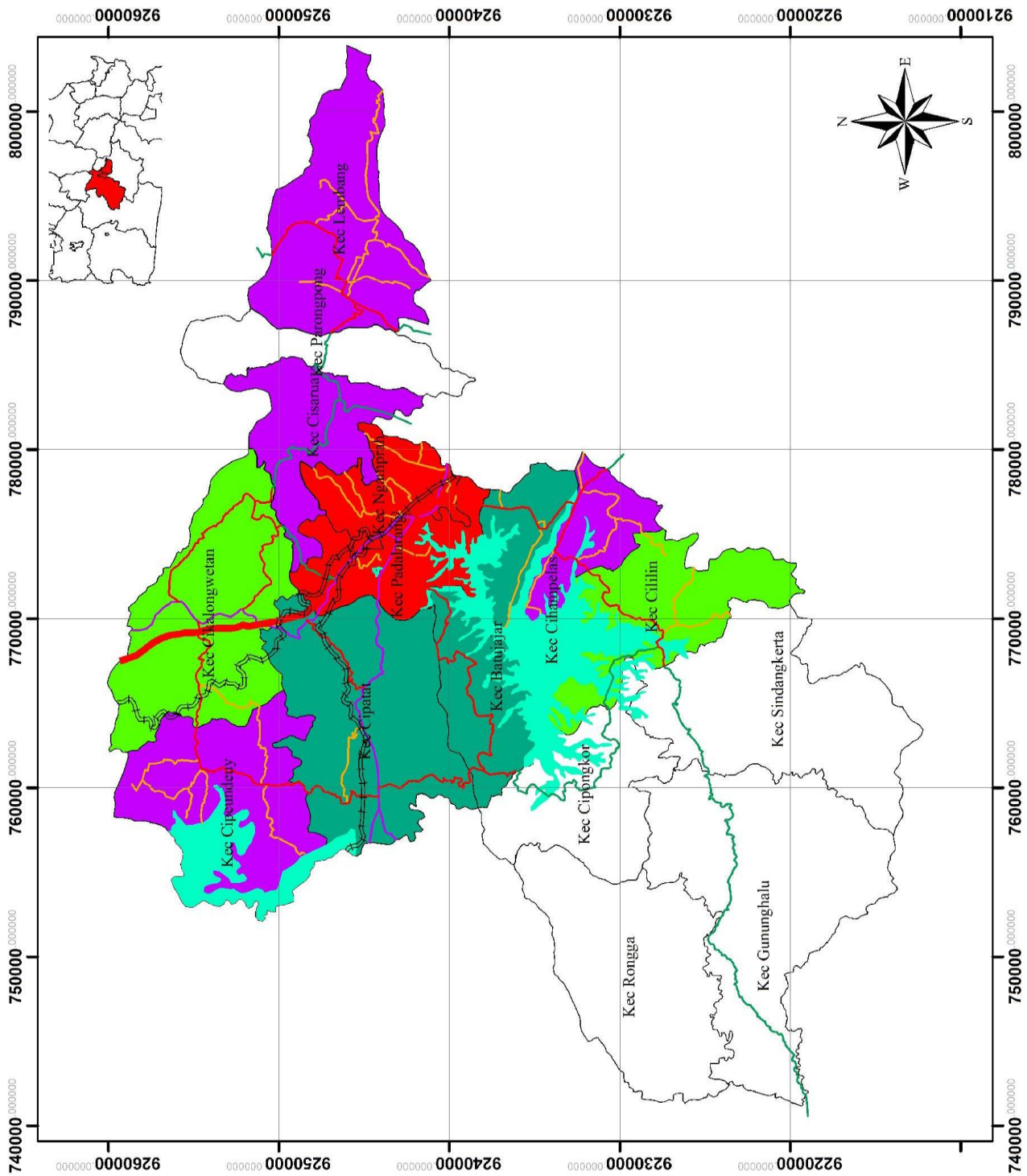
- Legenda**
- Jalan_Arteri
 - Jln_Kolektor
 - Jalan_Tol
 - Jln_Kereta_Api
 - Jln_Lokal
 - Waduk_Situ
- Hasil Analisis**
- Kondisi 1
 - Kondisi 2
 - Kondisi 3
 - Kondisi 4



Sumber :
RTRW Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2025



PROGRAM STUDI TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2013



KABUPATEN BANDUNG BARAT

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU REFERENSI

- ❖ **Damanhuri, Enri. Tri Padmi.** *Diktat Kuliah TL-3150 Pengelolaan Sampah Edisi Semester I 2004/2005.* Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan, ITB. 2006
- ❖ **Glasson, J.** *An Introduction to Regional Planning.* London: Hutchinson Educational.1974
- ❖ **Thcbanaglou. George, Theisen,Hillary, Samuel.***Integrated Solid Waste Management,* Mc. Graw, Hill International Editions, New York, 1993.
- ❖ **Catanese, Anthony J; James C. Snyder.** 1996. *Perencanaan kota.* Penerbit Erlangga. Jakarta.
- ❖ **Jayadinata, J.T.** 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah. Edisi Tiga.* – Konsolidasi Tanah Wilayah Perkotaan. Penerbit ITB. Bandung.
- ❖ **Sudjana.** 1975. *Metoda Statistika.* Bandung.
- ❖ **Anggoro, Linggar.**2005 *Teori dan Profesi Kehumasan:serta aplikasinya di Indonesia* Penerbit Bumi Aksara. Bandung.
- ❖ **Masduki, M.**1991, *Diktat Kuliah Persampahan,* Jurusan Teknik Lingkungan, ITB, Bandung.
- ❖ **AA,** *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan,* PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1979.
- ❖ **Tarigan, Robinson.** *Perencanaan Pembangunan Wilayah,* Bumi Aksara Jakarta, 2005
- ❖ **Budiharjo. Eko,** *Tata Ruanag Perkotaan, Alumni, Bandung,2005.*
- ❖ **Budiharjo. Eko,** *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota, Alumni, 2006.*
- ❖ **Sudrajat.** *Mengelola Sampah Kota, Penebar Swadaya, 2007.*

2. TUGAS AKHIR, TESIS,

- ❖ **Priyana, Ani.** *Identifikasi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Wilayah Cicurug Kabupaten Sukabumi,* Jurusan Teknik Planologi Unpas 2004.
- ❖ **Lambodosa, Sidik.** *Evaluasi Tingkat Penerimaan (Akseptabilitas) Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Desa Sayang,* Jurusan Teknik Planologi ITB 2004.
- ❖ **Wartini,** *Studi Pengelolaan Sampah Sistem Komunal Di Permukiman Kota Bandung,* Jurusan Teknik Planologi ITB 2006.

3. TERBITAN TERBATAS

- ❖ **Departemen Pekerjaan Umum, Tata Cara Pengelolaan Sampah Di Pemukiman**, SK SNI T –12 – 1991 – 031, Yayasan LPMB, Bandung 1991.
- ❖ **Departemen Pekerjaan Umum, Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan**, SK SNI T –13 – 1990 – 1990 - F, Yayasan LPMB, Bandung 1990.
- ❖ **DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan Pada Lingkungan Pemukiman Baru.**
- ❖ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029.
- ❖ PD. Kebersihan Kota Bandung Pengelolaan sampah Kota Bandung tahun 2008
- ❖ Monografi Seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung Barat 2009

4. Internet

- ❖ <http://www.pikiran-rakyat.com>
- ❖ <http://www.bandung.go.id>



Salah satu fasilitas pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung Barat

Salah satu TPS yang ada di Kabupaten Bandung Barat.



Kegiatan pembuangan sampah di TPA Sarimukti

TPA Sarimukti salah satu TPA yang ada di Kabupaten Bandung Barat

